



Jurusan
Ilmu Pemerintahan
FISIP UNILA

J G S I

Journal of Government and Social Issues

: Volume 1, No. 1, Desember 2021 :

Strategi KPU Kabupaten Bangka Tengah dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih
(Ricky Febriansyah, Mirfandi)

Negosiasi Identitas Budaya Etnis Pendatang dengan Etnis Lokal di Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan
(Ivan Erlangga, Ibrahim Ibrahim, Ranto)

Pengaruh Product, Promotion, Price dan Place Politik Partai Baru terhadap Preferensi Politik Generasi Milenial pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019
(Mamur J O Pan aitan, Tabah Maryanah, Himawan Indra at)

Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Potret Setengah Dasawarsa Penyelenggaraan Dana Desa)
(Aprilia Lestari, Alip Susilowati Utama)

Muhammadiyah dan Civil Society (Studi tentang Toleransi dan Pluralisme)
(Ikang Putra Anggara, Eva Susanti, Herwin Sagita Bela)

Multiculturalism of Fear Etnis Tionghoa pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi Dusun Kebun Sayur Desa Mengkubang Belitung Timur)
(Daeffa Davtywa, Tabah Maryanah, Budi Kurniawan)

J G S I

Vol. 1

No. 1

Hlm. 1 - 47

**Bandar Lampung
Desember 2021**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

	Journal Of Government and Social Issues (JGSI) Volume 1 Nomor 1 2021 https://jgsi.fisip.unila.ac.id/index.php/Jurnal	
---	--	--

PRAKTA REDAKSI

Journal of Government and Social Issues (JGSI) adalah sebuah *peer review* jurnal yang dikelola oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung sebagai wadah publikasi bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan dan *Academia* Ilmu Pemerintahan yang tertarik melakukan publikasi dalam bidang kajian ilmu pemerintahan dan sosial. Jurnal ini dipublikasi pertama kali pada tahun 2021 dan akan terbit secara berkala dua kali selama setahun yaitu pada bulan Juni dan Desember.

JGSI dibuat bagi merangkum ide terbaru progresif yang relevan terhadap kajian ilmu pemerintahan dan sosial. Sampai dengan saat ini, penelitian atau kajian yang terkait dengan ilmu pemerintahan dan sosial masih banyak dilakukan dengan perspektif tunggal (monodisplin) dan monologis akibatnya, penelitian atau kajian tersebut menghasilkan sesuatu yang tidak komprehensif dalam pemetaan masalah utama di masyarakat terutama dikaitkan dengan peran dan fungsi pemerintah. Pada bagian lain, sebagai akibat dari dinamika politik lokal dan global, sebagian besar pemerintahan dunia belum dapat menghasilkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakatnya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai contoh adalah kapasitas kepemimpinan yang lemah dan ketiadaan visi komprehensif yang dibuat dan mampu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. JGSI berusaha menjadi sebuah publikasi yang regular bagi memfasilitasi kajian pemerintahan dan sosial dengan menggunakan beragam perspektif atau pendekatan. JGSI menyediakan publikasi yang berbasis pada pendekatan multidisiplin bagi peneliti dalam dan luar negeri.

Pada edisi perdana ini, redaksi mengucapkan terima kasih pada segenap penulis yang bersedia mempublikasikan tulisannya pada jurnal kami. Terima kasih kepada seluruh dewan redaksi yang telah bekerja keras mempersiapkan edisi perdana, kepada mitra bestari yang telah memberikan saran dan kritik terhadap manuskrip para penulis.

Semoga publikasi kami bermanfaat secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan studi ilmu pemerintahan dan sosial di Indonesia.

Salam dari redaksi,

Bendi Juantara, S.IP,.M.A
Managing Editor



SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Lead Editor

Arizka Warganegara

Managing Editor

Bendi Juwantara

Editors

Ari Darmastuti (Universitas Lampung)
Darmawan Purba (Universitas Lampung)
Dodi Faedulloh (Universitas Lampung)
Dwi Wahyu Handayani (Universitas Lampung)
Feni Rosalia (Universitas Lampung)
Maulana Mukhlis (Universitas Lampung)
Hertanto (Universitas Lampung)
Komang Jaka Ferdian (Universitas Bangka Belitung)
Rizky Godjali (Universitas Tirtayasa)
Roby Cahyadi Kurniawan (Universitas Lampung)
R Sigit Krisbintoro (Universitas Lampung)
R Pitojo Budiono (Universitas Lampung)
Syarief Makhya (Universitas Lampung)
Tabah Maryanah (Universitas Lampung)

International Editorial Board

Andrew Young Mook Cho (University of Leeds, Inggris)
Andri Mardiah (Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia)
Budi Kurniawan (Northern Illinois University, Amerika Serikat)
Muhammad Riza Nurdin (Ritsumeikan University, Jepang)
Mukhriz Mat Ruz (Universiti Utara Malaysia)
Muhammad Febriansyah (Universiti Sains Malaysia)
Shafa Ahmad Sani (Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia)

Editorial Assistant

Fitria Barokah
Elyta

Technical Support

Arief Kurniawan

Alamat Redaksi

Jalan Soemantri Brojonegoro No. 1, Kampus FISIP Universitas Lampung Gd. D Lantai 1.
Bandarlampung, Lampung, Indonesia 35145

Telp/ Fax :

Email: jgsi@fisip.unila.ac.id Website: <http://jgsi.fisip.unila.ac.id/>

DAFTAR ISI

Prakata Redaksi	i
Susunan Dewan Redaksi	li
Daftar Isi	iii
 Strategi KPU Kabupaten Bangka Tengah dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih (<i>Ricky Febriansyah, Mirfandi</i>)	 1-17
 Negosiasi Identitas Budaya Etnis Pendatang Dengan Etnis Lokal di Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan (<i>Ivan Erlangga, Ibrahim Ibrahim, Ranto</i>)	 18-32
 Pengaruh <i>Product, Promotion, Price dan Place</i> Politik Partai Baru terhadap Preferensi Politik Generasi Milenial pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (<i>Mazmur J O Panjaitan, Tabah Maryanah, Himawan Indrajat</i>)	 33-52
 Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Potret Setengah Dasawarsa Penyelenggaraan Dana Desa) (<i>Aprilia Lestari, Alip Susilowati Utama</i>)	 53-60
 Muhammadiyah dan Civil Society (Studi tentang Toleransi dan Pluralisme) (<i>Ilang Putra Anggara, Eva Susanti, Herwin Sagita Bela</i>)	 61-71
 <i>Multiculturalism of Fear</i> Etnis Tionghoa pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi Dusun Kebun Sayur Desa Mengkubang Belitung Timur) (<i>Daffa Davtywa, Tabah Maryanah, Budi Kurniawan</i>)	 72-75

	Journal Of Government and Social Issues (JGSI) Volume 1 Nomor 1 2021: 01-17 https://jgsi.fisip.unila.ac.id/index.php/Jurnal	
---	---	--

ARTICLE



Strategi KPU Kabupaten Bangka Tengah dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih

Ricky Febriansyah¹, Mirfandi²

¹KPU Kabupaten Bangka Tengah & Pemerintah Bangka Tengah, Koba, Indonesia

²KPU Kabupaten Bangka Tengah & Pemerintah Bangka Tengah, Koba, Indonesia

How to cite:

Febriansyah, R.& Mirfandi. (2021). Strategi KPU Kabupaten Bangka Tengah dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih. *Journal Of Government and Social Issues (JGSI)* 1(1). 1-17.

Article History

Dikirim: 21 Oktober, 2021;

Diterima: 14 Desember, 2021;

Dipublikasi: 31 Desember, 2021;

Kata Kunci:

Covid-19

Partisipasi Masyarakat

Pemilihan

Protokol kesehatan

Strategi

ABSTRAK

Partisipasi pemilih penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Bangka Tengah tahun 2020 di masa pandemi covid-19 terlebih lagi pada bulan Desember 2020 curah hujan cukup tinggi. Di masa normal saja pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 partisipasi pemilih hanya 64,63% tetapi di masa pandemi covid-19 peningkatan sebesar 77,85%. Penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, jenis data berupa data primer melalui wawancara dan sekunder dari laporan kegiatan. Tujuan penelitian ini mengetahui mengapa partisipasi pemilih tercapai target dan bagaimana strategi KPU Kabupaten Bangka Tengah dalam peningkatan partisipasi pemilih. Hasil penelitian ini :1). Kebiasaan dalam *new normal* dan penerapan protokol kesehatan di masyarakat; 2). Sosok calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020; 3). Penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan; 4). Tercapainya informasi pemilihan di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Strategi KPU Kabupaten Bangka Tengah: 1). Membangun sinergi dengan *stakeholder*; 2). Pelayanan Protokol kesehatan; 3). Sosialisasi secara daring dan *luring*; 4). Menjamin keselamatan agar tidak terpapar covid-19 bagi pegawai, peserta dan pemilih. Temuan terbaru semua aktor pemilihan berperan aktif dalam peningkatan partisipasi pemilih dan sosialisasi tatap muka masih tetap dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kesimpulan capaian partisipasi pemilih bukan hanya peran KPU. Rekomendasi perlunya peningkatan sinergi antar aktor penyelenggara pemilu.

Keywords:

Covid-19

Community Participation

Election

Health Protocol

ABSTRACT

Voter participation in the 2020 Central Bangka regional head election during the COVID-19 pandemic, especially in December 2020, the rainfall was quite high. In normal times, in the 2015 regional head election, voter participation was only 64.63%, but during the COVID-19 pandemic, the

* Corresponding Author

Email : Kab_bangkatengah@kpu.go.id

© 2021 Author(s), Jurnal Journal Of Government and Social Issues (JGSI) 1 2021

Strategy	increase was 77.85%. This research uses descriptive qualitative research methods, the type of data is primary data through interviews and secondary data from activity reports. The purpose of this study was to find out why the target voter participation was achieved and how the KPU Central Bangka Regency strategy in increasing voter participation. The results of this study: 1). Habits in the new normal and the application of health protocols in the community; 2). Candidates for Regent and Deputy Regent of Central Bangka in 2020; 3). Implementation of health protocols at every stage; 4). Achieving election information in all areas of Central Bangka Regency. Central Bangka Regency KPU Strategy: 1). Build synergies with stakeholders; 2). Health protocol services; 3). Socialization online and offline; 4). Ensure safety so as not to be exposed to covid-19 for employees, participants and voters. The latest findings are that all election actors play an active role in increasing voter participation and face-to-face socialization is still carried out with the implementation of strict health protocols. The conclusion is that the achievement of voter participation is not only the role of the KPU. Recommendations on the need to increase synergy between election organizers.
----------	--

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 diikuti oleh 270 Daerah yaitu 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 kota di 32 Provinsi. Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu Kabupaten terdapat pilkada yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Tahapan pilkada mengalami penundaan yaitu pemungutan suara serentak 23 September 2020. Tahapan dilanjutkan kembali dengan opsi pemungutan suara diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Penundaan dilaksanakan karena bencana nasional pandemi *Coronavirus Disease of 19* (covid-19) belum berakhir. Ketentuan ini telah dijelaskan dalam Pasal 122A Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. (Silalahi, 2020:45)

Penundaan pilkada di masa pandemi covid-19 telah dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada senin 30 Maret 2020 antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hasilnya KPU menawarkan 3 (tiga) opsi penundaan hari pemungutan suara yang awalnya 23 September menjadi 9 Desember 2020, 17 Maret 2021 atau 29 September 2021. (Hasibuan, 2020:121). Penyelenggaraan pemungutan suara pun diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020.

KPU mengeluarkan Keputusan Nomor 179 tahun 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Selanjutnya KPU mengeluarkan surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. (Khalyubi, dkk, 2020:2). Dampaknya KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pilkada mengalami penundaan tahapan yaitu penetapan badan *ad hoc* Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) yang sempat dilantik dan dinonaktifkan statusnya demi memberikan keselamatan bagi penyelenggara pilkada.

Pemerintah akhirnya memutuskan penjadwalan ulang hari pemungutan suara yang diusulkan oleh KPU yaitu pada hari Rabu 9 Desember 2020. Tentunya terdapat dampak positif dan negatif sehubungan pilkada dilanjutkan di masa pandemi covid-19 yang masih tinggi. Dampak positif seperti amanat regulasi yang berlaku tetap terlaksanakan, hak konstitusional peserta pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara dan mencegah pembengkakan anggaran. Akan tetapi terdapat juga dampak negatifnya seperti risiko penularan covid-19

semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan, dan penolakan pilkada berpotensi meningkatkan angka golongan putih (Ristyawati 2020)

KPU Kabupaten Bangka Tengah telah beberapa kali menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) maupun pilkada. Penyelenggaraan pilkada seperti pemilihan bupati dan wakil bupati bangka tengah pada tahun 2005, 2010, 2015 dan 2020 kemudian penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2007, 2012 dan 2017 serta penyelenggaraan pemilu yaitu pemilu 2009, pemilu 2014 dan pemilu serentak tahun 2019.

Tabel 1. Partisipasi Pemilih pada Pemilihan dan Pemilu di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2005 s.d 2020

No	Jenis Pemilihan/Pemilu	Partisipasi
1	Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004	61,60%
2	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2005	58,39%
3	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007	71,29%
4	Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009	69,64%
5	Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009	67,44%
6	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2010	74,33%
7	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012	57,84%
8	Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014	72,31%
9	Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014	61,67%
10	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2015	64,63%
11	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017	64,76%
12	Pemilihan Umum Serentak tahun 2019	
	a. Presiden dan Wakil Presiden	83,78%
	b. Anggota DPD	83,63%
	c. Anggota DPR	83,63%
	d. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	83,60%
	e. Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah	83,57%
13	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020	77,85%

Sumber : Diolah dari KPU Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Perbandingan antara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah pada tahun 2005, 2010, 2015 dan 2020 selama 4 kali penyelenggaraan capaian partisipasi tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 77,85%, bila dibandingkan pada tahun 2010 dicapai sebesar 74,33% sedangkan pada tahun 2015 dicapai sebesar 64,63% namun pada tahun 2005 pilkada pertama sejak dibentuknya Kabupaten Bangka Tengah dicapai sebesar 58,39%. Berdasarkan data diatas disimpulkan bahwa animo pemilih dinamis. Sementara pada tingkatan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah diselenggarakan sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2007, 2012 dan 2017. Capaian tertinggi partisipasi pada tahun 2007 sebesar 71,29%, kemudian pada tahun 2012 capaian partisipasi menurun menjadi 57,84%, dan naik kembali pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 64,76%. Sementara pada kontestasi pemilu telah diselenggarakan sebanyak 4 kali pada tahun 2004, 2009, 2014 dan pemilu serentak tahun 2019. Angka fantastis sebesar rata-rata 83% menjadi catatan keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Jika melihat partisipasi pemilih pilkada, justru pilkada tahun 2020 di tengah pandemi covid-19 mengalami kenaikan dan terpenuhinya target sebesar 77,5 %.

Partisipasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020 merupakan tertinggi dalam konteks penyelenggaraan pilkada terlebih diselenggarakan di masa pandemi covid-19. Terdapat prediksi rendahnya partisipasi pemilih pada tahun 2020 yaitu pilkada di masa pandemi covid-19 dimana adanya penyebaran covid-19 yang masih tinggi bahkan calon Bupati Bangka Tengah Almarhum Ibnu Saleh meninggal dunia dengan status terpapar covid-19, tentu hal ini menjadi ancaman bagi penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Bangka Tengah berupa partisipasi pemilih. Ditambah lagi pada bulan Desember, curah hujan sangat tinggi ditambah lagi Kabupaten Bangka Tengah merupakan daerah pesisir laut sehingga gangguan akan angin berdampak pada penyelenggaraan pemungutan suara. Secara pilkada memerlukan peran aktif dari

masyarakat salah satunya datang ke TPS akan tetapi pandemi covid-19 mengharuskan adanya pembatasan kegiatan guna menekan penyebaran virus covid-19 (Febriansyah, 2020). Permasalahan yang dikhawatirkan tentu tidak terjadi, terbukti dengan suksesnya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil bupati Bangka Tengah berjalan aman, lancar dan sukses dengan capaian partisipasi pemilih sebesar 77,85 % dan tidak terjadinya cluster penyebaran covid-19 di TPS seperti yang ditakutkan oleh semua pihak.

Berdasarkan permasalahan diatas maka dirumuskan dapat dirumuskan beberapa permasalahan berikut ini:

1. Mengapa partisipasi pemilih dimasa pandemi covid-19 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 meningkat?
2. Bagaimana peran KPU Kabupaten Bangka Tengah dalam peningkatan partisipasi pemilih di masa pandemi covid-19 ?

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2017:35) pendekatan deskriptif merupakan penelitian untuk mengetahui keadaan variabel mandiri baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makan lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Dengan pemanfaatan teori sebagai panduan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan selain itu landasan teori dimanfaatkan untuk latar belakang penelitian dan bahan pembahasan penelitian.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini berupa data kualitatif berupa kata, kalimat dan gambar sebagai bentuk informasi untuk menggambarkan permasalahan dan pembahasan. Sumber data (Arikunto, 2013:172) berupa data primer merupakan data diperoleh dari sumber data yang langsung memberikan pada saat pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait atau informan sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui metode observasi dari dokumen atau laporan sebagai objek penelitian. Metode pengumpulan data melalui penelitian langsung seperti dokumentasi, pengamatan, dan wawancara serta dengan studi pustaka melalui pembelajaran riset-riset yang berhubungan dengan penelitian. Informan dipilih berdasarkan *purposive sampling* berdasarkan sampel sumber data pertimbangan informan mengetahui tentang apa yang diteliti, informan terdiri dari penyelenggara pemilu, peserta pemilihan, pemerintahan daerah, pemilih dan pihak kepolisian.

Teknik analisis data merupakan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi melali pengorganisasian ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain (Sugiyono, 2017:244).

Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung telah diselenggarakan sejak tahun 2005 yang berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Walaupun tidak ditegaskan dipilih secara langsung akan tetapi dikarenakan kepala daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui pemilihan umum secara

langsung. Penyelenggaraan pilkada secara langsung tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut 1). Pilkada sebagai wujud kedaulatan rakyat yang memiliki hak politik dan diakui oleh negara; 2). Pilkada adalah proses pendidikan politik bagi masyarakat bagaimana memilih pemimpin yang baik; 3). Pilkada sebagai sarana membangun ikatan emosional antara kepala daerah dengan masyarakat; dan 4). Pilkada langsung juga memberikan efek ekonomi bagi daerah karena proses pilkada yang dilaksanakan melibatkan massa yang banyak sehingga membutuhkan logistik khusus. (Asrinaldi, 2020:17-18)

Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 (*Coronavirus Disease*) yang menyerang sejumlah negara dunia termasuk Indonesia. Peningkatan dari hari kehari jumlah pasien terinfeksi virus Covid-19 sudah sulit dikendalikan diperlukannya suatu perencanaan yang jelas dan lugas dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini. *Coronavirus* sendiri merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *ordo Nidovirales* (Rohim, Yunus & Rezki, 2020). Virus ini dapat menyerang hewan dan juga manusia dan pada manusia gejalanya berupa infeksi yang serupa dengan penyakit SARS dan MERS, hanya saja Covid-19 bersifat lebih masif perkembangannya. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terdampak wabah yang satu ini. Oleh karena itu, perlu tindakan pemerintah dan kesadaran penuh dari masyarakat agar angka penyebaran virus ini dapat ditekan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Riska 2020), Pemerintah Indonesia masih hanya melakukan penanganan berupa pembatasan sosial saja (*social distancing*). Dalam kajian (Febriansyah, 2020:263) menjabarkan tentang bagaimana pemerintah mempercepat penanggulangan covid-19 dan penyebaran virus covid-19, Kebijakan pemerintah melalui kebijakan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 yang mengatur status kedaruratan kesehatan masyarakat dan diperbaharui dengan keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan bencana non alam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional. Penyebaran covid-19 menurut WHO (*World Health Organization*) melalui *droplets* atau percikan air yang keluar saat batuk, bersin, berbicara dan bernafas. Dengan demikian perlu adanya penerapan protokol kesehatan dengan 3 M (Mencuci tangan dengan air sabun, memakai masker dan memakai masker).

Pilkada dan Covid-19

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di masa pandemi *Coronavirus disease 2019 covid-19* merupakan tantangan terbesar agar jangan sampai penyelenggaraan pilkada menjadi klaster penyebaran covid-19 seperti di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain melayani pemilih dalam hak pilih, KPU juga dituntut untuk melayani pencegahan penularan covid-19 yaitu penerapan protokol kesehatan (prokes) bagi pemilih dan juga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPU telah menetapkan 12 perlengkapan protokol kesehatan di TPS yaitu tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, sarung tangan plastik untuk pemilih, sarung tangan medis untuk KPPS, masker, tempat sampah, *face shield*, alat pengukur suhu, *desinfektan*, tinta tetes, baju hazmat dan ruang khusus bagi pemilih yang bersuhu di atas 37,5 ° celsius. (KPU, 2020). Penerapan protokol kesehatan bukan hanya pada penyelenggaraan pilkada saja. Karena setiap aktivitas di masa pandemi covid-19 ini semua aktivitas dan tatanan kehidupan mengalami perubahan atau bisa disebut dengan istilah *new normal*. *New normal* merupakan tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19 akan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Beradaptasi dengan COVID-19 bertujuan untuk menjaga produktivitas masyarakat di tengah pandemi covid-19 Hal ini disebabkan Virus Covid-19 ini merupakan virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-COV-2) menyerang pada sistem pernapasan.

Strategi dalam peningkatan partisipasi pemilih

Menurut Salusu (2015:71) strategi merupakan sebagai langkah untuk mencapai suatu tujuan yang dilaksanakan baik oleh perseorangan atau kelembagaan dengan menggunakan langkah-langkah berupa penentuan target dan sasaran ke depan menggunakan rangkaian aksi/tindakan dan penyediaan sumber daya yang disesuaikan dengan target capaian yang direncanakan. Tentu KPU Kabupaten Bangka Tengah memiliki rencana dan target dalam peningkatan partisipasi masyarakat. KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah tetap berusaha dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih dengan tantangan di masa pandemik covid-19. Strategi untuk mendongkrak minat pemilih dalam yaitu 1). Menyusun strategi komunikasi dan teknis guna mendorong serta memberikan kemudahan pelayanan pemberian suara, 2). Memaksimalkan sosialisasi secara *daring* dengan *platform* berbagai bentuk media sosial, dan 3). Memberikan insentif dalam penyelenggaraan pemilihan demi menjamin kesehatan masyarakat. (Samsul, 2020)

Partisipasi masyarakat dan Sosialisasi serta pendidikan pemilih

Dalam kajian Hertanto (2020:120) menjelaskan tentang Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan. Tentu perlu adanya jaminan partisipasi masyarakat juga meliputi: a) mendapatkan akses informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pilkada; b) peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; c) peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilihan; d) pelaksanaan hak politik secara luber, jurdil, sehat dan selamat; e) sosialisasi dan fasilitasi protokol kesehatan dan keselamatan untuk pencegahan Covid-19 selama proses pilkada. Penyelenggaraan pilkada perlu adanya campur tangan partisipasi masyarakat pada keadaan normal dengan kesepuluh kegiatan (Surbakti 2011) yaitu 1). Kerjasama KPU untuk kegiatan sosialisasi, 2). Pelaksanaan pendidikan pemilih, 3). Keterlibatan anggota parpol dalam pengurusan pencalonan, 4). Partisipasi pemilih dalam pemberian suara, 5). Penyebaran informasi pilkada melalui media massa, 6). Dukungan aktif peserta pemilih atau calon, 7). Tawaran keberatan atas kebijakan peserta atau penyelenggara, 8). Penyampaian aduan, 9). Survey kepuasan, dan 10). Pelaksanaan hitung cepat. Selain itu guna mendorong partisipasi pemilih di masa pandemi covid-19 dalam kajian (Samsul, 2020) yaitu komunikasi/teknis, *online* dan insentif bagi pemilih.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

KPU Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan pemilihan pada tahun 2020 di tengah pandemi bersamaan dengan Kabupaten Bangka Barat, Belitung Timur dan Bangka Selatan. Salah satu ancaman selain penyebaran covid-19 yaitu rendahnya partisipasi pemilih. Anggapan tersebut menjadi permasalahan di mana pada masa normal saja partisipasi pemilih di Kabupaten Bangka Tengah memenuhi target yang telah ditetapkan oleh KPU sebesar 77,5%. Berdasarkan penyelenggaraan pilkada pada tahun 2015 kemarin, partisipasi pemilih berada di angka 64,63%. Dengan angka partisipasi belum memenuhi target menjadi permasalahan jika di masa normal saja angka partisipasi tidak terpenuhi. Akan tetapi anggapan tersebut dibantahkan dengan faktanya partisipasi pemilih di masa pandemi covid-19 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah sebesar 77,85 % dan telah terpenuhi target yang telah ditetapkan oleh KPU. Seperti diketahui jika pilkada merupakan kegiatan yang memerlukan peran aktif seperti datang ke TPS akan tetapi pandemi covid-19 mengharuskan pembatasan kegiatan demi pencegahan penularan virus, dengan demikian adanya pengaruh yang signifikan antara pilkada dan pandemi covid-19.

Pada penyelenggaraan pemilihan peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Bangka Tengah tahun 2020 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 berdasarkan nomor urut pengundian

Nomor Urut	Nama Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020	Partai politik atau gabungan partai politik pengusung	Keterangan
1	Ibnu Saleh dan Herry Erfian	Partai Nasional Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera	Berhalangan tetap calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah atas nama Dr. Ir. H. Ibnu Saleh, MM dinyatakan berhalangan tetap karena meninggal dunia pada hari minggu tanggal 4 Oktober 2020 pukul 03:17 WIB di Rumah Sakit Bakti Timah Kota Pangkalpinang
2.	Didit Sri Gus Jaya dan Korari Suwondo	Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat	-

Sumber : Febriansyah (2020,278)

Berdasarkan keputusan Pleno Nomor 078/PL.02-2-BA/1904/KPU-Kab/X/2020. KPU Kabupaten Bangka Tengah menerima pengajuan calon pengganti pemilihan bupati dan wakil bupati Bangka Tengah tahun 2020 selama 7 hari yaitu 4 s.d 10 Oktober 2020. Pada hari Sabtu 10 Oktober 2020, KPU Kabupaten Bangka Tengah menerimapendaftaran calon Bupati Bangka Tengah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020 yaitu dengan calon pengganti Algafray Rahman.

Hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel. 3. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah 2020

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Algafray Rahman, ST dan Herry Erfian, ST	54.456
2.	Didit Sri Gusjaya, SH., M.H dan H. Korari Suwondo, SH	44.080

Sumber : KPU Kabupaten Bangka Tengah, 2020

B. Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19

KPU RI melalui siaran pers pada tanggal 7 Januari 2021 mengumumkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan 2020 mencapai 76,09 tentu hal ini sangat lebih baik jika dibandingkan pada pemilihan tahun 2015 dengan capaian 69,06%. Peningkatan yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah pada tahun 2020 merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan dengan capaian sebesar 77,85% jika dibandingkan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah pada tahun 2015 hanya mencapai 64,63%, terutama di masa pandemi covid-19 ketika semua aktivitas dibatasi demi pencegahan penularan covid-19. Selain itu juga penyelenggaraan pada bulan Desember 2020 di mana curah hujan yang cukup tinggi dan Kabupaten Bangka Tengah merupakan berada di daerah pesisir pantai.

KPU melakukan penghitungan tingkat partisipasi pemilih dengan cara hasil penghitungan formulir D.Hasil – KWK, seluruh pengguna hak pilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dibagi jumlah pemilih dari DPT ditambah DPTb dikali 100 persen. Berikut ini rincian perolehan penghitungan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah pada tahun 2020. Sementara untuk rincian capaian partisipasi pemilih per-kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut capaian tertinggi berada di kecamatan Koba, Sungai Selan dan Namang dengan capaian rata-rata 80,56%, sementara urutan selanjutnya berada di kecamatan Lubuk Besar dengan capaian sebesar 79,78% dan disusul oleh Kecamatan Simpang Katis dan urutan terakhir berada di Kecamatan Pangkalan Baru dengan capaian sebesar 72,20%. (KPU Kabupaten Bangka Tengah).

Peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah pada tahun 2020 tentu disebabkan oleh beberapa penyebabnya. Walaupun penyelenggaraan di tengah pandemi covid-19 dimana belum terkendalinya dengan masih ada peningkatan jumlah masyarakat terpapar covid-19 di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 6.317 kasus, 23 kasus baru, 624 kasus aktif, sebanyak 5.526 dinyatakan sembuh dan 167 kasus meninggal dunia. Serta dengan curah hujan yang cukup tinggi pada bulan Desember 2020.(bangkatengahkab.go.id)

Peningkatan partisipasi pemilih harus memberikan jaminan partisipasi masyarakat tentu mengapa partisipasi pemilih peningkatan pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah pada tahun 2020 berdasarkan hasil temuan di lapangan disebabkan oleh :

1. Kebiasaan dalam *new normal* dan penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

Semenjak kasus covid-19 mulai terdeteksi pada tanggal 02 Maret 2020, masuknya virus covid-19 disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto, kasus covid-19 dimulai dengan 2 warga Depok menjadi pasien pertama setelah kontak erat dengan warga negara Jepang yang positif saat diperiksa di Malaysia (Nur, health.detik.com. 2021). Hingga pada saatnya pemerintah menetapkan covid-19 sebagai pandemi dan dinyatakan sebagai bencana non alam melalui keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *corona virus disease 2020* (covid-19 sebagai bencana nasional tetanggal 13 April 2020. Tentu masyarakat sangat takut akan tertular covid-19 yang dapat menyebabkan terinfeksi bahkan meninggal dunia. Untuk mengantisipasi menerapkan pembatasan kegiatan dan adanya ajakan *stay at home* serta tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan mendesak.

Akan tetapi pandemi belum menunjukkan pemberhentiannya, pemerintah kemudian menerapkan istilah *newnormal* dan penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam beraktivitas sehari-hari demi memulihkan perekonomian akibat pandemi covid-19. Dalam kajian (Muhyiddin 2020)Pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Pada 28 Mei 2020 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada 28 Mei 2020 dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menyampaikan Protokol Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 menuju Normal Baru (*new normal*), hidup berdampingan dengan Covid-19. Pemerintah menyebutnya 'Penyesuaian PSBB', dimana sedang disusun kriteria dan langkah-langkahnya, serta menentukan bagaimana Penyesuaian PSBB diberlakukan. Monoarfa menjelaskan dalam penelitian

“Berdasarkan berbagai studi tentang pengalaman berbagai negara yang berhasil menangani pandemi Covid-19, ada beberapa prasyarat agar masyarakat dapat produktif tetapi keamanan dari bahaya Covid-19 tetap terjamin, yaitu: 1) penggunaan data dan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk Penyesuaian PSBB; 2) Penyesuaian PSBB dilakukan secara bertahap dan memperhatikan zona;3) Penerapan

protokol kesehatan yang ketat; dan4) Review pelaksanaan Penyesuaian PSBB yang dimungkinkan adanya pemberlakuan kembali PSBB dengan efek jera yang diberlakukan secara ketat apabila masyarakat tidak disiplin.“

Seperti informasi yang didapat dari seorang warga bernama Rudiansyah terdaftar sebagai pemilih di desa sarang mandi :

“Penyelenggaraan pemilihan dimasa pandemi covid-19 sangat baik, tertib dan teroganisir”

Penyelenggaraan pemilihan sempat ditunda melalui keputusan KPU RI Nomor 285/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 dan dilanjutkan kembali pada senin,15 Juni 2020 tahapan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan,program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil wali kota yang diundangkan pada 12 Juni 2020. Artinya ada sekitar 3 bulan KPU menunda tahapan, begitu juga dengan hari pemungutan suara pada tanggal 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020, dengan demikian masyarakat telah membiasakan diri pada penerapan *new normal* dan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pada pemungutan suara masyarakat sudah terbiasa dengan penerapan protokol kesehatan dan adaptasi kehidupan baru yang diterapkan oleh KPU di TPS seperti mencuci tangan, memakai masker, tidak berjabat tangan, menjaga jarak dengan membuat jadwal khusus bagi pemilih datang ke TPS agar tidak terjadi kerumunan pemilih.

2. Sosok calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020.

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah terdiri dari 2 pasangan calon yaitu pasangan nomor urut 1 yaitu Ibnu Saleh dengan Herry Erfian dan nomor urut 2 pasangan Didit Sri Gusjaya dengan Korari Suwondo. Pasangan nomor urut 1 kemudian mengalami penggantian semenjak Ibnu Saleh berhalangan tetap dinyatakan meninggal dunia. Posisi calon Bupati pasangan nomor urut 1 digantikan oleh Algafray Rahman. Sosok para calon sangat mempengaruhi para pemilih untuk datang ke TPS seperti dalam kajian(Meliam 2020) tentu pada sosok para calon bupati dan wakil bupati bangka tengah tahun 2020 menjadi idaman dan idola bagi pemilih karena memiliki reputasi yang baik, merupakan pejabat seperti Algafray Rahman merupakan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah dan merupakan kader dari Partai Golongan Karya. Herry Erfian merupakan kader dari partai Nasional Demokrat dan pernah menjabat sebagai anggota DPD tahun 2014-2019. Sementara sosok Didit Sri Gusjaya merupakan ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Korari Suwondo merupakan anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah dan merupakan kader dari PDI-Perjuangan bersama Didit Sri Gusjaya.

3. Penerapan Protokol kesehatan dalam setiap tahapan pemilihan

KPU Kabupaten Bangka Tengah menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk setiap tahapan. Seperti hasil wawancara dengan Rusdi Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah :

“Dengan menerapkan prokes, KPU Kabupaten Bangka Tengah memaksimalkan kegiatan sosialisasi terbatas, bimtek terbatas, pendaftaran paslon terbatas, debat paslon terbatas dengan menerapkan prokes serta selalu menjaga jarak”.

Penerapan telah diterapkan dari awal tahapan pilkada dimasa pandemi sehingga pada tahapan pemungutan suara 9 Desember 2020 Penerapan protokol kesehatan sangat diperlukan dalam mencegah penularan covid-19. KPU dalam setiap tahapan menyelenggarakan tahapan dengan penerapan protokol kesehatan. Penerapan tersebut sangat krusial pada hari pemungutan suara

pada tanggal 9 Desember 2020. Dalam menetapkan penerapan protokol kesehatan agar tidak terjadi cluster baru di TPS penyebaran covid-19 sebanyak 12 protokol kesehatan yaitu

“ 1). Menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun di TPS; 2). Penyiapan *Hand sanitizer* ; 3). Persiapan sarung tangan plastik bagi pemilih, 4). Penyiapan sarung tangan medis untuk KPPS; 5). Penyiapan masker kepada pemilih dan penyelenggara; 6). Penyediaan tempat sampah untuk menyimpan semua bekas pakai selama pencoblosan; 7). Penutup wajah (*face shield*) bagi penyelenggara; 8). Pengecekan suhu tubuh kepada pemilih; 9). Penyemprotan disinfektan di TPS; 10). Penyediaan tinta tetes untuk pemilih; 11). Penggunaan baju hazmat dan alat pelindung diri (APD) bagi petugas jika ada pemilih yang suhu tubuh di atas 37,5 derajat celcius; dan 12). Penyediaan ruang khusus bagi pemilih yang suhu tubuh di atas 37,5 derajat celcius. “ (KPU, 2020)

Penerapan protokol kesehatan dan *new normal* dilakukan setiap tahapan pemilih. Penerapan ini mulai dari sosialisasi, kunjungan dan koordinasi. Dengan penerapan ini tentu memberikan keyakinan bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Tentu perlu adanya melindungi hak pemilih dengan melayani hak pemilih akan tetapi di masa pandemi ini perlu adanya melindungi pemilih dari terpapar covid-19 agar pemilih memiliki kewajiban untuk tidak menularkan penyakit dan memiliki hak untuk tidak tertular penyakit. Penyakit itu berupa penyebaran covid-19.

4. Tercapainya informasi pemilihan di seluruh Kabupaten Bangka Tengah

Informasi sangat diperlukan untuk penyampaian berita terutama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020 informasi seperti tertunda tahapan pemilihan pada hari pemungutan suara yang dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2021. Tentu informasi ini harus disampaikan, baik secara elektronik, *online* atau media massa bahkan melalui informasi di tempat strategi. Pemilih mengetahui kapan hari pemungutan suara, sehingga tidak ada alasan bagi penilih tidak datang ke TPS karena tidak atau belum tahu hari pemungutan suara. Penyampaian informasi seputaran pilkada telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah seperti informasi dari wawancara ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah, Rusdi :

“Dengan metode dan inovasi sosialisasi serta pemeran media, partisipasi pemilih tidak mempengaruhi target partisipasi, terbukti target partisipasi pemilih melaupai target nasional sebesar 77,85%”.

Informasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah dilanjutkan kembali terjadi pada saat pencocokan dan penelitian atau disebut coklit. Tahapan coklit ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), disamping itu juga pemilih mengetahui jika tahapan pemilihan dilanjutkan. Tahapan coklit sendiri telah dilaksanakan pada tanggal 15 juli hingga 13 Agustus 2020 dimana pada tahapan ini masyarakat sudah mulai membiasakan hidup dengan tatanan baru dan protokol kesehatan.

Selain itu juga penyampaian visi misi partai politik di masa pandemi menjadi tantangan bagi peserta, s seperti yang didapatkan dari informan LO (*Liaison Officer*) Partai PDI-Perjuangan an. Yurista.

“Sudah efektif kampanye dimasa pandemi covid-19 oleh parpol dan paslon kepada masyarakat”. Dengan demikian peran partai politik mendukung dalam hal partisipasi pemilih karena pemilih akan datang ke TPS jika mengetahui isi dari kampanye partai politik.

Dari hal pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah seperti dinyatakan oleh Anggota Bawaslu Bangka Tengah Wahyu Tri Buwono sehubungan dengan penundaan tahapan:

“KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menyosialisasikan melalui media masa untuk masyarakat juga penyampaian surat edaran kepada peserta pemilih dan stakeholder terkait”.

Informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah telah diterima oleh semua lapisan masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan partisipasi pemilih.

C. Strategi KPU Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah memiliki peran yang penting dalam peningkatan partisipasi pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah dengan 1). Menyusun strategi komunikasi sebagai wadah sosialisasi dan teknis guna mendorong serta memberikan kemudahan pelayanan pemberian suara, 2). Memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan *platform* berbagai bentuk media sosial, dan 3). Memberikan insentif dalam penyelenggaraan pemilihan demi menjamin kesehatan masyarakat. Dalam hal ini peran KPU Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut : 1). Menyusun strategi komunikasi sebagai wadah sosialisasi dan teknis guna mendorong serta memberikan kemudahan pelayanan pemberian suara; 2). Memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan *platform* berbagai bentuk media sosial; dan 3). Memberikan insentif dalam penyelenggaraan pemilihan demi menjamin kesehatan masyarakat.

1. Menyusun strategi komunikasi sebagai wadah sosialisasi dan teknis guna mendorong serta memberikan kemudahan pelayanan pemberian suara.

Melalui strategi komunikasi sebagai wadah sosialisasi yang telah diterapkan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah dengan melakukan sosialisasi dengan istilah “*KPU GO TO KAMPUNG*” dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan melakukan beberapa sayembara seperti *selfie* dan *groofied* TPS dan kreasi TPS terbaik.

Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, KPU Kabupaten Bangka Tengah melakukan sosialisasi ke kampung-kampung khususnya dusun terpencil. Berikut ini rincian kegiatan sosialisasi tersebut :

Tabel 4. Sosialisasi *Door to Door* KPU GO TO KAMPUNG

No	Hari, Tanggal	Tempat Tujuan	Keterangan
1.	Selasa, 03 November 2020	Dusun Pinang Seribu Desa Kerakas Desa Kerantai	Sosialisasi <i>door to door</i> Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020 kepada masyarakat dusun terpencil.
2.	Rabu, 04 November 2020	Dusun Tanjung Berikat Dusun Panang Dusun Bukit Pilar	Sosialisasi <i>door to door</i> Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020 kepada masyarakat dusun terpencil.
3.	Kamis, 05 November 2020	Dusun Air Nona Dusun C2 Dusun Kedimpel	Sosialisasi <i>door to door</i> Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020 kepada masyarakat dusun terpencil.
4.	Jum'at, 06 November 2020	Dusun Pangkal Raya Desa Munggu	Sosialisasi <i>door to door</i> Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020 kepada masyarakat dusun terpencil.
5.	Sabtu, 07 November 2020	Dusun Semujur	Sosialisasi <i>door to door</i> Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020 kepada masyarakat dusun terpencil.
6.	Minggu, 15 November 2020	Dusun Pulau Nangka Desa Tanjung Pura	Sosialisasi <i>door to door</i> Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020 kepada masyarakat dusun terpencil.

Sumber : KPU Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah, Rusdi :

“Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi pemilihan maka kami wujudkan dengan sosialisasi go to kampung dan berbagai lomba kreasi”.

Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat jika penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati bangka tengah dilanjutkan, sebelumnya hari pemungutan suara tanggal 23 september 2020 menjadi 09 Desember 2020. Selain itu juga masyarakat tidak perlu khawatir jika pemungutan suara di TPS aman karena menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Penyampaian informasi terkait penundaan hari pemungutan suara, membagikan brosur dan alat pelindung diri seperti masker, *handsanitizer* kepada masyarakat yang ditemui. Dalam kegiatan ini juga tidak jarang KPU Kabupaten Bangka Tengah melakukan diskusi singkat kepada masyarakat yang ditemui dengan tujuan pentingnya menggunakan hak suara agar jangan “golput” dan tidak perlu khawatir datang ke TPS karena KPU telah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat demi melindungi para pemilih dan petugas di TPS agar tidak terpapar covid-19.

Informasi tentang penundaan hari pemungutan suara telah disosialisasikan agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui terkait informasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah. KPU Kabupaten Bangka Tengah menyampaikan informasi tentang penundaan seperti dijelaskan oleh informan an. Hendra Sinaga Anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah:

“Dengan penundaan tahapan KPU memiliki waktu untuk sosialisasi dan dapat mengumpulkan strategi serta tetap melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait informasi pilkada seperti penundaan jadwal melalui media cetak, online dan medsos.”

Penyelenggaraan pemilihan sempat ditunda melalui keputusan KPU RI Nomor 285/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 dan dilanjutkan kembali pada senin,15 Juni 2020 tahapan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota yang diundangkan pada 12 Juni 2020. Artinya ada sekitar 3 bulan KPU menunda tahapan. Bagi KPU Kabupaten Bangka Tengah memiliki waktu yang banyak untuk sosialisasi terutama dalam sosialisasi pentingnya memilih dan memilih di TPS aman dan nyaman karena telah menerapkan protokol kesehatan.

KPU Kabupaten Bangka Tengah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan peserta pemilih, penyelenggara yaitu Bawaslu dan *stakeholder* terkait dalam hal peningkatan partisipasi pemilih melalui sosialisasi. Seperti diungkapkan oleh pihak kepolisian an. Dicky Susanto dalam mendukung suksesnya pemilihan.

“ Polri mendirikan posko di KPU dan Bawaslu pada saat pelaksanaan pilbup,dan melakukan pengamanan, pengawalan dan patroli berkaitan dengan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah”

Dengan dukungan *stakeholder* dalam pelaksanaan pemilihan tentu mendukung peningkatan partisipasi pemilih. Jika ada kendala di lapangan tentu akan mengganggu proses jalannya tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati bangka tengah tahun 2020 terutama di masa pandemi covid-19.

Sosialisasi strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah untuk menarik minat para pemilih agar menggunakan hak suaranya adalah dengan mengadakan sayembara berupa lomba kreasi TPS terbaik dan lomba *selfie* dan *groofie* penggunaan suara di TPS.

Kegiatan ini bertujuan untuk menarik masyarakat agar menggunakan hak suaranya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020.

Penerapan lomba kreasi TPS terbaik dengan ketentuan sebagai berikut :1. TPS teruik, menarik, indah, 2). Memenuhi standar ukuran PTS; 3). Aksesibilitas TPS; 4). Kebersihan TPS; 5). Mematuhi protokol kesehatan, Hadiah pemenang perkecamatan juara pertama sebesar Rp. 3.000.000,- juara kedua sebesar Rp. 2.000.000,- dan juara ketiga sebesar Rp.1.000.000,-

Tabel 5. Para pemenang lomba kreasi TPS terbaik per-kecamatan

No	Kecamatan	TPS/Desa	Juara
1.	Koba	TPS 009 Desa Nibung	Juara I
		TPS 003 Kelurahan Berok	Juara II
		TPS 004 Kelurahan Padang Mulia	Juara III
2.	Lubuk Besar	TPS 002 Desa Kulur Ilir	Juara I
		TPS 002 Desa Trubus	Juara II
		TPS 008 Desa Lubuk Besar	Juara III
3.	Simpang Katis	TPS 003 Desa Pasir Garam	Juara I
		TPS 007 Desa Sungkap	Juara II
		TPS 001 Desa Celuak	Juara III
4.	Sungai Selan	TPS 002 Desa Sungai Selan Atas	Juara I
		TPS 005 Desa Sungai Selan Atas	Juara II
		TPS 001 Desa Kerakas	Juara III
5.	Namang	TPS 003 Desa Bukit Kijang	Juara I
		TPS 003 Desa Cambai Selatan	Juara II
		TPS 003 Desa Belilik	Juara III
6.	Pangkalan Baru	TPS 005 Desa Padang Baru	Juara I
		TPS 001 Desa Air Mesu Timur	Juara II
		TPS 004 Desa Mangkol	Juara III

Sumber : KPU Kabupaten Bangka Tengah, 2021

Para penyelenggara di tingkat TPS berlomba-lomba dalam kreasi TPS dengan demikian para pemilih sangat tertarik datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Seperti diungkapkan oleh seorang pemilih yang berasal dari Desa Padang baru an. Bapak Martoyo mengatakan :

“Unik sekali TPS yang dibuat, tentu kami sebagai warga sangat tertarik datang ke TPS”.

Berikut salah satu TPS yang memenangkan lomba kreasi TPS terbaik :



Gambar 1. TPS dengan Kreasi Terbaik

Para pemilih diberikan fasilitas pemungutan suara dan juga protokol kesehatan yang ketat serta kenyamanan di TPS dengan berbagai kreasinya. Strategi yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah ini memberikan hasil berupa partisipasi pemilih sangat tinggi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Partisipasi Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah 2020

No.	Kecamatan	Persentase Partisipasi
1.	Koba	80,56%
2.	Lubuk Besar	79,78%
3.	Simpang Katis	76,12%
4.	Sungai Selan	80,14%
5.	Namang	80,23%
6.	Pangkalan Baru	72,20%

Sumber : KPU Kabupaten Bangka Tengah, 2020

2. Memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan platform berbagai bentuk media sosial;

Dimasa pandemi covid-19 ini, KPU Kabupaten Bangka Tengah menerapkan media sosial sebagai tumpuan dalam sosialisasi. Seperti pernyataan dari Anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah, Apit

“KPU Kabupaten Bangka Tengah menyampaikan setiap tahapan kepada peserta pemilih, stakeholder dan sosialisasi lebih maksimal untuk menunjang partisipasi pemilih.”

Media sosialisasi secara daring sangat dimanfaatkan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah karena di tengah pandemi covid-19, setiap kegiatan dibatasi, salah satu kegiatan yang sering disampaikan seperti informasi di facebook pada setiap tahapan dan melakukan *streaming live* agar pemilih dapat berinteraksi secara virtual contohnya pada debat publik yang telah diselenggarakan sebanyak 2 kali dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Akan tetapi KPU Kabupaten Bangka Tengah tetap melakukan sosialisasi secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, hal ini dilakukan karena tidak semua masyarakat menikmati layanan internet, seperti di daerah-daerah terpencil KPU Kabupaten

Bangka Tengah, selain itu juga dengan tetap melakukan sosialisasi melalui poster, dengan tujuan agar pemilih mengetahui informasi seputaran penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020. Total anggaran sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis sebesar Rp. 814.988.000. dengan anggaran tersebut KPU Kabupaten Bangka Tengah telah sukses dalam hal sosialisasi pemilih.

Dengan memanfaatkan berbagai fitur di media sosial, KPU Kabupaten Bangka Tengah memberikan informasi seputaran kegiatan dan tahapan pemilihan. Masyarakat dapat mengetahui seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah. Informasi yang sangat penting yaitu masyarakat tidak perlu khawatir untuk datang ke TPS karena KPU telah memberikan fasilitas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat di TPS.

Selain memanfaatkan media sosial, KPU Kabupaten Bangka Tengah bersama Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan *road show* seperti di radio. Keberadaan radio masih menjadi idaman para masyarakat di tengah maraknya penggunaan media sosial. Tentu KPU Kabupaten Bangka Tengah memberikan informasi kepada pemilih dengan media radio. Bersama Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, masyarakat dapat mengetahui informasi seputaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah. Berbagai informasi yang disampaikan adalah pentingnya menggunakan hak suara di TPS dan penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan demikian pemilih tidak perlu khawatir menggunakan hak suaranya di TPS.

3. Memberikan insentif dalam penyelenggaraan pemilihan demi menjamin kesehatan masyarakat.

KPU Kabupaten Bangka Tengah memastikan setiap pegawai termasuk badan *ad hoc* tidak terpapar covid-19. Seperti yang dijelaskan oleh Rusdi Anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah.

“KPU Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan kegiatan rapid tes bagi seluruh pegawai termasuk PPK, PPS, PPDP dan KPPS serta mematuhi protokol kesehatan”

Tujuannya agar tidak menyebarkan virus covid-19 dan sebagai agen atau contoh bagi masyarakat jika KPU Kabupaten Bangka Tengah menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

KPU Kabupaten Bangka Tengah telah memfasilitasi protokol kesehatan berupa pengadaan APD seperti yang telah ditetapkan oleh KPU tentang 12 protokol kesehatan di TPS. Total ada ada sebanyak Rp. 255.558.398 anggaran untuk pengadaan APD di 383 TPS. Artinya di setiap TPS mendapatkan 12 jenis protokol kesehatan agar pemilih nyaman dan aman serta tidak perlu khawatir ke TPS untuk menggunakan hak suaranya.

Jaminan yang telah ditetapkan oleh KPU berupa 12 protokol kesehatan yang ketat telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah, demi memberikan jaminan kesehatan masyarakat di TPS. KPU Kabupaten Bangka Tengah menyelenggarakan simulasi pemungutan suara di TPS pada 21 November 2020 dengan penerapan protokol kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan bagaimana penerapan protokol kesehatan yang ketat demi menjamin kesehatan masyarakat. Dengan harapan tidak adanya cluster penyebaran covid-19 di TPS.

Sebelum hari pemungutan suara, KPU Kabupaten Bangka Tengah mempersiapkan APD (Alat Pelindung Diri) dan logistik. Pendistribusian berjalan lancar namun pada malam harinya terdapat TPS yang mengalami kerusakan akibat cuaca dan angin kencang. Kemudian Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Robianto menghubungi KPU agar pembangunan TPS tegak kembali.

“Kami mendapatkan info di lapangan adanya TPS yang rusak di daerah selan, maka kami hubungi pihak KPU agar TPS kembali tegak supaya besok pemilih dapat menggunakan hak suaranya”.

Sinergi antara KPU dan Bawaslu dalam melindungi pemilih penggunaan hak suara sudah terjalin harmonis, peran Bawaslu dalam pengawasan sangat membantu KPU dalam proses pemungutan suara di TPS. Tentu dapat dibayangkan jika ada TPS rusak di pagi hari maka tanggapan masyarakat akan

C. SIMPULAN

Pencapaian partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 sebesar 77,85% bukan hanya peran KPU semata. Banyak pihak telah mendukung suksesnya pemilihan seperti dari peserta pemilih merupakan kader partai politik tentu koalisi mensosialisasikan untuk memilih para calon. Dukungan Bawaslu juga sangat penting seperti pada pengawasan secara elektoral dan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu Pemerintah Daerah sangat membantu KPU dalam suksesnya pemilihan seperti dukungan anggaran, membantu dalam hal sosialisasi setiap tahapan, pemutakhiran data pemilih sebagai indikator, penerapan protokol kesehatan, sosialisasi. Pihak keamanan mendukung agar pemilihan berjalan aman dan lancar, karena suksesnya pemilihan bukan hanya dilihat dari partisipasi yang tinggi tetapi pemilihan berjalan tanpa ada tindakan anarkis juga termasuk pemilihan yang sukses.

KPU Kabupaten Bangka Tengah tetap meningkatkan sinergi dengan *stakeholder* terkait seperti Bawaslu, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan TNI, serta tetap melayani pemilih untuk melindungi hak pemilih demi peningkatan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 nanti. Selain itu juga KPU Kabupaten Bangka Tengah tetap menyapa masyarakat dengan berbagai kegiatan sosialisasi dan sayembara untuk menarik minat masyarakat menggunakan hak suaranya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/buku

- Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asrinaldi. 2020. *Sisi Lain Pilkada Memahami Kontestasi Politik Dari Sudut Praktis*. Padang: CV. Rumahkayu Pustaka Utama.
- Febriansyah, Ricky. 2020. *Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19: Ancaman Dan Perlindungan Keselamatan Bagi Penyelenggara, Peserta Dan Pemilih Di Kabupaten Bangka Tengah*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua. 2020. “Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19.” *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 4 (1): 121–28. doi: 10.15408/adalah.v4i1.15503.
- Hertanto. 2020. *Problematisasi Dan Tantangan Partisipasi Pada Pilkada Lampung 2020 Di Masa Pandemi COVID-19. Pilkada Di Masa Pandemi: Tantangan Dan Harapan Dari Berbagai Perspektif*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Khalyubi, Widhan. Abdi, A, Azka. Edward T, F, M. 2020. “Manajemen Krisis Pendistribusian Logistik Dalam Pilkada Kota Depok Di Tengah Covid-19.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2 (1): 1–17.
- Meliam, W. 2020. “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepada Daerah Dan Penerapan Strategi Dan Menyerah Untuk Memenangkan Persaingan.” *Jurnal Citizen Educaion* 7 (1): 283.

- http://www.nostarch.com/javascriptforkids%0Ahttp://www.investopedia.com/terms/i/in_specie.asp%0Ahttp://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOL.
- Mokhammad Samsul Arif. 2020. “Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2 (1): 18–40. <https://doi.org/10.46874/tpk.v2i1.197>.
- Muhyiddin. 2020. “Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia.” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4 (2): 240–52. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>.
- Riska, Arum. 2020. “Pembatasan Sosial Di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau Dari Sudut Pandang Politik.” *LawArXiv*. <https://doi.org/10.31228/Osf.Io/G8ny3>.
- Ristyawati, Aprista. 2020. “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia.” *Crepido* 2 (2): 85–96. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.85-96>.
- Rohim, Yunus, Nur, Reski, Annissa. 2020. “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corono Virus Covid-19.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7 (3): 227–37. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15048>.
- Salusu. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Silalahi, Wilma. 2020. “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2 (1): 41–55. <https://doi.org/10.46874/tpk.v2i1.211>.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2011. “Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum.” In *Seri Buku Demokrasi Elektoral*. Jakarta: Kemitraan Partnership.

Berita online

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5584135/kilas-balik-perjalanan-awal-corona-di-indonesia> Kamis, 27 Mei 2021 13:46 WIB (diakses Rabu, 15 September 2021 pukul 14:22 WIB)

<https://bangkatengahkab.go.id/berita/detail/kominfo/update-informasi-kasus-covid19-di-kabupaten-bangka-tengah-15-september-2021>(diakses Rabu, 15 September 2021 pukul 16:22 WIB)

www.kpu.go.id “12 Hal Baru di TPS Pemilihan Serentak 2020”, 20 Oktober 2020 (diakses diakses Rabu, 15 September 2021 pukul 17:22 WIB)

www.kab-bangkatengah.kpu.go.id

	Journal Of Government and Social Issues (JGSI) Volume 1 Nomor 1 2021: 18-32 https://jgsi.fisip.unila.ac.id/index.php/Jurnal	
---	---	--

ARTICLE



Negosiasi Identitas Budaya Etnis Pendatang Dengan Etnis Lokal Di Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan

Ivan Erlangga¹, Ibrahim² and Ranto³

¹Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

²Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

³Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

How to cite:

Erlangga, I., Ibrahim, & Ranto. (2021). Negosiasi Identitas Budaya Etnis Pendatang Dengan Etnis Lokal Di Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan. *Journal Of Government and Social Issues (JGSI)*, 1(1), 18-32.

Article History

Dikirim: 21 Oktober, 2021;

Diterima: 14 Desember, 2021;

Dipublikasi: 31 Desember, 2021;

Kata Kunci:

Identity negotiation

Immigrant ethnicity

Local ethnicity

ABSTRACT

Pulau Besar is a very pluralistic sub-district. Many ethnic immigrants live from Javanese, Selapan (Palembang), Sunda, Bali, Madura, and others. While the local ethnicity is the Bangka Malay ethnic. The multiculturalism of ethnicity in Pulau Besar make an identity tug or negotiation between ethnic identities. The purpose of this study is to find out how the process and final form of negotiating the cultural identity of immigrants with local ethnicities is in Pulau Besar District, South Bangka Regency. The theory used in this research is the identity negotiation theory of Stella Ting-Toomey with descriptive qualitative research methods and data collection techniques through interviews and documentation. The result of this research is that in the identity negotiation process in Pulau Besar District, they respect, understand, and support each other so as to create harmonization in that difference. In addition, the final form of identity negotiation includes intercultural assimilation, namely assimilation and acculturation.

Keywords:

Etnis Lokal

Etnis Pendatang

Negosiasi Identitas

ABSTRAK

Pulau Besar merupakan sebuah kecamatan yang sangat pluralis. Banyak etnis pendatang yang tinggal mulai dari etnis Jawa, Selapan (Palembang), Sunda, Bali, Madura dan lainnya. Sedangkan etnis lokal yaitu etnis Melayu Bangka. Multikulturalnya etnis di Pulau Besar menjadikan suatu tarik ulur identitas atau negosiasi identitas antar etnis. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana proses dan bentuk akhir dari negosiasi identitas budaya etnis pendatang dengan etnis lokal di Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori negosiasi identitas dari Stella Ting-Toomey dengan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam proses negosiasi identitas di Kecamatan Pulau Besar bersikap saling menghargai, mengerti, dan mendukung hingga menciptakan harmonisasi dalam suatu perbedaan itu. Selain itu, bentuk akhir dari negosiasi identitas meliputi percampuran antar budaya yaitu asimilasi dan akulturasi.

A. PENDAHULUAN

Beragamnya etnis dan budaya di Indonesia terutama pada dalam ruang lingkup wilayah yang saling berdekatan dan berinteraksi satu sama lain, diperlukan suatu negosiasi identitas. Negosiasi identitas merupakan salah satu bentuk komunikasi, diskusi, dan interaksi antar individu dengan orang lain yang kemudian menciptakan suatu identitas individu. Identitas tersebut dibentuk melalui negosiasi individu yang menyatakan, memodifikasi, bahkan menentang identifikasi-identifikasi diri sendiri dan orang lain (Toomey, 1999). Negosiasi identitas sangat diperlukan agar kehidupan sosial masyarakat yang heterogen dapat berjalan secara bersamaan tanpa adanya konflik identitas perbedaan etnis dan budaya.

Menurut Hall dalam Rohmawati (2017) mengklasifikasikan identitas ke dalam tiga konteks. Pertama, identitas pribadi yaitu identitas yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Kedua, identitas hubungan yaitu identitas yang dihasilkan dari hubungan dengan orang lain seperti suami-istri dan guru-murid. Ketiga, identitas komunal yaitu identitas dengan kesamaan yang berskala besar seperti etnis, gender, kewarganegaraan, agama, dan politik. Pada identitas komunal biasanya lebih dihubungkan dengan identitas sosial maupun budaya.

Salah satu provinsi yang kaya akan etnis dan identitas, yaitu Bangka Belitung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, tercatat daerah ini hanya memiliki luas wilayah 16,424,14 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.455,678 jiwa. Walaupun hanya memiliki luas wilayah yang relatif kecil dan jumlah penduduk yang sedikit dibandingkan daerah lain, Bangka Belitung merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan etnis. Banyaknya hasil kekayaan alam tersebut dapat menarik masyarakat luar Bangka Belitung yang berdatangan dan bertempat tinggal di Bangka Belitung untuk mencari pekerjaan. Selain untuk mencari pekerjaan, faktor transmigrasi juga menyebabkan multikulturalismenya masyarakat di Bangka Belitung.

Menurut Sunarto dalam Mutia & Bahrein (2017) ada dua pola utama dalam hubungan antar kelompok. Pertama, pola dominasi kelompok pendatang atas kelompok pribumi (migrant superordination), maksudnya yaitu kelompok pendatang lebih dominan atau mayoritas dibandingkan dengan penduduk pribumi. Kedua, yaitu pola penduduk pribumi lebih mendominasi jumlah penduduk atau mayoritas dibandingkan dengan etnis pendatang.

Salah satu daerah yang mempunyai beragam etnis dan pola dominasi penduduk etnis pendatang yang besar, yaitu Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan. Pulau besar hanya memiliki 5 desa utama, yaitu Batu Betumpang, Suka Jaya, Sumber Jaya Permai, Fajar Indah, dan Panca Tunggal. Terdapat banyak etnis yang mendominasi Kecamatan Pulau Besar, antara lain yaitu etnis asli lokal (Melayu Bangka), Jawa, Madura, Selapan (Sumsel), Bali, dan Sunda. Beragamnya etnis di Pulau Besar dapat dikatakan bahwa Kecamatan Pulau Besar merupakan miniaturnya Indonesia (Indonesia versi kecil).

Berikut merupakan data demografi Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Persentase Etnis Lokal dan Pendatang (jiwa) di Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan

Etnis	Desa Batu Betumpang	Desa Fajar Indah	Desa Panca Tunggal	Desa Sumber Jaya Permai	Desa Suka Jaya	Total	Persentase (%)
Melayu Bangka	2.428	90	47	25	437	3.027	25,6
Jawa	16	1.564	1.055	1.418	-	4.053	44,4
Sunda	-	48	99	94	-	67	6,5

Etnis	Desa BatuBe tumpang g	De sa Fajar Indah	Desa Panca Tunggal	Desa Sumber Jaya Permai	De sa Suka Jaya	To tal	Pe rsent ase (%)
		5				8	
Madura	465	10 6	7	54	-	63 2	4,7
Selapan (Sumsel)	27	96	44	76	70 7	95 0	14, 7
Bali	-	-	140	118	-	25 8	3,3
Tiongh oa	4	-	-	-	16	20	0,2
Etnis lain	6	-	-	15	-	21	0,2
Jumlah	2.94 6	2.3 41	1.392	1.800	1.1 60	9.6 39	10 0

Sumber : Data Kependudukan Kecamatan Pulau Besar, 2020

Menurut John Habba, masyarakat yang mempunyai perbedaan latar belakang kebudayaan, identitas, dan etnis memungkinkan terjadinya konflik ditengah kehidupan sosial masyarakat yang beragam (Adesaputra, Fitria, & Montessorri, 2019). Selain itu, kebijakan pembinaan transmigran yang sentralistik akan berimplikasi pada kuatnya budaya pendatang dan sulitnya perkembangan terhadap budaya lokal. Pusat perhatian yang hanya fokus ke Unit Perkembangan Transmigrasi (UPT), membuat perkembangan penduduk transmigrasi lebih pesat dibandingkan dengan penduduk lokal. Akibatnya, terjadi kecemburuan sosial yang mengakibatkan terjadi konflik antar etnis pendatang dengan etnis lokal (Sarmita, 2014).

Namun, kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Pulau Besar dapat dikatakan harmonis, hal itu dapat dilihat dari hampir tidak adanya konflik karena faktor etnis yang berbeda. Sedikitnya konflik yang disebabkan oleh faktor etnis yang terjadi di Kecamatan Pulau besar juga sangat dipengaruhi oleh proses negosiasi identitas yang terjadi. Selain itu, hal lain yang juga dapat dilihat dari harmonisnya masyarakat Kecamatan Pulau Besar, yaitu dari tidak adanya diskriminasi etnis pendatang oleh etnis lokal maupun sebaliknya ketika dalam konteks pendidikan, politik, dan pemerintahan serta sosial budaya.

Dalam konteks sosial budaya, keberagaman etnis sudah dapat dipastikan bahwa setiap etnis juga mempunyai budaya yang berbeda dengan budaya etnis lainnya. Selain berbeda, budaya juga salah satu ciri khas dan menjadi sebuah identitas dari etnis itu sendiri. Budaya biasanya identik dengan kebiasaan, adat istiadat, norma dan nilai serta bentuk karya seni yang dimiliki oleh setiap etnis. Kebudayaan merupakan sebuah lumbung kearifan lokal yang bisa dijadikan sebuah pedoman dalam upaya merangkul berbagai kepentingan yang ada secara harmonis tanpa adanya pihat-pihak atau budayadari etnis-etnis yang dikorbankan (Selvia, Holilulloh, & Adha, 2013). Begitu pula dengan etnis Jawa, Sunda, Bali, Madura, Selapan (Sumsel) dan etnis lokal di Kecamatan Pulau Besar, mereka mempunyai identitas tersendiri dari segi budaya yang dimiliki dan merupakan ciri khas dari etnis merekamasing-masing.

Budaya yang dimiliki olehmasing-masing etnis, biasanya dilakukan dan ditampilkan pada acara-acara nasional maupun kedaerahan seperti pada Hari Ulang Tahun Kenegaraan dan Daerah. Pada acara ini masing-masing etnis menampilkan budaya asli mereka, seperti kuda lumping, reog, pencak silat, nganggung, tarian dan lain-lain. Selain pada acara kenegaraan dan daerah, budaya juga sering dilakukan pada peringatan hari-hari besar masing-masing etnis, seperti budaya Ruahan (Lokal), Waisak (Bali) dan Maulid (Madura).

Hidup dalam ruang lingkup kecamatan yang relatif kecil dengan etnis dan struktur masyarakat yang beragam serta identitas budaya yang kuat, maka diperlukan sikap toleransi yang tinggi agar tidak terjadi ketersinggungan hingga menyebabkan konflik antar etnis. Selain itu, negosiasi identitas sangat berperan penting agar dapat menemukan keselarasan dan harmonisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks budaya, negosiasi identitas merupakan proses interaksi yang terjadi antar manusia diantara kelompok-kelompok kebudayaan sehingga identitas itu dibentuk melalui komunikasi dalam beranekaragam kebudayaan (Setya & Rahardjo, 2020). Negosiasi identitas tidak hanya sebatas cara untuk mengenali dan mempertahankan suatu identitas individu atau kelompok. Namun, negosiasi identitas juga dapat dijadikan cara agar dapat hidup bersosial dan bermasyarakat secara harmonis dengan etnis dan identitas yang heterogen seperti Kecamatan Pulau Besar.

Berangkat dari fenomena-fenomena sosial dan harmonisasi yang terjadi dimasyarakat itu yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian terkait bagaimana proses dan hasil akhir dari negosiasi identitas budaya etnis pendatang dengan etnis lokal di Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses dan hasil akhir dari negosiasi identitas budaya etnis pendatang dan etnis lokal di Kecamatan Pulau Besar. Sedangkan manfaat dari penelitian ini, yaitu agar masyarakat tetap menjaga sikap saling toleransi antar etnis dan sebagai acuan untuk meningkatkan harmonisasi dan interaksi antar etnis pendatang dengan etnis pendatang maupun etnis pendatang dengan etnis lokal.

B. LANDASAN TEORITIK

Untuk mempermudah, menganalisis, dan mengkaji pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori negosiasi identitas yang dikemukakan oleh Stella Ting-Toomey. Menurut Stella Ting-toomey (1999), negosiasi identitas berarti cara-cara suatu identitas yang didiskusikan dalam interaksi dengan orang lain dan kemudian identitas disusun atas gambaran diri seseorang yang dibentuk melalui negosiasi individu dengan menyatakan, memodifikasi, atau menentang identifikasi-identifikasi diri sendiri atau orang lain. Teori negosiasi identitas menurut Stella Ting-Toomey (1999) menekankan domain identitas tertentu dalam mempengaruhi interaksi sehari-hari individu. Hal ini disebut *middle range theory* karena bagaimana etnis dan budaya imigran atau pengungsi yang berevolusi, identitas pribadi dilingkungan yang asing didasarkan pada penerimaan penduduk mayoritas, faktor dukungan struktural institusional, dan desakan situasional, serta faktor individu dari proses adaptasi hingga perubahan identitas.

Stella Ting-Tomeey (1999) juga menjelaskan tentang komunikasi antar budaya yang *mindfulness* dan *mindless*. *Mindfulness* mengkonsepsikan pengembangan kesadaran budaya, pengetahuan budaya, dan respon interpersonal untuk mengembangkan keanggotaan dari identitas personal. Kemudian Stella Ting-toomey (1999) juga menjelaskan *mindfulness* memperhatikan asumsi, yakni emosi, kehendak, kognitif, sikap, dan perilaku. Untuk menjadi komunikator yang *mindfull*, individu harus mempelajari sistem nilai yang mempengaruhi konsep diri orang lain, perlu membuka diri terhadap cara baru untuk mengkonstruksi identitas, siap memahami masalah dan perilaku dari sudut pandang budaya orang lain, dan harus waspada bahwa ada banyak perspektif yang menginterpretasikan satu fenomena dasar. Sementara *mindless* kebalikan dari *mindfulness*, yaitu sangat bergantung pada kerangka referensi yang familiar, desain, dan kategori yang sudah menjadi rutinitas dan melakukan cara-cara yang telah menjadi kebiasaan.

Menciptakan hubungan yang harmonis antar budaya diperlukan komunikasi budaya yang baik. Stella Ting-tommey (1999) menyatakan bahwa untuk mencapai komunikasi budaya dia menggunakan dua kriteria komunikasi yang relevan dan kompeten menurut Spitzberg dan Cupath, yaitu ketepatan (*appropriateness*) dan efektivitas (*effectivity*). Ketepatan, yaitu merujuk pada sejauh mana sebuah perilaku dianggap tepat sehingga dapat menyesuaikan harapan dari

adanya kebudayaan. Efektivitas, kemudian merujuk pada sejauh mana seorang komunikator dapat menciptakan makna bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Ada 10 asumsi utama yang digagas oleh Stella Ting-Toomey (1999) dalam teori negosiasi identitas.

1. Dinamika utama dari identitas keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok dan identitas pribadi terbentuk melalui komunikasi simbolik dengan orang lain.
2. Orang-orang dalam semua budaya atau kelompok etnis mempunyai kebutuhan dasar akan dorongan dalam mendapatkan kenyamanan, kepercayaan, keterlibatan, koneksi dan stabilitas berdasarkan individu dan kelompok.
3. Setiap orang akan cenderung mengalami kenyamanan identitas dalam suatu lingkungan budaya yang familiar baginya dan sebaliknya akan mengalami identitas yang rentan dalam suatu lingkungan yang baru.
4. Setiap orang cenderung merasakan kepercayaan identitas ketika berkomunikasi dengan orang lain yang budayanya sama atau hampir sama dan sebaliknya kegoyahan identitas manakala berkomunikasi mengenai tema-tema yang terikat oleh regulasi budaya yang berbeda darinya.
5. Seseorang akan cenderung merasa menjadi bagian dari kelompok bila identitas kelompok keanggotaan dari kelompok yang diharapkan memberi respon yang positif. Sebaliknya akan merasa berbeda/asing saat identitas keanggotaan kelompok yang diinginkan memberi respon yang negatif.
6. Seseorang akan mengharapkan koneksi antar pribadi melalui kedekatan relasi yang *meaningfull* (misalnya dalam situasi yang mendukung persahabatan yang akrab) dan sebaliknya akan mengalami otonomi identitas saat mereka menghadapi separatis/terpisah.
7. Orang akan memperoleh kestabilan identitas dalam situasi budaya yang dapat diprediksi dan akan menemukan perubahan identitas atau goncang dalam situasi-situasi budaya yang tidak diprediksi sebelumnya.
8. Dimensi budaya, personal dan keragaman situasi mempengaruhi makna interpretasi dan penilaian terhadap tema-tema atau identitas tersebut.
9. Kepuasan hasil dari negosiasi identitas meliputi rasa dimengerti, dihargai, dan didukung.
10. Komunikasi antar budaya yang *mindfull* menekankan pentingnya penyatuan pengetahuan antar budaya, motivasi dan keterampilan untuk dapat berkomunikasi dengan memuaskan, tepat dan efektif.

C. METODE PENELITIAN

Lokasi yang diambil dari penelitian ini yaitu Kecamatan Pulau Besar dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Sukmadinata & Syaodih, 2011). Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena-fenomena dan aktivitas sosial seperti negosiasi identitas budaya etnis pendatang dengan etnis lokal yang ada di Kecamatan Pulau Besar.

Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penentuan informan peneliti menggunakan teknik penentuan informan melalui teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu menentukan informan sesuai dengan kriteria yang relevan dengan masalah penelitian (Arikunto, 2010). Kemudian pada teknik analisis data peneliti melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tarik Ulur Negosiasi Identitas

Dalam teori negosiasi identitas yang dikemukakan oleh Stella Ting-Toomey (1999), menyatakan ada 10 asumsi utama dalam negosiasi identitas. 10 asumsi tersebut menjelaskan bagaimana kondisi dan situasi yang terjadi dalam negosiasi identitas. Tarik ulur negosiasi identitas dalam penelitian ini merupakan proses tarik ulur identitas seseorang dalam anggota atau kelompok identitas itu sendiri dalam mempertahankan, mengidentifikasi dan memodifikasi identitasnya. Tarik ulur negosiasi identitas tersebut akan dilihat dari 10 asumsi utama perspektif negosiasi identitas dari Stella Ting Toomey (1999). Pada pembahasan ini akan menjelaskan dan menerangkan mengenai relevansi antara 10 asumsi utama negosiasi identitas dengan bentuk dan pola yang terjadi di Pulau Besar Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan.

Tabel 2.1 Relevansi Indikator Teori dengan Bentuk dan Pola Dilapangan

No.	Indikator Teori	Bentuk dan Pola
1.	Dinamika utama anggota identitas terbentuk melalui komunikasi simbolik dengan orang lain	Komunikasi budaya
2.	Setiap etnis mempunyai kebutuhan dasar untuk mendapatkan kenyamanan, kepercayaan, stabilitas	Dilibatkan dalam acara identitas etnis
3.	Setiap orang cenderung nyaman dengan identitasnya ketika dilingkungan yang familiar, begitupun sebaliknya	Toleransi terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing etnis
4.	Setiap orang cenderung merasakan kepercayaan identitas ketika komunikasi dengan identitas yang hampir sama, begitupun sebaliknya	Tidak mengganggu dan tidak menjelekkan etnis lain
5.	Seseorang akan cenderung menjadi bagian dari anggota identitas jika direspon positif, begitupun sebaliknya	Dilibatkan dalam acara-acara identitas etnis dan budaya
6.	Seseorang cenderung memiliki rasa identitas melalui kedekatan, begitupun sebaliknya	Konsistensi dan toleransi
7.	Seseorang akan cenderung memperoleh kestabilan identitas dengan situasi budaya yang dapat diprediksi, begitupun sebaliknya	Sikap terbuka terhadap etnis lain
8.	Dimensi budaya, personal, dan keragaman mempengaruhi penilaian terhadap identitas	Menilai dari kebiasaan sehari-hari
9.	Kepuasan hasil negosiasi identitas meliputi rasa dimengerti, dihargai, dan didukung	Dimengerti, dihargai, dan didukung
10.	Komunikasi yang <i>mindfull</i> menekankan penyatuan pengetahuan budaya motivasi dan keterampilan	Akulturasi dan Asimilasi

Pada tabel 2.1 diatas menyajikan tentang 10 asumsi utama dari teori negosiasi identitas Stella Ting Toomey terhadap situasi lapangan yang terjadi di Kecamatan Pulau Besar. *Pertama*, pola utama yang terjadi dilapangan yaitu komunikasi budaya. Seperti yang dikatakan Pak Nasir dari selapan *"pada acara kematian disana kami tidak ada mengganggu dan gotong royong semua ditanggung oleh keluarga duka. Jadi kami ngikut budaya disini karena masuk akal dan bisa membantu beban keluarga"*. Komunikasi lintas budaya mengakibatkan pola pikir identitas etnis

menjadi berubah. Perubahan itu terjadi karena proses komunikasi budaya yang *mindfull* membuat suatu identitas etnis terpengaruh karena pola pikir etnis lain yang lebih masuk akal.

Kedua, pola yang terjadi yaitu dilibatkan dalam acara-acara identitas etnis. Seperti kata Ibu Suratun dari Jawa *"kebutuhan kami secara dasar untuk mendapatkan kenyamanan dan kepercayaan dengan cara dilibatkan dalam acara-acara etnis"*. Masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok, mereka akan mendapatkan dorongan rasa kenyamanan, kepercayaan, koneksi, dan stabilitas identitas jika dilibatkan dalam segala bentuk acara-acara budaya identitas etnis.

Ketiga, pola yang terjadi yaitu dengan cara bersikap toleransi terhadap kelebihan dan kekurangan dari masing-masing etnis. Berikut kutipan wawancara kepada Pak Casmuri dari Jawa *"kami mendapatkan kenyamanan identitas walaupun beragam etnis, kami sama-sama menonjolkan identitas kami tanpa menghina budayalain, intinya harus saling menghargai dan menghormati kekurangan dan kelebihan masing-masing"*. Menurut Pak Casmuri, kenyamanan identitas tidak dilihat dari lingkungan budaya yang familiar atau asing dengan kita. Namun, kenyamanan identitas tergantung pada sikap orang-orang dalam identitas etnis tersebut. Walaupun kita hidup dalam lingkungan budaya yang asing atau berbeda dari budaya kita, jika kita menanggapi perbedaan tersebut dengan bijaksana maka nyaman identitas tidak akan terusik. Namun sebaliknya, walaupun kita hidup dalam lingkungan yang familiar akan tetapi sikap dari anggota identitas yang sulit untuk toleransi maka kenyamanan identitas etnis pun bisa terjadi dari dalam etnis itu sendiri.

Keempat, pola yang terjadi pada poin ini yaitu tidak mengganggu dan tidak menjelekkkan satu dengan yang lain. Berikut kutipan wawancara kepada Pak Nengah Sute dari Bali *"kepercayaan identitas kami sama saja ketika berkomunikasi dengan etnis kami maupun etnis lain"*. Kepercayaan identitas yang terjadi di Pulau Besar sama saja tidak ada perbedaan baik ketika komunikasi dengan etnis yang sama maupun etnis yang berbeda. Ketika komunikasi lintas budaya mereka selalu bersikap saling menghargai, menghormati, dan mendukung. Mereka menghindari percakapan yang akan mengarah pada penghinaan, mengganggu, dan pengurangan kepercayaan terhadap identitas etnis.

Kelima, pola yang digunakan yaitu dilibatkan dalam acara-acara identitas etnis dan budaya. Berikut kutipan wawancara kepada Ibu Eti dari Jawa *"kami merasakan bagian dari orang Jawa selain memang asli Jawa juga karena kami selalu dilibatkan dalam acara etnis kami"*. Menurutnya, mereka akan merasa dalam bagian anggota identitas tersebut jika anggota identitas tersebut memberikan respon positif kepada mereka. Salah satunya yaitu dengan dilibatkannya masyarakat ketika dilaksanakannya acara-acara terkait identitas etnis dan budaya.

Keenam, pola yang terjadi pada poin ini yaitu konsistensi dan toleransi. Sebagaimana dikatakan oleh Pak I Komang dari Bali sebagai berikut *"walaupun kami hidup di lingkungan yang didominasi etnis lain tapi secara identitas kami tetap pada identitas asli yaitu Bali. Namun, dalam konteks budaya, kami ikut serta dalam acara-acara budaya etnis lain begitupun sebaliknya"*. Menurut Pak I Komang, jika dilihat dari perspektif identitas diri, walaupun di tengah lingkungan yang didominasi oleh etnis lain secara naluri dan identitas mereka tetap Bali dan Hindu. Namun, ketika dalam perspektif budaya toleransi mereka terapkan dengan selalu ikut ketika ada acara dari etnis lain walaupun dalam konteks acara Islam seperti budaya^{Nganggung}.

Ketujuh, pola yang digunakan pada poin ini yaitu dengan cara bersikap terbuka terhadap etnis lain. Berikut kutipan wawancara kepada Pak Adedin yang merupakan salah satu tokoh Sunda *"kestabilan identitas terjadi ketika kita mempunyai sikap terbuka dan saling menghargai identitas etnis, karena dengan begitu masing-masing etnis tidak akan merasa terancam dengan identitas yang lain"*. Kestabilan identitas akan terjadi jika masing-masing identitas yang berbeda sama-sama memiliki sikap terbuka. Sikap saling terbuka merupakan salah satu cara agar tidak terjadi perselisihan antar identitas yang mengakibatkan kegoncangan

terhadap identitas itu sendiri. Terlalu menutup diri terhadap identitas luar akan memberi peluang akan munculnya sifat etnosentrisme.

Kedelapan, pola yang mengalir yaitu menilai identitas etnis dari kebiasaan sehari-hari anggota identitasnya. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Yeski dari Madura *"kebiasaan seseorang sehari-hari bisa menimbulkan penilaian terhadap identitas etnis"*. Menurut Pak Yeski, seseorang dapat menjustifikasi suatu identitas dari tingkah laku, gaya berpakaian, gaya atau nada bicara. Seperti halnya orang Madura yang dinilai religius karena gaya berpakaian yang sering menggunakan sarung dan kopiah, dan orang Sunda yang nada bicaranya yang lembut.

Kesembilan, pola yang digunakan dalam indikator ini yaitu sikap saling dimengerti, dihargai, dan didukung. Menurut Pak Suhadi dari Sunda *"perasaan saling mengerti, menghargai, dan mendukung merupakan salah satu kunci kecamatan Pulau Besar tidak pernah terjadi konflik karena faktor identitas dari dulu hingga sekarang"*. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Pulau Besar tidak pernah terjadi konflik yang disebabkan oleh faktor etnis. Hal itu telah dijelaskan oleh pendatang yang ada di Pulau Besar. Fakta itu kemudian diperjelas oleh Pak Suhadi selama tinggal di Pulau Besar. Walaupun mereka hidup dilingkungan yang heterogen mereka tetap harmonis karena sikap saling dihargai, dimengerti, dan didukung.

Kesepuluh, bentuk yang digunakan pada poin ini yaitu dengan terciptanya asimilasi dan akulturasi. Seperti kutipan wawancara Ibu Nikomang dari Bali *"selama disini banyak mendapatkan pengalaman dan ilmu baru karena hidup dilingkungan yang beragam mulai dari bahasa, budaya, maupun kesenian-kesenian yang tidak ditemukan ditempat asli kami"*. Hubungan yang intensif dan dengan bentuk komunikasi budaya yang mindful akan dapat mengubah pola pikir suatu identitas. Seperti halnya yang dijelaskan pada asumsi poin satu, bahwa identitas terbentuk melalui pengalaman dan komunikasi budaya dengan orang lain. Komunikasi budaya yang mindful dan intensif dengan demikian akan dapat menciptakan suatu asimilasi dan akulturasi budaya.

B. Proses Negosiasi Identitas

Menciptakan hubungan bermasyarakat yang harmonis dengan situasi dan kondisimasyarakat yang beragam tidaklah mudah. Diperlukan proses yang panjang dan sikap toleransi yang tinggi agar dapat menciptakan harmonisasi itu. Negosiasi identitas sangatlah diperlukan agar masyarakat yang multikultural dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa adanya konflik. Proses negosiasi identitas yang terjadi di Pulau Besar dapat dilihat dari beberapa penjelasan narasumber yang berasal dari beragam etnis yang ada. Berikut merupakan kutipan wawancara kepada Pak Casmuri sebagai tokoh masyarakat dari etnis Jawa.

"kami sangat menjunjung tinggi budaya etnis lain dengan ikut serta dalam acara-kesenian yang biasanya diadakan pada acara besar daerah maupun pada ulang tahun transmigrasi. disitu budaya mereka ditonjolkan budaya kami ditonjolkan. Namun, kita harus saling menghormati dan menghargai kelebihan dari masing-masing etnis gitu". (wawancara pada tanggal 04 Juli tahun 2021).

Selain dari etnis Jawa penelitian juga diperjelas oleh tokoh sunda yaitu yang telah lama tinggal di Pulau Besar yaitu Pak Suhadi. Berikut hasil kutipan wawancaranya. *"jadi selama disini belum pernah sekalipun saya mendengar dan melihat kasus konflik antar etnis gitu"*. Selain dari etnis Sunda dan Jawa, masalah toleransi juga dikatakan oleh Pak I Komang dalam wawancara terkait toleransi dan budaya yang mencakup proses dari negosiasi identitas budaya. *"seperti budaya mengganggu kami ikut karena menghargai dan menghormati, jadi budaya disini sudah bercampur. Walaupun kami beragama hindu kami tetap ikut budaya mengganggu yang sebagaimana kita ketahui bahwa mengganggu itu diisi oleh muslim tapi kami menghormati dan mendukung"*.

Dari beberapa penjelasan tokoh dan masyarakat dari beragam etnis menyatakan bahwa dalam kehidupan sosial, berbudaya, dan beragama mereka tetap saling menghormati,

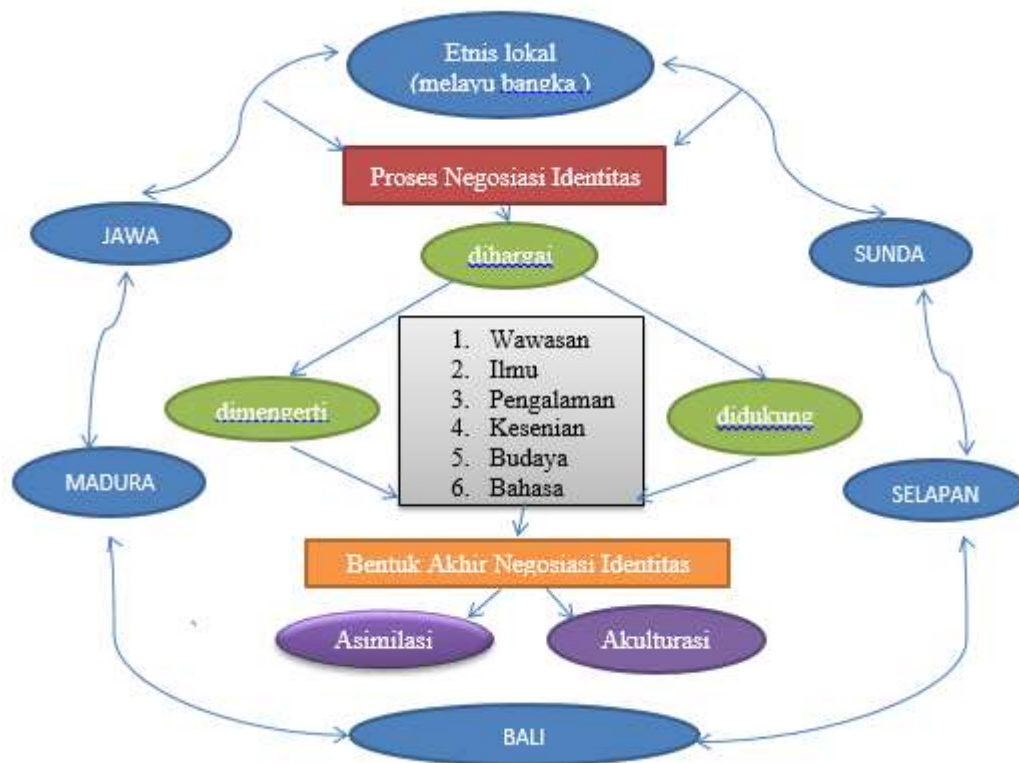
menghargai, dan mendukung apa saja yang ada di etnis lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Casmuri bahwa kita hidup di Pulau Besar merupakan gambaran kecil dari Indonesia yaitu keberagaman. Masalah budaya yang beragam mereka tetap saling mendukung satu sama lain. Mereka tau bahwa setiap etnis dan budaya itu mempunyai kriteria dan ciri khas masing-masing. Oleh sebab itu, dari keberagaman yang mereka lihat dan temui dari budaya dan etnis lain dapat menambah ilmu, kesenian, bahasa, budaya, dan wawasan mereka. Karena jika mereka hanya fokus dan tertutup oleh budaya dan etnis luar maka mereka tidak akan menambah ilmu, wawasan, dan pengalaman baru sehingga mereka hanya jalan ditempat tidak ada perkembangan dan kemajuan.

Hal menarik yang terjadi juga dijelaskan oleh Pak I Komang. Menurutnya, tingkat toleransi tidak hanya mencakup masalah etnisitas tetapi juga budaya dan agama. Etnis Bali yang ada di Kecamatan Pulau merupakan mayoritas beragama hindu. Salah satu bentuk toleransi yang tinggi terjadi di Pulau Besar yaitu ikutnya orang hindu Bali terhadap budaya nganggung yang identik dengan agama islam. Walaupun peringatan hari besar islam dan semua kegiatan yang ada pada acara nganggung itu dilakukan secara islam, namun mereka tetap ikut serta karena sikap menghargai, menghormati, dan mendukung dari etnis lain yang berada disekitar mereka.

Hasil proses negosiasi identitas budaya penelitian ini relevan dengan teori negosiasi identitas dari Stella Ting-Toomey (1999). Dalam teori negosiasi identitasnya menjelaskan bahwa ada 10 asumsi utama dalam negosiasi identitas. Salah satu isi dari 10 asumsi utama yang dijelaskan oleh Stella Ting-Toomey, yaitu kepuasan hasil dari negosiasi identitas meliputi rasa dimengerti, dihargai, dan didukung.

Menurut Stella Ting-Toomey (1999) rasa dimengerti yaitu sikap untuk tetap bersimpati dan berempati terhadap pendapat, pemikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Rasa mengerti bukan berarti harus setuju dengan apa yang datang dari luar akan tetapi harus memiliki dampak empati, misalnya kita mengetahui dari mana dia berasal dan bagaimana karakter dari identitas mereka sehingga kita dapat peka terhadap budaya mereka. Perasaan dihargai atau dihormati, yaitu bermakna perilaku dan praktik yang berkaitan dengan identitas yang kita inginkan dianggap sah, kredibel, dan sejajar dengan identitas dan budaya dari kelompok dan etnis lain. Hal ini juga yang dapat memperlakukan perbedaan berbasis identitas, etnis, dan budaya yang menonjol antar etnis dengan kesopanan, pertimbangan, dan martabat. Perasaan didukung, yaitu perasaan yang kita merasa dihargai secara positif atau didukung baik secara individu maupun kelompok yang berharga meskipun memiliki identitas, etnis, dan budaya yang berbeda. Ketika seseorang merasakan dukungan secara positif, maka dia cenderung melihat citra dirinya positif. Sebaliknya jika merasakan dukungan negatif, maka dia akan melihat citra dirinya negatif. Perasaan dimengerti, dihargai, dan didukung inilah yang terjadi di Pulau Besar sehingga kehidupan sosial budayanya berjalan secara harmonis ditengah multikulturalnya identitas.

Berikut merupakan skema proses negosiasi identitas budaya etnis pendatang dengan etnis lokal di Kecamatan Pulau Besar :



Dalam skema negosiasi identitas diatas, dapat dijelaskan bahwa setiap etnis saling berinteraksi baik etnis pendatang dengan etnis lokal maupun sama-sama pendatang. Dalam interaksi tersebut terjadi proses negosiasi identitas dengan kepuasan hasil meliputi rasa dimengerti, dihargai, dan didukung. Hasil dari sikap saling mengerti, menghargai, dan saling mendukung antar etnis dan budaya tersebut yaitu mereka mendapatkan wawasan, ilmu, pengalaman, kesenian, budaya, dan bahasa yang baru. Sehingga pada akhirnya dapat menciptakan bentuk-bentuk akhir dari negosiasi identitas yaitu asimilasi dan akulturasi.

C. Bentuk Akhir dari Negosiasi Identitas

Dalam kehidupan masyarakat yang beragam etnis dapat menimbulkan tiga peluang kemungkinan. *Pertama*, peluang terjadinya konflik yang disebabkan oleh masing-masing etnis saling egois dan rasisme terhadap identitas yang mereka miliki. Sikap anti-toleransi, primordialisme, dan etnosentrisme yang berlebihan dapat menyebabkan konflik antar etnis. *Kedua*, yaitu mengakibatkan pembauran antar etnis karena hubungan yang harmonis dalam suatu keberagaman. Bentuk akhir dari pembauran masyarakat yang harmonis bisa dalam bentuk adjudikasi, akulturasi maupun asimilasi. *Ketiga*, yaitu tidak berada pada posisi konflik maupun pembauran. Pada peluang ketiga ini suatu etnis berada pada identitas mereka sendiri. Walaupun hidup berdampingan dengan beragam etnis tapi mereka tidak pernah mengganggu etnis lain dan harmonis, namun pada urusan identitas mereka tetap pada identitas mereka tidak ikut dalam identitas dan budaya orang lain.

Akulturasi didefinisikan sebagai enkulturasi proses pembelajaran dan penginternalisasian dari budaya serta nilai-nilai yang dianut oleh penduduk asli dan suatu proses yang dilakukan imigran untuk menyesuaikan diri dengan memperoleh budaya penduduk asli, yang akhirnya mengarah kepada asimilasi. Sedangkan pada asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya upaya dan usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat pada diri individu maupun antar kelompok manusia. Selain untuk mengurangi perbedaan-

perbedaan yang ada juga sekaligus meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tinggi, proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama (Sapitri, 2018).

1. Asimilasi Etnis Pendatang dengan Etnis Lokal.

Simbiosis mutualisme tidak hanya berlaku pada aspek biologi namun, juga berlaku pada konsep asimilasi. Sikap saling menguntungkan satu sama lain akan dapat mempermudah penerimaan kebudayaan luar ke dalam. Menurut Nurhaini, Mayasari, & Hasanah (2017) asimilasi dapat terjadi apabila kedua belah pihak mengadakan kontak dan saling menguntungkan untuk menciptakan kebudayaan dan kebutuhan dari segala sisi budaya dan kehidupan dalam lingkungan masyarakat, serta menghargai keragaman dalam menganut kepercayaan masing-masing pihak.

Etnis Selapan merupakan salah satu etnis pendatang yang cukup banyak yang pindah jiwa dan berdomisili dari seberang (selapan) dan bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Besar tepatnya di desa Suka Jaya. Adat istiadat, kebiasaan, bahasa, dan budaya yang mereka miliki diselapan sangat berbeda dengan masyarakat lokal. Hidup berdampingan dengan masyarakat lokal dengan karakteristik budaya yang sangat berbeda dari mereka membuat mereka seiring waktu mengikuti semua adat maupun budaya dari masyarakat lokal. Hal itu dijelaskan oleh salah satu narasumber dari Etnis selapan yaitu Pak Nasir *"Jadi gak bisa adat kami disana begini maka kami disini harus begini, kita disini pendatang jadi kita harus sadar diri apa yang ada disini ya kita ikuti cara-caranya"*. Menurut Pak Nasir, ketika mereka berada ditanah perantauan maka mereka harus sadar diri. Walaupun secara administrasi mereka sudah menjadi warga asli Pulau Besar, namun secara historis mereka lahir dari daerah seberang (Selapan) bukan asli lokal. Oleh sebab itu mereka sadar diri bahwa budaya mereka diseberang tidak lagi diterapkan disini. Sebagai contoh mereka mengikuti budaya nganggung, sepintu sedulang, budaya orang meninggal dan lainnya.

Ketika mereka di Selapan tidak ada namanya budaya nganggung, baik lebaran Idul Fitri, Idul Adha, ruahan, dan maulid mereka tidak pernah nganggung. Ketika lebaran, mereka hanya sholat 'Ied kemudian langsung pulang kerumah masing-masing. Namun ketika di Pulau Besar, mereka semua ikut serta dalam budaya nganggung tersebut karena mereka merasa identitasnya berubah menjadi warga Pulau Besar.

Selain itu budaya dan adat ketika orang meninggal juga mengalami perubahan. Ketika mereka di Selapan orang yang menggali kuburan dan sewa tanah kubur itu dibayar. Pada saat tahlilan dari hari pertama sampai ketujuh dilanjut dengan 25, 40 dan 100 hari kematian semua biaya ditanggung oleh rumah duka. Namun ketika di Pulau Besar, mereka mengubah dan mengikuti budaya dan adat lokal. Di Pulau Besar ketika menggali kuburan semua warga menggunakan sistem gotong royong dan tanah kuburan gratis tidak berbayar. Kemudian pada acara tahlilan kematian, budaya etnis lokal saling membantu baik dalam bentuk biaya maupun tenaga. Oleh sebab itu, menurut mereka budaya asli Pulau Besar secara logika dapat membantu keluarga yang terkena musibah bukan untuk menambah beban mereka.

Selain pada Etnis Selapan, asimilasi budaya nganggung juga terjadi pada etnis Bali seperti dijelaskan oleh Pak I Komang *"Kami di Bali tidak pernah ada nganggung, tapi disini kalo desa ngadain nganggung pada hari besar seperti 1 muharram, lebaran dan lain-lain kami ikut walaupun kami agama hindu"*. Menurut Pak I Komang, walaupun mereka beragama hindu tapi mereka tetap ikut nganggung. Budaya nganggung merupakan bentuk do'a bersama atau syukuran oleh orang muslim baik dari etnis Jawa, Sunda, Madura, maupun Melayu. Namun, etnis Bali selaku etnis pendatang yang bertransmigrasi dan menetap di Kecamatan Pulau selalu ikut jika ada budaya nganggung yang diadakan oleh pemerintah desa. Walaupun di Bali tidak ada budaya nganggung, namun ketika berada dilingkungan muslim dengan budayanya mereka selalu ikut walaupun ketika berdoa mereka menggunakan agama mereka didalam hati.

2. Akulturasi Etnis Pendatang dan Etnis Lokal

Penyebaran penduduk dapat menciptakan kebiasaan dan kebudayaan yang berbeda dari tempat asal mereka seperti di Jawa maupun Bali. Hal itu terjadi pada etnis Jawa, Madura, dan Sunda yang ada di Kecamatan Pulau Besar. Banyak etnis yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengikuti budaya maupun kebiasaan etnis lokal. Perubahan sosial maupun budaya tersebut tidak terjadi keseluruhan, akan tetapi kebudayaan mereka yang asli ditempat asal telah mempunyai perbedaan setelah seiring berjalannya waktu atau disebut dengan akulturasi. Menurut Al-Amri & Haramian (2017) Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul jika suatu kelompok manusia maupun identitas dengan suatu budaya dan identitas tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur budaya dan identitas yang asing sehingga secara lambat laun unsur-unsur kebudayaan dan identitas asing diolah dan diterima menjadi bagian dari budaya dan identitas diri tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya lama.

Salah satu contoh budaya atau kebiasaan yang terjadi perubahan yaitu budaya Nganggung. Perbedaan tersebut diperoleh peneliti ketika wawancara kepada Pak Muhsirun tentang budaya Nganggung dari etnis Jawa.

“jadi budaya disini semua etnis nganggung Pada acara malam 1 Suro. Nganggung disana sama disini itu beda. Disana orang nganggung nya diperempatan jalan bukan di balai desa. Mulai dari abis magrib sampai dini hari mereka diperempatan, biasaya orang jawa bilang lek-lek’an. disana tuh kalau orang mampu motong kambing dan kepalanya dikubur diperempatan jalan.. Tapidisini, terjadi perubahan budaya nganggung bersama dilakukan dibalai, dimusolla, atau dimasjid”.

(wawancara pada tanggal 7 Juli tahun 2021).

Selain Pak Muhsirun peneliti juga mewawancarai Ibu Supini sebagai orang Jawa transmigrasi asli yang telah lama tinggal di Pulau Besar *“Pada malam 1 suro nganggung dimusolla sama diperempatan itu dilakukan serentak. Orangnya bagi-bagi misalnya anaknya diperempatan orang tua di musolla atau anaknya dimusolla orang tuanya di perempatan itu terserah mereka yang atur”*. Penjelasan dari 2 narasumber tersebut merupakan kutipan yang ditulis oleh peneliti dari beberapa narasumber yang lain yang memiliki jawaban yang hampir sama. Pada wawancara tersebut dijelaskan bahwa pada budaya Nganggung malam 1 suro atau malam 1 muharram antara budaya asli nganggung di Jawa dengan budaya orang Jawa yang telah tinggal dan berdomisili di Pulau Besar memiliki perbedaan. Ketika mereka masih berada di Jawa asli sana, semua orang Jawa nganggungnya diperempatan jalan tidak ada di musolla. Namun, ketika mereka bertransmigrasi ke Pulau Besar mereka merubah pola atau tempat budaya tersebut tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya nganggung mereka pada aslinya. Ketika mereka di Pulau Besar mereka melakukan budaya nganggung di musolla dan juga diperempatan jalan dengan cara membagi orangnya siapa yang nganggung di musolla dan siapa yang nganggung di perempatan jalan.

Akulturasi budaya tidak hanya terjadi pada etnis pendatang dengan etnis lokal. Pencampuran budaya juga terjadi antar etnis pendatang seperti etnis Madura dan Jawa. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Delan dari etnis Madura *“kami pada malam 1 suro juga ikut nganggung diperempatan dan musolla gabung sama mereka”*. Menurut Pak Delan selaku orang Madura yang sudah puluhan tahun tinggal di Pulau Besar. Beliau menjelaskan ketika orang Jawa melakukan nganggung diperempatan jalan maupun di musolla mereka juga ada yang ikut dalam kegiatan tersebut. Padahal budaya asli Madura tidak ada budaya nganggung pada malam 1 suro. Budaya asli mereka ketika bulan suro atau muharram itu biasanya mereka membuat acara dirumah masing-masing seperti membuat kue dan bubur kemudian memanggil tukang doa. Budaya mereka itu biasanya dinamakan budaya “Cinresem”.

Dalam teori Stella Ting-Toomey (1999), relevansi dari bentuk akhir negosiasi identitas terjadi pada poin pertama ke-1 dan ke-10 dari asumsi utama teori negosiasi identitas. Asumsi ke-1 merupakan pintu masuk asumsi ke-10. Pada asumsi ke-1, dijelaskan bahwa pengalaman dan

komunikasi simbolik dengan orang lain yang berbeda budaya dengan kita akan membuat nilai, norma, citra diri dan pola pikir berubah. Kemudian pada asumsi ke-10 menyatakan, bahwa komunikasi antar budaya yang *mindfull* lebih menekankan pada penyatuan pengetahuan budaya, motivasi, dan keterampilan untuk dapat berkomunikasi dengan memuaskan, tepat, dan efektif. Menjadi komunikator yang *mindfull*, individu harus mempelajari dan memahami sistem nilai yang mempengaruhi konsep diri orang lain, membuka diri terhadap cara baru untuk mengkonstruksi identitas, siap memahami masalah dan perilaku dari sudut pandang budaya lain, dan harus waspada bahwa ada banyak perspektif yang menginterpretasikan satu fenomena dasar.

Menurut Stella Ting-Toomey (1999), pada poin ke-10 Pengetahuan budaya yang dimaksud yaitu mengacu pada pemahaman budaya secara mendalam dengan berbagai informasi yang diperoleh dari pembelajaran yang sadar dan pengalaman. Kemudian motivasi yang dimaksud, yaitu mengacu pada kesiapan kita untuk belajar dan berinteraksi dengan orang, etnis, maupun budaya yang berbeda dengan kita. Sedangkan keterampilan yang dimaksud dalam konteks ini, yaitu mengacu pada kemampuan operasional untuk mengintegrasikan pengetahuan budaya dan motivasi dengan praktik antar budaya yang tepat dan efektif.

Bentuk akhir negosiasi identitas budaya yang terjadi di Pulau Besar sama seperti salah satu asumsi utama dalam teori Stella Ting-Toomey. Dalam teorinya menyatakan bahwa, sikap saling memahami antar budaya dengan komunikasi yang *mindfull* akan menciptakan pola komunikasi yang tepat dan efektif. Sehingga dengan demikian, dengan komunikasi yang tepat, efektif dan memuaskan akan menciptakan harmonisasi dalam masyarakat bahkan terjadi pada pembauran unsur budaya. Asimilasi dan akulturasi budaya yang terjadi antar etnis pendatang dengan etnis lokal di Kecamatan Pulau salah satu bukti komunikasi *mindfull* yang berhasil dan menciptakan harmonisasi dalam beragamnya etnis. Sehingga tujuan hidup bersama dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

E. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kehidupan sosial budaya maupun sosial agama yang terjadi di Pulau Besar sangatlah harmonis. Hal itu dapat dilihat dari tidak adanya konflik yang terjadi di Pulau Besar sepanjang sejarah karena faktor etnis yang beragam. Harmonisasi yang terjadi ditengah beragamnya etnis karena adanya proses negosiasi identitas yang baik. Proses negosiasi identitas yang terjadi di Pulau Besar dapat dilihat dari sikap dan cara bermasyarakat sehari-hari ketika berinteraksi dengan etnis lainnya. Sikap yang saling menghargai, menghormati, dan mendukung budaya dan etnis merupakan proses negosiasi identitas yang dilakukan oleh semua etnis yang ada di Kecamatan Pulau Besar. Mereka semua tidak menganggap perbedaan etnis menjadikan mereka harus hidup masing-masing dan tertutup dengan etnis lain. Akan tetapi, mereka menganggap bahwa perbedaan itu menjadikan mereka lebih berkembang dengan mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru dan luas.

Hasil akhir dari proses negosiasi identitas budaya di Kecamatan Pulau besar adalah harmonisasi masyarakat. Harmonisasi masyarakat antar etnis itu yang dapat menciptakan dan membentuk pembauran antar budaya. Bentuk akhir dari negosiasi identitas di Pulau Besar yaitu terciptanya akulturasi dan asimilasi. Akulturasi budaya yang terjadi yaitu terjadi pada etnis Jawa, Madura, dan Sunda karena perubahan budaya mengganggu mereka tanpa menghilangkan unsur budaya lama mereka. Sedangkan asimilasi terjadi pada etnis Selapan dan Bali terhadap Melayu Bangka (etnis lokal) karena sebelumnya etnis mereka tidak pernah melakukan budaya mengganggu.

B. Saran

1. Untuk kedepannya agar masyarakat lebih menjaga sikap saling menghargai, menghormati dan mendukung antar etnis, budaya dan antar umat beragama agar kehidupan yang harmonis yang terjadi di Pulau Besar tetap berlangsung seterusnya.
2. pemerintah diharapkan untuk berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan budaya etnis pendatang dan etnis lokal agar generasi yang akan datang tetap melihat budaya dari masing-masing etnis yang ada. Selain itu, pemerintah diharapkan agar sering mengadakan acara atau pertunjukan yang menampilkan kesenian dan budaya dari masing-masing etnis agar tetap menjaga harmonisasi antar umat yang berbudaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesaputra, R., Fitria, S., & Montessorri, M. (2019). Integrasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal Malakok Terhadap Etnis Pendatang di Pasar Usang Sumatera Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3, 894-901.
- Al-Amri, L., & Haramain, M. (2017). Akulturasi Islam dalam Budaya Lokal. *KURIOSITAS*, 11, 192-204
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Data Kependudukan Kecamatan Pulau Besar Tahun 2020
- Mutia, & Bahrein, S. T. (2017). Asimilasi Etnis Tamiang dan Etnis Batak di Desa Rantau Pauh, Rantau, Aceh Tamiang. *JIM FISIP UNSYIAH:VOL.3.No.1,November 2017*, 3.
- Nurhaini, Mayasari, D. E., & Hasanah, U. (2019). Asimilasi Budaya Masyarakat Transmigrasi dengan Masyarakat Lokal di Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. *Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 3.
- Sapitri, L. (2018) Interaksi sosial antar etnik di Wilayah Aneka Warga Ciputat Kota Tangerang Selatan. *Skripsi*, 14-15.
- Setya, R. A., & Rahardjo, T. (2020). Negosiasi Identitas Etnis Lampung dalam Upaya Mempertahankan Bahasa Lampung sebagai Identitas Budaya. *Fisip.undipac.id*, 4-5.
- Sukmadinata, & Syaodih, N. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suryandari, N. (2017). Negosiasi Identitas Pendatang dalam Komunikasi Antar Budaya dengan Etnis Madura (Studi Interpretif Komunikasi Antar Budaya Pendatang dan Etnis Madura di Kamal Bangkalan). *Jurnal Humaniora dan Ilmu Sosial*, 87-98.
- Ting-Toomey, S. (1999). *Comunicating Across Cultures*. New York: The Guilford Press.

Sumber Internet

<https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html> (diakses tanggal 10 maret 2021, pada pukul 21.46 WIB)

<https://babel.bps.go.id/publikasi.html> (diakses pada tanggal 10 Maret 2021, pada pukul 22.09WIB)

	Journal Of Government and Social Issues (JGSI) Volume 1 Nomor 1 2021: 33-52 https://jgsi.fisip.unila.ac.id/index.php/Jurnal	
---	---	--

ARTICLE



Pengaruh *Product, Promotion, Price dan Place* Politik Partai Baru terhadap Preferensi Politik Generasi Milenial pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019

Mazmur J O Panjaitan¹, Tabah Maryanah², Himawan Indrajat³

¹Universitas Lampung & Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

²Universitas Lampung & Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite:

Panjaitan, M. J.O., Maryanah, T., Indrajat, H. (2021). Pengaruh *Product, Promotion, Price dan Place* Politik Partai Baru terhadap Preferensi Politik Generasi Milenial pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019. *Journal of Government and Social Issues (JGSI)*, 1(1), 33-52.

Article History

Dikirim: 21 Oktober, 2021;

Diterima: 14 Desember, 2021;

Dipublikasi: 31 Desember, 2021;

Keywords:

Political Marketing

Political Marketing Mix

New Parties

PSI

Millennial Generation

Political Preferences

ABSTRACT

The percentage of PSI in the Legislative Election of Bandar Lampung City obtained 1.31% of the votes in the midst of the millennial generation dominating the election votes, referring to BPS data that the total millennial population got the highest order reaching 449,310 people, so the purpose of this study was to determine the failure of PSI in the Legislative Election through the marketing mix. PSI politics by Firmanzah against millennial political preferences. The research method used a mix method design sequential explanatory. The results of this study show that the four variables marketing mix political, PSI have not implemented the political marketing mix by Firmanzah, include only products that affect the preferences of the millennial generation, because PSI products are still in line with millennials to build and bring change with an anti-corruption and intolerance platform. Variables promotion, price and place have no effect on political preferences, PSI still does not use social media as a campaign promotion tool efficiently, while price PSI does not have a central figure who can influence the preferences of party segments and PSI visits do not touch all levels of society. Meanwhile, the qualitative results indicate that PSI failure occurs due to internal and external factors.

ABSTRAK

Persentase PSI pada Pemilu Legislatif Kota Bandar Lampung memperoleh 1,31% suara di tengah generasi milenial yang mendominasi perolehan suara pemilu, mengacu pada data BPS bahwa total populasi milenial mendapat urutan tertinggi mencapai 449.310 orang, demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegagalan PSI di Pemilu Legislatif melalui bauran pemasaran. Politik PSI oleh Firmanzah terhadap preferensi politik milenial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran desain sekuensial explanatory. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel bauran pemasaran politik, PSI belum menerapkan bauran pemasaran politik menurut Firmanzah, hanya memasukkan produk yang mempengaruhi preferensi generasi milenial, karena produk PSI masih sejalan dengan generasi milenial untuk membangun dan membawa berubah dengan platform antikorupsi dan intoleransi. Variabel promosi, harga dan tempat tidak berpengaruh terhadap preferensi politik, PSI masih belum menggunakan media sosial sebagai alat promosi kampanye secara efisien, sedangkan harga PSI tidak

Kata Kunci:

Pemasaran Politik

Bauran Pemasaran Politik

Pesta Baru

PSI

Generasi Milenial

Preferensi Politik

memiliki figur sentral yang dapat mempengaruhi preferensi segmen partai dan kunjungan PSI tidak menyentuh semua lapisan masyarakat. Sedangkan hasil kualitatif menunjukkan bahwa kegagalan PSI terjadi karena faktor internal dan eksternal.

A. PENDAHULUAN

Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Tanpa partai politik proses sirkulasi elit yang demokratis akan sulit terwujud karena partai politiklah satu-satunya organisasi yang dapat menjadi peserta pemilu. Hanya dengan menjadi peserta pemilu, partai politik akan mendapatkan dukungan dari rakyat yang beragam dan menguasai kekuasaan pemerintahan.¹ Melalui pemilu, terjadi proses transformasi dari kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat menjadi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam arti luas. Partai politik juga menjadi salah satu infrastruktur politik yang mampu menjembatani rakyat dan pemerintah. Partai politik pemenang pemilu memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mewujudkan kepentingan rakyat.

Melalui pemilu kinerja partai politik akan terlihat. Apakah partai politik mendapatkan dukungan dari rakyat atau tidak akan terlihat dari perolehan suara di pemilu dan perolehan kursi di DPR serta DPRD. Indonesia telah 12 kali menyelenggarakan pemilu, yakni pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 diikuti 24 partai politik, 2009 diikuti 28 partai politik, 2014 diikuti 12 partai politik dan 2019 diikuti 16 partai politik.

Pemilu 1999 merupakan pemilihan umum pertama menerapkan pemilu yang demokratis setelah Pemilu 1955. Kehadiran partai baru tidak bisa dimungkiri turut menghidupkan dinamika politik menjelang pemilu. Prediksi hasil lembaga survei relatif memberikan gambaran “suram” bagi masa depan partai baru tetapi setidaknya warna demokrasi Indonesia lebih terang dibandingkan dengan ketidakhadiran partai-partai baru tersebut. Dimulai sejak memasuki masa reformasi pada tahun 1998. Maka dimulailah geliat politik Indonesia dengan munculnya partai-partai baru. Pemilu pada tahun 1999 diikuti 48 partai dan dimenangkan partai PDIP dengan 33,74% suara (153 kursi). Selanjutnya pemilu pada tahun 2004 hadirnya 6 partai baru dari 24 partai sebagai peserta.

Kebebasan berserikat yang digaungkan setelah Orde Baru mendorong berdirinya partai-partai baru sejak menjelang Pemilu 1999. Namun tidak semua partai baru dapat bertahan pada pemilu-pemilu berikutnya karena adanya ketentuan ambang batas persyaratan minimal yang harus diperoleh partai untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya (*electoral threshold*) sebesar 2,5% pada Pemilu 2009, semakin sulit partai baru bertahan. Sebanyak 38 partai politik peserta pemilu 2009 hanya sembilan yang lolos. Selanjutnya pada Pemilihan Umum 2014, hanya satu partai baru, yaitu Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang lolos untuk mengikuti pemilu selanjutnya karena mendapatkan 6,72% atau 8.402.812 suara.

Partai baru semakin sulit bertahan pada Pemilu Serentak 2019 karena ketentuan ambang batas perolehan kursi di parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4%. Berdasarkan ketentuan UU 7/2017 tentang Pemilu Pemilu 2019 diikuti oleh 20 partai politik. Sebanyak 12 partai merupakan partai lama, empat partai baru, dan empat partai lokal dari Aceh. Empat partai baru peserta Pemilu 2019 adalah Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

PSI didirikan pada tanggal 16 November 2014 dan ketua umumnya dijabat oleh Grace Natalie. PSI memiliki visi sebagai partai yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, keberagaman, berkeadilan, berkemajuan, dan bermartabat. PSI mengusung perubahan dengan membawa semangat antikorupsi dan antiintoleransi, serta menumbuhkan semangat politik

¹ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 397

khususnya bagi generasi milenial.² PSI menganggap bahwa partai-partai yang telah ada belum melakukan perubahan, utamanya dalam pengkaderan dan peroduk yang dihasilkan.³

PSI juga mengusung kebijakan publik yang berpijak pada tantangan yang dihadapi Indonesia saat itu. PSI ingin melakukan transformasi berupa perubahan dan penyesuaian kerangka institusional dalam lingkup negara karena persoalan pelembagaan institusi sosial, politik, ekonomi, sampai pada layanan publik dasar, seperti penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana pendidikan, insfrastruktur, kesehatan dan juga tantangan kompetisi global. Cita-cita transformasi dilaksanakan dengan berpijak pada nilai-nilai kebajikan, keragaman, keterbukaan dan meritokrasi.⁴

PSI dikenal sebagai partainya milenial. Hal ini karena kader-kader yang milenial dan mengandalkan kreatifitas. Model kampanye PSI sangat kreatif, gaul, dan sangat relevan dengan segmen pasar PSI, yakni generasi milenial. Sapaan khas “bro” untuk laki-laki dan “sist” bagi perempuan sangat cocok untuk generasi milenial. Oleh karena sasaran kampanye PSI adalah generasi milenial maka media sosial dipilih untuk memperkenalkan partai dan mengajakpemilih untuk melihat keunggulan yang dimiliki oleh PSI.⁵

Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 mencapai 81,97%. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 mencapai 81,69%. Pemilihan Legislatif Kota Bandar Lampung 2019, partisipasi pemilihnya mencapai 88,61%. Pada pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampung PSI hanya berhasil meraup perolehan suara 1,31 % suara. Kota Bandar Lampung memiliki jumlah pemilih terbesar keempat dari 15 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Juga merupakan pusat kegiatan politik dan memiliki perguruan tinggi terbanyak di Provinsi Lampung.

PSI dikenal sebagai partai milenial yang mewakilkan generasi milenial ikut bertarung pada pemilihan legislatif, di tengah tingginya tingkat generasi milenial menjadi pusat perhatian partai. Data menunjukkan bahwa generasi milenial mendominasi pemilih suara pemilih. Pada data BPS 2018 penduduk kota Bandar Lampung sejumlah 1.033.803 jiwa, penduduk tertinggi terdapat pada rentan usia 15-39 Tahun dengan jumlah 449.310 jiwa merujuk pada data KPU total pemilih tetap sejumlah 619.706 dan didominasi generasi milenial. Generasi ini juga identik dengan teknologi merujuk pada data APJII pada presentasi penggunaan internet Tahun 2019-2020 Provinsi Lampung meningkat dari Tahun 2018 (39,5%) sampai Tahun 2019 (62,3%) seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet di Bandar Lampung sejumlah 60,0%.

Hadirnya marketing dapat membantu kandidat dalam melihat apa yang menjadi kebutuhan segmen dan diidentifikasi dan dicari solusi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Situasi ini memberi peluang bagi penerapan ilmu marketing dalam dunia politik. Program marketing yang disebut dengan 4P (*product, promotion, price dan place*) diterapkan semua politisi maupun partai politik terkhusus PSI. Program 4p , menjadi alternatif strategi untuk mendulang suara pemilih. Masalah masih rendahnya ketertarikan masyarakat pemilihan umum baik pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah karena ketidakpercayaan masyarakat kepada politisi atau partai politik yang dinilai masih banyak melakukan tindakan-tindakan yang kurang diharapkan masyarakat di antaranya praktik korupsi.

²Kompas.com, PSI, Grace Natalie dan Citra Partai Anak Muda”, 22 Februari 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/12132451/psi-grace-natalie-dan-citra-partai-anak-muda>, diakses pada 30 September 2018.

³Admin. PSI.id, “Pembentukan Partai PSI Berawal dari Obrolan di Kafe”, 26 Februari 2018, <https://psi.id/berita/2018/02/26/pembentukan-partai-psi-berawal-dari-obrolan-di-kafe/>, diakses pada 30 September 2018.

⁴<https://psi.id/berita/content/cita-cita-psi/>, diakses pada 30 September 2018.

⁵Kutipan pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie, di DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, 19 Februari 2018

Program marketing yang disebut dengan 4P (product, promotion, price dan place) diterapkan semua politisi maupun partai politik terkhusus PSI yang diyakini akan mampu menawarkan alternatif strategi untuk meraup dukungan politik terutama pada preferensi pemilih. Sejalan dengan hal ini, *product, promotion, price* dan *place* berpengaruh pada keputusan memilih sehingga peneliti tertari untuk meneliti apakah *product, promotion, price* dan *place* PSI Kota Bandar Lampung berpengaruh terhadap preferensi politik generasi milenial sebagai segmen PSI dengan pegangan *platform* partai yaitu anti korupsi dan intoleransi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Bauran Marketing Politik

Generasi Milenial

Generasi milenial merupakan generasi yang unik dari generasi sebelumnya dan kini banyak menjadi perhatian berbagai bidang termasuk di bidang politik. Generasi milenial adalah generasi yang juga disebut sebagai generasi Y atau *net generation, echo boomers, n-geners, nexters*, dan *digital natives*.⁶ Generasi milenial memiliki 2 karakteristik yaitu generasi milenial awal (1980-1987) dan generasi milenial resesionalis (1995-2010).

Generasi milenial awal dibesarkan dengan komputer, internet dan sistem edukasi yang lebih menghargai usaha dari pada hasil. Walaupun sistem demikian diduga membuat milenial menjadi pemalas namun *Bridgeworks* menemukan bahwa generasi ini berpotensi sebagai pemimpin yang optimis dan berpandangan positif. Di usia dewasa, generasi ini lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi. Cukup peduli terhadap politik baik masalah sosial. Sedangkan milenial resesionalis adalah generasi yang melek teknologi namun kurang memiliki ketertarikan dengan dunia politik. Generasi milenial terperangkap resesi global saat memasuki dunia kerja. Berbagai kemudahan yang diberikan oleh teknologi dan internet membuat generasi milenial resesionalis merasa selalu terhubung, tidak mau ketinggalan, dan tidak sabaran akibatnya generasi ini sering di cap malas dan berbak.

Generasi milenial identik dengan pemikiran kritis terhadap lingkungannya, baik menyangkut gaya hidup, sosial, maupun politik. Meskipun demikian generasi milenial enggan masuk dalam dunia politik. Ada dugaan keengganan disebabkan oleh pandangan bahwa politik itu kotor dan jarang melihat bentuk politik yang bijak, sehingga beranggapan bahwa dunia politik hanya untuk orang tua saja.

Preferensi Generasi Milenial

Preferensi konsumen merupakan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada (Kotler, 2012). Preferensi merupakan kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu. Preferensi juga diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk, barang atau jasa yang dikonsumsi.

Sedangkan Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab mendefinisikan preferensi sebagai kecenderungan untuk memberikan perhatian atau bertindak terhadap orang. Aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan senang atau puas.

Preferensi politik dapat didefinisikan sebagai pilihan tindakan yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini untuk memberikan respon politik yang ada pada diri seseorang. Tindakan politik yang diwujudkan dari nilai-nilai politik yang diyakini seseorang ini menjadi faktor yang sangat menentukan untuk mengarahkan agar merespon situasi (politik) yang dihadapinya. Preferensi politik juga dapat dipengaruhi oleh geografi atau lingkungan.

⁶Dimitriou, C. K & Blum, S. C. *An Exploratory Study of greek Millenials in The Hotel Industry: How Do They Compare to Other Generations? International Journal of Global Business*, (2015) dalam Jurnal Cristiany dkk. *Penggunaan Media Digital dan Partisipasi Politik Generasi Milenial*, hal 7

Meskipun pengaruh keduanya difilter oleh nilai ideologi, agama, kultur, ekonomi dan lainnya. Sebaliknya karakteristik geografi dan lingkungan tadi dapat pula memperkuat kecenderungan pilihan individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi politik seperti keikutsertaan berpolitik, adanya interaksi dengan keluarga maupun di masyarakat, ideologi, serta pengaruh identifikasi partai politik.

Hipotesisi

Hipotesis yang dapat dibuat berdasarkan pemaparan dalam rumusan masalah dan teori adalah sebagai berikut:

2. Hipotesis nul (H_0) adalah pernyataan yang menunjukkan tidak ada perubahan

H_0 : Tidak ada pengaruh antara *Product, Price, Promotion, Dan Place* partai baru terhadap minat pemilih pada pemilu legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2019

2. Hipotesis Penelitian/ Hipotesis alternatif (H_a) adalah pernyataan dari apa yang diharapkan akan terjadi dan bukan dari apa yang diharapkan tidak akan terjadi apa-apa.

H_a : Ada pengaruh antara *Product, Price, Promotion, Dan Place* partai baru terhadap minat pemilih pada pemilu legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2019

C. METODE

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed methods*, dengan menggunakan *sequential explanatory design*. Alasan memilih tipe *sequential explanatory*, karena dengan metode penelitian campuran ini digunakan untuk memperkuat hasil penelitian statistik dengan menganalisis dan mengeksplorasi pandangan-pandangan partisipan yang belum terjawab di kuesioner. Peneliti melakukan wawancara digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat data untuk melengkapi data yang diperoleh peneliti sebelumnya.

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pemilih milenial, yakni masyarakat yang berusia 17-37 tahun, yang ikut dalam Pemilu Legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2019. Penentuan sampel menggunakan pendekatan Arikunto (2010: 174) karena peneliti tidak dapat memprediksi berapa jumlah pemilih milenial di Universitas Lampung. Sampel penelitian ini berjumlah 100 responden mahasiswa Universitas Lampung, dengan tingkat kesalahan 10%.

Karena penelitian ini menggunakan *mixed method* maka pengumpulan data juga menggunakan kombinasi teknik *snowball sampling* dan *purposive sampling*. Teknik ini membantu peneliti untuk mendapatkan data spesifik yang dibutuhkan. Melalui proses bergulir dari satu responden ke responden lainnya yang terdaftar mengisi kuesioner yang disebarkan teknik ini diperoleh 10 informan. Hasil operasionalisasi disajikan **Lampiran 1**.

Teknik Analisis Data

Hipotesis dan data diuji dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji f, uji t dan analisis linear berganda. Sedangkan data kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Validasi data kualitatif triangulasi sumber, dengan membandingkan data dari beberapa sumber.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

***Product, Promotion, Price dan Place* PSI terhadap Preferensi Politik Milenial pada Pemilihan Legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2019**

Political Marketing merupakan proyek identifikasi, perencanaan, implementasi dan kontrol terhadap politik dan program pemilihan. Tujuannya adalah menciptakan, membangun, dan memelihara hubungan antara kandidat dan pemilih yang menguntungkan

guna mencapai *political marketers objective* (Firmanzah, 2012). Untuk menarik minat pemilih, diperlukan strategi yang dikenal dengan nama *mix marketing*, yang terdiri dari empat komponen, yaitu: *product*, *price*, *promotion*, dan *place*.

Pengaruh Variabel *Product* Terhadap Preferensi Politik Milenial

Product utama dari partai politik adalah *platform* partai. *Platform* partai berisi konsep, identitas, ideologi, dan program kerja. Meskipun demikian produk utama partai bukan satu-satunya yang menentukan harga jual partai. Untuk mendapatkan kesan baik dari pemilih partai politik memerlukan *brand* positif kandidat dan tim sukses selama kampanye serta dan *track record* positif partai.

Berdasarkan analisis regresi linear berganda diperoleh hasil bahwa product PSI berpengaruh terhadap preferensi milenial. Bahwa nilai t hitung untuk product sebesar $4,469 >$ nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Maka terdapat pengaruh yang signifikan antara product terhadap preferensi milenial (H_a diterima dan H_o ditolak). Koefisien regresi variabel product 0,633, artinya jika jumlah produk di tambah 1 unit maka preferensi milenial meningkat sebesar 0,633%. Dimana semakin baik product dan platform yang ditawarkan semakin banyak pemilih milenial yang menempatkan preferensinya pada partai PSI.

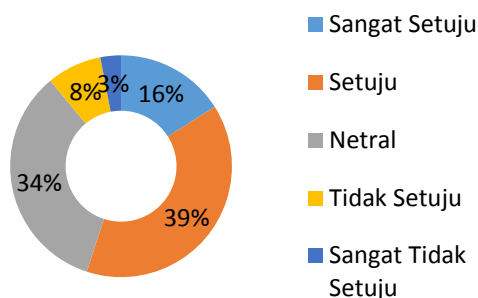
Produk politik, promosi politik, harga politik, dan tempat secara bersama berperan terhadap preferensi milenial. Product yang di tawarkan dalam marketing politik berbeda dengan marketing komersial karena lebih kompleks, dimana pemilih akan menikmatinya setelah partai atau kandidat terpilih. PSI menawarkan perubahan, gagasan tentang masa depan yang lebih baik, kader-kader atau pemimpin yang anti korupsi dan intoleransi serta keterwakilan perempuan dalam politik.

PSI berkeyakinan, partai baru adalah sebuah kebutuhan sekaligus solusi alternatif untuk memutus kepentingan ekonomi politik elit yang telah terjalin dengan sangat kuat dan sering mengalahkan kepentingan masyarakat. Perubahan yang dibawa PSI adalah harapan dan tuntutan kaum milenial sehingga sebagian milenial memiliki ideologi yang sama dengan PSI.

Pada Pemilihan Legislatif 2019 product yang di kemas kandidat PSI berbeda pada setiap Dapil. *Product* yang diberikan PSI sesuai dengan kebutuhan pemilih dan persoalan yang dihadapi pemilih. Pemilih sebelum menempatkan keputusan memilih yang pertama diperhatikan adalah product yang di janjikan partai tersebut.

Track record PSI yang masih baru bagi sebagian responden belum menjadi tolak ukur dalam menempatkan keputusan jatuh kepada PSI. Product yang ditawarkan PSI membangun bangsa, membangun yang tertinggal atau membawa perubahan bagi daerah-daerah dan dianggap baik oleh responden, namun dalam proses PSI menyampaikan product yang akan di tawarkan sebagian kandidat tidak dilakukan secara efisien. Product yang di kemas kandidat PSI berbeda pada setiap Dapil, product kandidat yang diusung PSI tentu tidak selalu sama namun tetap menekankan setiap product yang ditawarkan tetap dalam lingkup visi-misi PSI, seperti pendapat narasumber Rene menyatakan “produk dari kita (PSI) dan produk dari calon yang maju tidak sama dan tidak terlalu berbeda juga, karena setiap produk yang ditawarkan setiap kandidat yang kita usung kita tetap takankan lebih ke visi-misi partai”. Berikut hasil kuesioner pada penelitian ini.

1. Visi misi partai PSI menarik dukungan pemilih



Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0, 2020

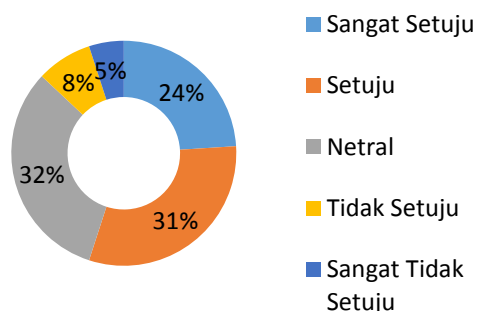
PSI memiliki visi Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat. Visi-misi partai menjadi hal utama penentu preferensi pemilih. Sebaiknya visi-misi tersebut diimplementasikan ke dalam program-program kerja sesuai dengan kebutuhan segmen PSI (generasi milenial).

Janji-janji PSI memerlukan waktu yang Panjang untuk dapat dinikmati. Responden Frs, sebagai salah satu pemilih milenial yang terdaftar pada pemilihan legislatif Kota Bandar Lampung berpendapat bahwa Visi-misi merupakan salah satu dasar yang dilihat sebelum menjatuhkan pilihannya terhadap partai atau kontestan politik, visi-misi berangkat dari permasalahan yang ada maka terbentuklah yang menjadi dasar dan tujuan keberadaan partai seperti yang dinyatakan bahwa “Visi-misi partai PSI menarik, Kalau melihat partai lebih fokus ke visi-misinya. Karena dari visi-misi akan tercermin, bagaimana mereka akan melakukan tugas dan tanggung jawab kedepannya. Dari partai baru PSI yang paling tua yaa. PSI disini menggerakkan milenial dalam dunia politik. dimana milenial harus ikut serta berperan gitu.”

Pemilih ini digolongkan ke pemilih rasional karena lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau kandidat dalam program kerjanya. Responden 37% atau sama dengan 37 orang yang menyetujui bahwa Visi misi dari PSI menarik karena sebagian berpendapat bahwa visi-misi tidak ada yang buruk dan semua visi adalah visi yang membangun.

2. Ideologi partai sesuai dengan ideologi responden

Ideologi adalah aspek yang penting bagi partai karena merupakan sistem keyakinan yang menjadi identitas partai. Milenial menjadi identitas Partai Solidaritas Indonesia.



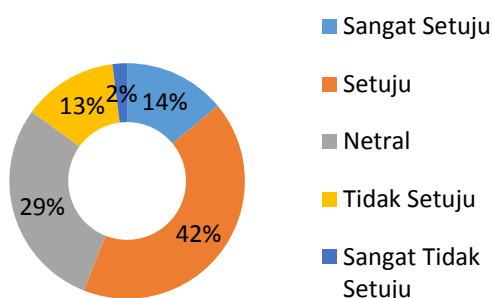
Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0, 2020

Ideologi dan cita-cita tidak selalu menjadi pertimbangan pemilih untuk menentukan calon atau partai yang akan dipilih. Pemilih memilih PSI karena berharap PSI dapat menyelesaikan permasalahan yang ada melalui program kerja PSI. Krisdayanti, dalam wawancara menyatakan bahwa “Ideologi mereka belum terlalu paham sih seperti apa soalnya saya mengenal partai itu sekedar saja jadi untuk membandingkan ideologi saya dengan partai

PSI belum bisa memutuskan sesuai atau tidak dengan ideologi saya, walaupun sebenarnya saya bukan orang yang terlalu memprioritaskan kesamaan ideologi sih, apapun ideologinya pilihan saya hanya jatuh pada partai yang mewakili suara kita dan cara mereka dalam menyelesaikan masalah yang ada sekarang ini.”

Pemilih ini digolongkan sebagai pemilih rasional. Ciri dari pemilih rasional adalah tidak mementingkan spektrum ideologi partai atau kandidat. Pemilih rasional berorientasi pada “*policy-problem-solving*” dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Responden 32% atau 32 responden memilih netral dan selisi satu dengan memilih setuju. Responden merasa kesamaan ideologi dari PSI dan ideologi responden masih netral tidak terlalu di permasalahan dan bahkan sesuai dengan ideologi PSI.

3. Rekam jejak partai PSI menarik



Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0, 2020

Melalui kampanye, PSI menawarkan kebaruan yang tidak diberikan oleh partai-partai yang telah ada sebelumnya. Calon legislatif di partai baru menjadi dua beban di satu pundak menuntut bekerja lebih extra dari partai-partai lama yang memiliki elektabilitas tinggi.

PSI berawal dari kumpulan-kumpulan dan kesamaan misi untuk memperbaiki budaya politik di tanah air dengan menonjolkan identitas milenial hingga proses rekrutmen dilakukan dengan ketat. PSI sebagai partainya milenial menonjolkan partai yang bebas dari KKN hingga saat ini namun track record dari PSI belum terlihat nyata, seperti argumen William menyatakan “Rekam jejak PSI masih menarik yaa, karena menariknya justru di rekam jejaknya yang berjuang keras hingga jebol ke senayan meskipun tidak jebol di Legislatif Bandar Lampung. Sebenarnya rekam jejak dari PSI masih pendek karena masih baru, hanya saja pengenalan partainya lumayan menarik menurut saya”

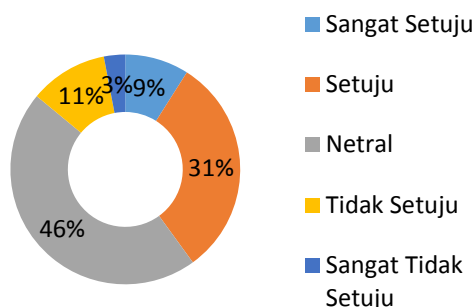
Rekam jejak PSI yang masih pendek menjadi salah satu pertimbangan segmen dalam memutuskan pilihan. Hasil kuesioner yang di sebarakan ada 42% atau 42 responden yang memilih rekam jejak dari PSI menarik dilihat dari cara PSI yang menonjolkan identitas milenial hingga keterwakilan perempuan dalam politik. Namun sebagian responden yang memilih tidak setuju adalah responden yang tidak terlalu mengenal PSI lebih dalam namun hanya sekedar tahu, sehingga tidak memiliki ketertarikan dengan PSI.

4. Partai PSI bebas dari kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Data dari KPU menyatakan PSI sebagai salah satu partai politik yang bebas dari caleg eks napi korupsi dari tiga partai lain yaitu PKB, NasDem, dan PPP.⁷ Dalam kasus korupsi merupakan masalah yang tidak pernah dapat diselesaikan. Responden ada 46% atau 46 responden memilih netral karena pelaku politik terjerat KKN menjadi hal yang wajar bagi para responden, PSI bebas dari KKN belum bisa dinilai oleh responden seperti argumen

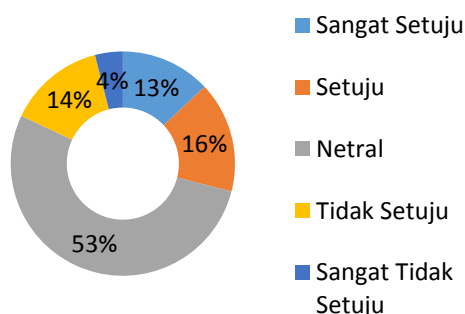
⁷Tsarina M, Bebas Caleg Eks Koruptor, PSI: Langkah Kami Diikuti Parpol Senior, <https://m.detik.com> Kamis, 31 Januari 2019 I 12:38 WIB

Lenny, menyatakan “PSI bebas dari KKN menurutku belum bisa dinilai yaa karena PSI masih partai baru”. Namun hingga pada saat ini PSI belum terdengar terjerat KKN.



Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0, 2020

5. Partai PSI tegas dan konsisten dalam memerangi KKN



Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0, 2020

Tegas dalam memerangi KKN merupakan harapan setiap pemilih. Para pelaku politik harus memiliki rekam jejak yang baik salah satunya bebas dari KKN dan tegas untuk memerangi KKN. Namun PSI sebagai partai baru belum bisa dinilai ketegasannya dalam memerangi KKN, karena dari calon yang diusung PSI tidak ada yang lolos ke parlemen. Deni, dalam wawancara menyatakan bahwa “Tegas atau tidaknya dalam memerangi KKN belum tahu ya, karena ini masih partai baru dan juga belum terlalu mendekatkan kepada masyarakat jadi saya kurang paham mereka tegas atau tidaknya.”

Sebagai partai milenial PSI tetap komitmen pada semangat anti korupsi dan anti intoleransi. PSI bertekad memerangi korupsi. Dapat dilihat dari kader-kader partai yang bebas dari narapidana korupsi. Hasil kuesioner yang disebarkan ada 53% atau 53 responden yang memilih netral, sebagian responden menilai PSI belum dapat dinilai tegas atau tidaknya dalam memerangi KKN.

Pengaruh Variabel *Promotion* Terhadap Preferensi Politik Milenial

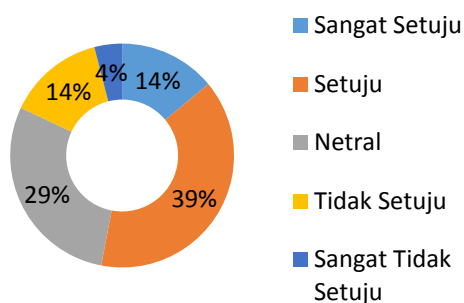
Media sosial telah menjadi kebutuhan masyarakat. Media sosial menyediakan informasi secara praktis, bebas, mudah, dan murah. PSI memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi alternatif dalam kampanye politik untuk memenangkan pemilu.

Kader-kader PSI yang diisi oleh kaum-kaum milenial dan kreatifitas sebagai salah satu modal andalan PSI ditengah-tengah media sosial didominasi generasi milenial dalam data APJII menyatakan masyarakat kelompok usia 19-34 tahun sejumlah 49,52%, kelompok usia 13-18 tahun (16,68%) dan sisanya kelompok usia 35 tahun ke atas. Sebagian PSI memanfaatkan media sosial karena dinilai lebih efektif digunakan untuk menyampaikan ide,

gagasan, baik product PSI karena masifnya pengguna media sosial sehingga dapat menjangkau khalayak terutama milenial.

1. Iklan kampanye kandidat partai PSI di berbagai media massa membantu pemilih mengenal kandidat

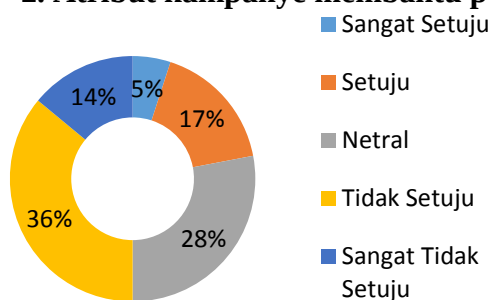
Media adalah salah satu alternatif partai dalam mengambil kesempatan untuk melakukan promosi produknya untuk beriklan di media televisi yang bertujuan supaya produk politiknya dikenal khalayak luas. PSI menjadi yang paling banyak muncul dengan 1.277 iklan. Menarik perhatian milenial yang identik dengan teknologi, PSI dengan iklan versi absuk sebagai strategi untuk mencitrakan diri. Media sosial yang digunakan untuk menyampaikan produk PSI Kota Bandar Lampung meliputi *facebook, instagram, twitter* dan *youtobe*. Namun promosi ini belum dilakukan secara efisien oleh PSI.



Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0, 2020

PSI di Kota Bandar Lampung tidak semeriah tingkat Nasional, sebagian calon masih belum memanfaatkan media sosial sebaik tingkat Nasional. Firsta, dalam wawancara menyatakan bahwa "Dari iklan kampanye sangat membantu untuk mengenal mereka gitukan. Kalau mereka tidak menunjukkan mereka melalui kampanye atau iklan bagaimana orang bakalan tau tentang mereka. Apalagi PSI ini sangat aktifkan dalam menunjukkan dirinya, menunjukkan eksistensinya dalam media sosial. Karena orang-orang sekarang kan udah pakai gadget, memakai Hp, terus berkaitan dengan media dan PSI yang saya lihat sangat memanfaatkan itu. Namun iklan kampanye yang di Bandar Lampung tidak ada menurut saya jadi sangat disayangkan ketika mereka tidak semeriah PSI tingkat Nasional."

2. Atribut kampanye membantu pemilih untuk mengenal kandidat partai PSI

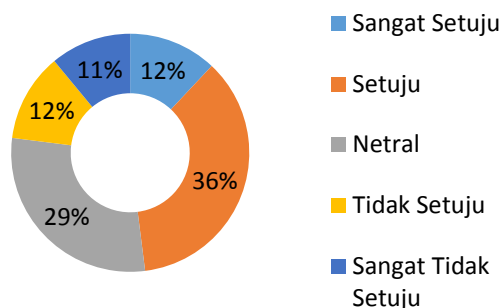


Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0, 2020

Atribut kampanye salah satu alternatif pelaku politik dalam memperkenalkan identitasnya. Namun atribut kampanye dari PSI masih kurang efisien dilakukan. Lenny dalam wawancara menyatakan: "Apalagi atributnya ya sampai sekarang ini saya belum dapat kartu nama atau apapun itu jadi menurut saya sosialisasinya kurang." Atribut yang digunakan PSI Kota Bandar Lampung meliputi baliho-baliho, kartu nama, kalender, kaos dan banner

guna mempermudah pemilih dalam mengenal kandidat. Namun promosi ini belum dilakukan secara efisien oleh PSI.

3. Keikutsertaan kandidat partai PSI dalam acara debat menarik dukungan yang lebih banyak dari pemilih



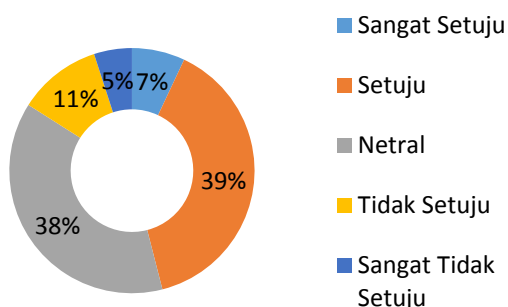
Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0, 2020

Sebagian responden ada 36% atau 36 responden memilih keikutsertaan PSI dalam acara-acara debat menarik, namun kesalahan disini responden menilai PSI secara Nasional. Responden yang memilih tidak setuju adalah responden yang menyadari kurangnya keikutsertaan PSI dalam acara-acara debat.

Kandidat PSI jarang ditemui responden mengikuti acara debat, namun sebagian responden lebih mengetahui debat-debat yang dilaksanakan PSI secara Nasional di Pusat. Sebagian kandidat dari PSI di Kota Bandar Lampung sangat di sayangkan tidak terlalu tersorot baik dalam acara debat masih tidak efisien di lakukan seperti pendapat Siti, menyatakan “Nah, sebelum memilih saya menonton dulu acara-acara debat gitu dan itu sangat mempengaruhi juga bagi saya, karena bisa di nilai bagaimana cara menjawabnya, wawasannya dan bagaimana sifat kesopanannya gitu. Tetapi kembali lagi jika PSI yang disini saya tidak pernah melihat apakah mereka juga seperti PSI secara Nasional gitu”.

4. Promosi Produk PSI tersampaikan melalui komunikasi kampanye PSI

Harus disadari bahwa hubungan antara partai dengan pemilih adalah hubungan jangka panjang. Partai politik yang melakukan kampanye sangat memerhatikan komunikasinya agar pesan tersampaikan kepada pemilih. Pesan komunikasi politik PSI menekankan pada muatan “milenial”, “anti korupsi” dan “anti intoleransi” yang dibungkus dalam gaya komunikasi anak muda atau generasi milenial. Sebagian responden ada 39% atau 39 responden memilih promosi produk PSI tersampaikan melalui komunikasi kampanye yang dilakukan PSI baik melalui media elektronik atau media massa.

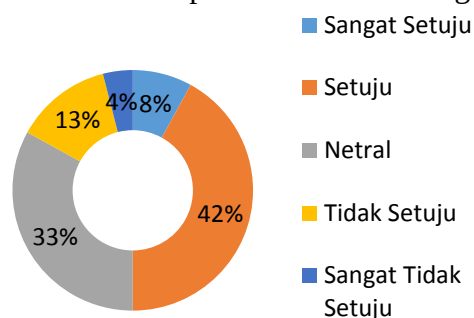


Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0, 2020

Produk PSI tidak sampai kepada responden karena sebagian dari PSI dalam kampanye melalui media elektronik belum dilakukan secara efisien dan sebagian responden tidak terlalu tertarik dengan politik atau dengan partai PSI seperti pendapat Christofora menyatakan “ Produk PSI tidak sampai kepada saya karena saya juga kurang gitu terhadap politik jadi hanya mengenal sekilas aja begitu ada partai PSI ini dan partai lama”.

5. Iklan kampanye PSI menarik perhatian pemilih

Produk partai dikemas sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan segmen PSI sebelum mempromosikan produk melakukan kampanye melalui media massa. Media sosial lebih dioptimalkan dan di manfaatkan sebagai sarana mempromosikan mereka kepada masyarakat luas terutama pemilih milenial dengan tipe kampanye milenial.



Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0, 2020

Sebagian besar pemilih menilai bahwa iklan dari PSI Kota Bandar Lampung masih kurang menarik berbeda dengan iklan kampanye PSI tingkat nasional memiliki promosi mudah diingat dan dikenal oleh kaum milenial. Desti, dalam wawancara menyatakan: “Iklan kampanye dari mereka cukup menarik secara Nasional yaa, kalau yang disini masih kurangnya begitu.”

Pengaruh Variabel *Price* Terhadap Preferensi Politik Milenial

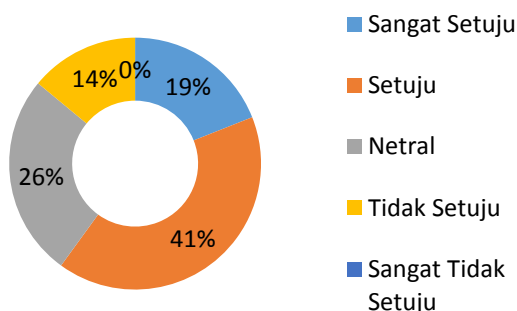
Price yang dipakai dalam penelitian ini adalah harga psikologi misalnya, pemilih merasa nyaman dengan latar belakang etnis, agama, pendidikan hingga kandidat yang memiliki nasionalisme tinggi. Sebagian responden memilih netral, memiliki kesamaan suku/etnis atau agama dengan kontestan tertentu secara naluri responden memiliki kebanggaan tersendiri terhadap kandidat tertentu. Namun kesamaan responden dengan kandidat tertentu bukan menjadi prioritas responden dan lebih memprioritaskan program kerja PSI dan track record yang baik seperti pendapat Desti menyatakan “kesamaan suku/etnis tidak terlalu saya pertimbangkan dan agama menurut saya masih saya pertimbangkan namun saya tetap melihat program kerja dari mereka juga seperti itu”.

Generasi milenial memiliki karakteristik tersendiri. Keinginan untuk membuat dunia lebih baik menjadi harapan generasi milenial sehingga ketika ada kontestan memiliki kesamaan suku/etnis atau agama dengan milenial tidak menjadi pertimbangan dalam memutuskan pilihannya. Generasi ini menuntut pemimpin yang berbeda dengan pemimpin yang dirisakan buruk oleh milenial, citra buruk politik yang di bangun milenial atas dasar pandangan terhadap permasalahan-permasalahan partai politik seperti banyaknya kasus KKN, buruknya manajemen partai dst.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukka bahwa *price* PSI tidak berpengaruh terhadap preferensi milenial. Tanggapan responden tentang *price* (harga) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan partai atau kontestan, kesamaan latar belakang agama, kesamaan etnis/suku, kontestan yang memiliki tingkat nasionalisme tinggi, serta kontestan akan

menumbuhkan partisipasi milenial dalam politik. Hal ini tidak berdampak besar atau kurang mempengaruhi preferensi milenial.

1. Latar belakang pendidikan PSI menjadi pertimbangan saya dalam memilih kandidat

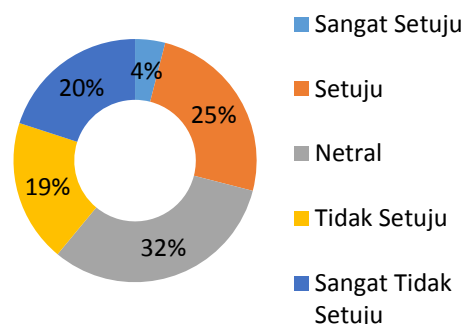


Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0, 2020

Pendidikan kandidat salah satu pertimbangan pemilih untuk menempatkan preferensinya. Bagi pemilih partai atau kandidat yang diusung memiliki pendidikan yang baik akan menjadi pemimpin yang baik seperti yang disampaikan responden Siti dalam wawancara menyatakan bahwa “Latar belakang pendidikan itu penting ya, menurut saya kenapa pendidikan jadi latar belakang karena semakin kita berpendidikan semakin banyak informasi, semakin banyak pengetahuan gitu, bukan membandingkan sama orang yang kurang berpendidikan yaa. Karena menurut saya untuk menjadi seorang pemimpin itu menurut saya ya bukan harus berpendidikan S1 atau S2 gitu, karena pendidikan tidak harus diambil dari kuliah bisa dari yang lainnya juga gitu dan intinya pentinglah pendidikan itu untuk latar belakang mereka gitu.”

Pemilih digolongkan sebagai pemilih rasional jika memilih berdasarkan etika, realitas, agama, estetika, dan kesukaan dan berdasarkan moralitas tujuan, yang sesuai dengan tujuan akhir. Sebagian responden ada 40% atau 40 responden mempertimbangkan pendidikan kandidat PSI maupun partai lainnya. Memiliki pendidikan akan mencerminkan kandidat dalam merancang platform yang akan di kembangkan, responden melihat kandidat yang berpendidikan adalah kandidat yang memiliki wawasan yang luas dan memiliki sifat Nasionalisme tinggi.

2. Saya merasa nyaman dengan kandidat tertentu karena kesamaan suku/etnis

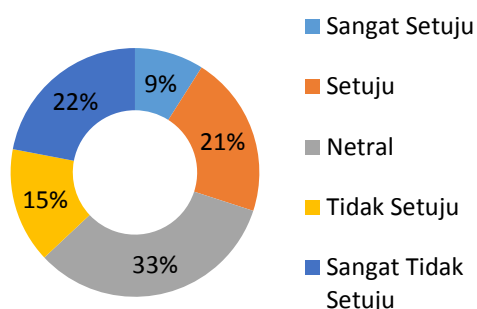


Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0, 2020

Ketika warna politik identitas semakin mengemuka elit politik atau konstantan akan bertarung dan menjadikan kesamaan etnis sebagai acuan. Setiap pemilih memiliki kriteria

masing-masing dalam memilih. Namun, sebagaimana pemilih menyampaikan bahwa kesamaan suku/etnis tidak menjadi pertimbangan dalam memilih seperti yang disampaikan Deni, dalam wawancara menyatakan “Kesamaan suku/etnis tidak menjadi pertimbangan saya dalam memilih, namun yang terpenting latar belakang atau rekam jejaknya bagus dan bisa membuat masyarakat percaya untuk memberikan amanat ke mereka saya memilihnya gitu.” Ada 32% atau 32 responden memilih netral, kesamaan suku/etnis tidak menjadi salah satu pertimbangan responden tetapi lebih fokus ke program kerja dari PSI maupun partai lain.

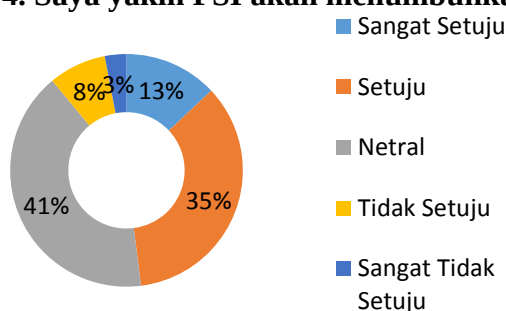
3. Saya merasa nyaman dengan kandidat tertentu karena kesamaan latar belakang agama



Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0, 2020

Memilih karena kesamaan agama sesuatu hal yang tidak lazim lagi, namun ada 33% atau 33 responden yang memiliki nilai tinggi lebih memilih netral, karena memiliki kesamaan secara naluri sebagian masih ada bagi reponden maupun pemilih namun tidak telalu memprioritaskan kesamaan agama dalam mengambil keputusan seperti pendapat Desti menyatakan “Kesamaan agama menurut saya masih saya pertimbangkan sih namun tetap melihat program kerja dari mereka juga seperti itu”. Kampanye yang dilakukan PSI dan menonjolkan identitas partai menjadi salah satu kekuatan dalam menggaet segmen PSI, namun pada identitas keagamaan tidak terlalu disoroti oleh PSI begitu juga dengan segmen yang memilih lebih netral.

4. Saya yakin PSI akan menumbuhkan partisipasi milenial dalam politik

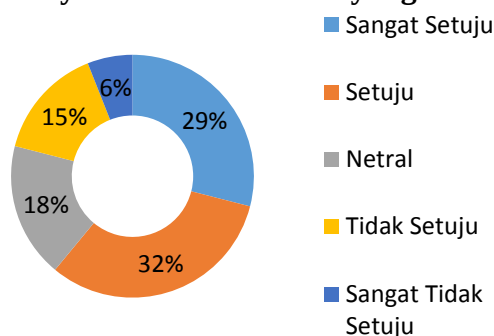


Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0, 2020

Partai Solidaritas Indonesia yang disebut partainya milenial lahir untuk menargetkan milenial ikut berperan dalam politik dimulai dari program-program membuat milenial ikut berperan. Dimulai dari PSI yang di isi generasi milenial sudah membantu milenial ikut berperan dalam politik, baik ikut dalam partai, kandidat maupun ikut memilih. Namun ada 41% atau 41 responden yang menilai bahwa adanya PSI belum sepenuhnya dapat dapat menumbuhkan partisipasi milenial meskipun sebagian milenial sudah ikut berperan seperti pendapat Lenny menyatakan “Ada dua kaca mata yang harus kita pakai jika mengukur ini

sih. Dengan lahirnya partai milenial bisa meumbuhkan partisipasi kita anak-anak milenial tapi bisa juga tidak, karena jika mereka ada cuman karena ada maunya saja. Tetapi dari kaca mata saya belum tentu”. Sebagian reponden ada 35% atau 35 responden memilih dapat menumbuhkan partisipasi milenial karena dengan cara PSI baik dalam perekrutan ataupun dalam kampanye dengan ide-ide kreatif oleh PSI.

5. Saya memilih kandidat yang memiliki tingkat nasionalisme tinggi



Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0, 2020

Pemilih lebih memilih calon yang diusung partai memiliki integritas terutama memiliki tingkat kesadaran Nasional sama seperti pendapat William dalam wawancara dengan peneliti menyatakan “Saya lebih memilih kandidat yang memiliki nasionalisme tinggi. Karena nasionalismenya tidak tinggi jadi performance-performance nanti dari hasil kinerjanya dia tidak dari dasar negara kita ya seperti Pancasila atau UUD gitu”

Partai atau kandidat yang memiliki nasionalisme tinggi, sangat peduli dengan bangsanya dan cinta Tanah Air memengaruhi preferensi politik pemilih. Memiliki sikap nasionalisme yang tinggi adalah harapan semua pemilih terkhusus segmen PSI yaitu generasi milenial. Responden ada 32% atau 32 responden yang menilai bahwa PSI memiliki sikap Nasionalisme. Cinta tanah air, anti korupsi dan intoleran menjadi visi PSI sejak terbentuknya partai dan sebagai partai baru, partai yang masih dalam semangat yang berkobar-kobar menjadi tersorot bagi para segmen PSI.

Pengaruh Variabel Place Terhadap Preferensi Politik Milenial

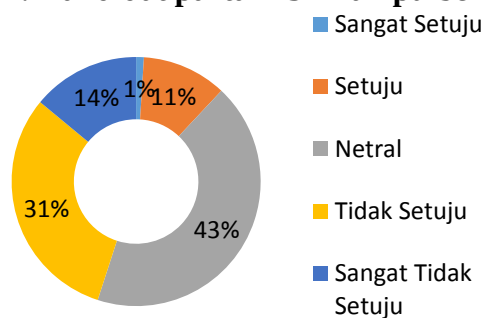
Sistem distribusi merupakan aliran produk politik kepada pemilih dan merupakan jaringan yang berisi orang dan institusi (O, Shaughnessy, 1995). Sistem ini terkait dengan mekanisme jangkauan dan penetrasi produk politik. Sistem distribusi yang baik membuat produk politik dapat dirasakan dan diakses oleh pemilih dengan lebih mudah.

Salah satu kegagalan PSI dalam meraih suara sebanyak-banyaknya adalah PSI kurang menyentuh segenap lapisan masyarakat. Segmen PSI bukan hanya milenial saja namun pemilih-pemilih senior atau khalayak. Sebagian responden menilai kandidat yang melakukan kunjungan langsung akan membantu pemilih lebih mengenal kandidat. Melakukan interaksi dan melakukan komunikasi beberapa kali dengan kandidat secara langsung, pemilih akan lebih mudah mengetahui karakter atau sifat kandidat tersebut, ketika kandidat dinilai memiliki karakter yang baik maka akan lebih memicu pemilih untuk menempatkan pilihannya kepada kandidat tersebut. Dampak dari adanya kunjungan dapat membantu kandidat untuk memahami harapan dan tuntutan segmen.

PSI Kota Bandar Lampung dalam mempromosikan partainya masih sama seperti pada umumnya. Kampanye dilakukan melalui media sosial dan sebagai alat peraga partai lebih unggul di kartu nama. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa *place* PSI tidak berpengaruh terhadap preferensi milenial. Produk PSI kurang didistribusikan melalui

media dan hadir di daerah-daerah dan bertatap muka secara langsung dengan masyarakat masih kurang dilaksanakan. Pendapat responden tentang kunjungan-kunjungan dari partai belum maksimal sehingga kebanyakan responden menjawab kurangnya kunjungan dari PSI. Tempat pemasaran politik yang dilakukan calon legislatif yang diusung PSI sesuai dengan segmen PSI belum terlaksana. Milenial yang ada di Bandar Lampung tersebar luas sehingga sulit bagi PSI untuk lihat tempat strategis untuk tempat pemasaran yang sesuai dengan segmen (milenial).

1. Kandidat partai PSI mampu berkontribusi untuk daerah tempat tinggalnya

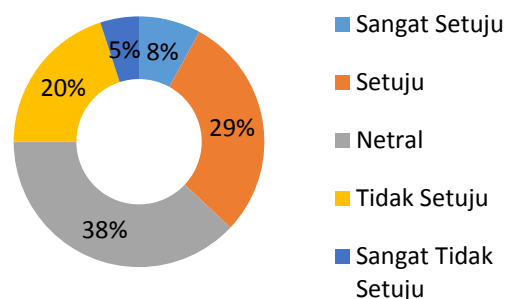


Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0, 2020

Meningkatnya persaingan baik di kota maupun di daerah, membuat para calon yang diusung partai berlomba-lomba menarik perhatian khalayak dalam memenangkan Pemilihan. Meraih suara sebanyak-banyaknya menjadi target setiap partai terlebih partai PSI yang ingin memberi perubahan dalam setiap daerah. Responden menilai PSI memiliki kelemahan masing-masing perdapil, sebagian partai kurang dalam promosi kampanye dan sebagian kurang turun lapangan.

Responden menilai bahwa berkontribusi dalam tempat tinggalnya belum terlihat oleh reponden dan menilai PSI masih sangat kurang di lapangan. Berkontribusi dalam tempat tinggal menjadi salah satu membantu kandidat menaikkan popularitas dan menjadi salah satu bentuk bahwa kandidat layak di pilih dimulai dari kandidat mampu berkontribusi terhadap daerah tempat tinggalnya. Ada 43% atau 43 responden melihat bahwa kandidat dari PSI tidak berkontribusi terhadap daerah tempat tinggal kandidat PSI.

2. Penyebaran tim sukses kandidat partai PSI merata diberbagai tempat

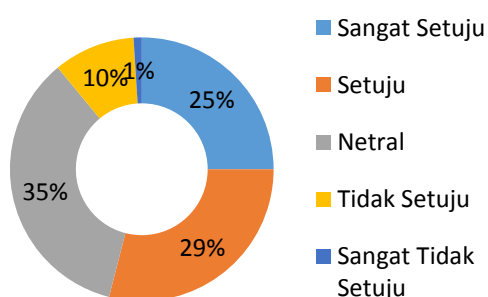


Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0, 2020

Timsukses biasanya mengedepankan visi dan misi orang yang didukung. Hal ini menunjukkan bahwa tim sukses yang membantu memperkenalkan kontestan dan kinerjanya kepada pemilih. Namun di daerah Labuhan Dalam daerah pemilih tidak ada tim sukses.

Sejalan dengan hal ini Desti menyatakan: “Saya juga kurang tahu juga ya ada atau tidaknya tim sukses di daerah saya karena saya tidak pernah ketemu juga dengan mereka, namun belum tentu tidak ada ya”. Partai dan tim sukses perlu Menyusun strategi agar dapat memaksimalkan manfaat kampanye politik di media sosial yang tidak melanggar aturan. Salah satunya adalah dengan membuat konten yang menarik pemilih sesuai segmen yang ditetapkan oleh PSI.

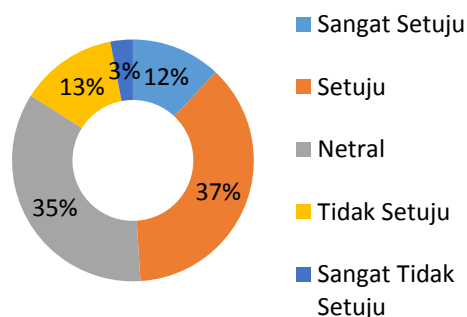
2. Kunjungan partai PSI ke daerah akan membawa pengaruh bagi suara pemilih



Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0, 2020

Sebanyak 35 responden menjawab netral/ ragu-ragu dari 100 responden yang diajukan pertanyaan. Hal ini menunjukkan kunjungan partai atau kandidat yang diusung memang perlu namun tidak hanya sekedar kunjungan namun dapat membawa pengaruh baik untuk kemajuan daerah. Namun kunjungan PSI di daerah pemilih masih kurang melakukan sosialisasi bahkan sama sekali tidak melakukan sosialisasi. Oleh karena itu, masih banyak pemilih yang tidak kenal secara langsung atau tidak langsung dengan calon yang diusung PSI.

4. Kunjungan kandidat ke organisasi masyarakat akan membawa pengaruh bagi suara pemilih



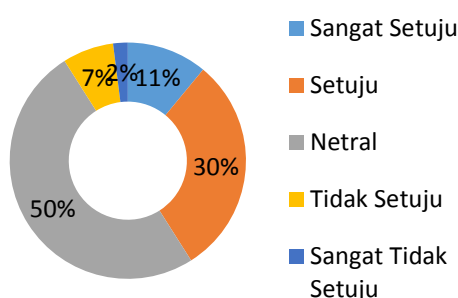
Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0, 2020

Kampanye politik harus lebih bisa menyentuh segenap lapisan masyarakat, promosi yang dilakukan melalui media masih belum cukup untuk mendorong preferensi pemilih. Maka, partai atau kontestan perlu lebih meningkatkan kunjungan-kunjungan ke tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pun tokoh pemuda. Reponden dominan memilih setuju karena responden menilai bahwa kunjungan ke organisasi-organisasi akan membantu kandidat dalam meraih suara sebanyak-banyaknya namun bisa saja kecil harapan dalam meraih suara dari organisasi-organisasi masyarakat. Christofora dalam wawancara menyatakan “Kunjungan

PSI ke organisasi menurut pribadi saya belum tentu membawa pengaruh bagi suara pemilih”. PSI masih ada yang kurang dalam melakukan kunjungan baik kunjungan ke organisasi masyarakat, namun sebagian kandidat melakukan kunjungan ke organisasi masyarakat.

5. Kunjungan –kunjungan kandidat partai PSI menambah tingkat kepercayaan pemilih

Memulai membangun relasi dengan masyarakat akan membantu segmen dalam menilai kandidat apakah layak untuk dipilih seperti pendapat Deni menyatakan “Kunjungan-kunjungan sebenarnya akan dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan pemilih termasuk saya, kalau misalnya dikunjungi, dikenalkan ataupun untuk sekedar memberitahu gitu apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka perbuat gitu dengan visi-misinya, dengan kualitas kandidat, tetapi sampai saat ini belum ada yang berkunjung ke daerah ataupun ketempat saya gitu”. Kurangnya PSI dalam menyentuh lapisan masyarakat menjadi kegagalan PSI dalam memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Ada 50% atau 50 responden menilai bahwa PSI masih kurang dalam hal kunjungan.



Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25.0, 2020

PENGARUH VARIABEL PRODUCT, PROMOTION, PRICE DAN PLACE TERHADAP PREFERENSI POLITIK GENERASI MILENIAL

Bauran marketing politik PSI sangat rendah di mana hanya produk yang berpengaruh signifikan terhadap preferensi milenial dengan koefisien regresi variabel produk 0,633 artinya jika produk ditambah 1 unit atau semakin baik dan semakin banyak maka preferensi milenial meningkat sebesar 0,633%. Sebagaimana dalam marketing komersial, konsep *product* Firmansyah menunjukkan bahwa pemilih baru menikmati setelah partai atau calon yang didukungnya terpilih. Product yang disampaikan PSI sama dengan produk partai pada umumnya yaitu untuk memberi solusi permasalahan yang ada di masyarakat menawarkan perubahan gagasan tentang masa depan yang lebih baik, kader-kader atau pemimpin yang anti korupsi dan intoleransi serta keterwakilan perempuan dalam politik. Berdasarkan hasil temuan di lapangan rata-rata 55% responden menanggapi bahwa produk dari PSI baik sama seperti partai lainnya. Dari hasil wawancara dengan pengurus PSI juga mendapat jawaban yang positif terhadap produk PSI serta produk dari setiap kandidat yang diusung PSI.

Pada konsep *promotion* oleh Firmansyah membahas cara sebuah partai atau dalam mempromosikan ide, *platform* partai, dan ideologi dalam pemilu. Firmansyah juga mengatakan bahwa *promotion* ini tidak hanya dilakukan semasa periode kampanye saja namun dilakukan secara permanen agar mendapat pengaruh yang lebih kuat. Hasil analisis regresi linear berganda bahwa *promotion* ini tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi politik milenial dengan koefisien regresi 0,297. Temuan di lapangan sebagian dari caleg PSI tidak melakukan kampanye berbasis teknologi seperti yang dilakukan PSI secara nasional, PSI di

Bandar Lampung ini tidak souphoria PSI Pusat sehingga responden rata-rata 48% hanya mengenal atau mengetahui secara nasional melalui promosi yang dilakukan. Wawancara dengan pengurus PSI menyatakan bahwa sebagian caleg melakukan pendekatan secara konvensional seperti pendekatan antara keluarga. Namun, wawancara dengan caleg dapil 2, pada kampanye yang dilakukan berbasis teknologi dan hanya menjangkau pemilih di dapil 2 saja.

Pada konsep price menurut Firmanzah meliputi aspek yang sangat luas, mulai dari aspek ekonomi, psikologi, hingga aspek citra Nasional. Penelitian ini hanya fokus pada psikologi sampai ke citra Nasional saja, psikologi merupakan kenyamanan pemilih terhadap latar belakang kandidat atau partai dan citra Nasional adalah partai atau kandidat yang memiliki image dan tingkat Nasionalisme yang tinggi. Temuan di lapangan 30% rata-rata responden memilih netral, kesamaan latar belakang dengan kandidat bukan menjadi prioritas mendukung hal itu hasil wawancara PSI menyatakan bahwa PSI tidak terlalu memprioritaskan Suku/etnis, Agama dan lainnya dalam mengusung kandidat, dikarenakan PSI lebih memprioritaskan program kerjanya. Terkait image PSI, masih belum ada tokoh Sentral yang dapat mempengaruhi khalayak. Dalam mengusung caleg pada pemilihan pertamanya PSI mengalami kegagalan diawali dari mengusung kandidat partai yang masih kurang berpengaruh di masyarakat.

Pada konsep place oleh Firmanzah kampanye politik bertujuan agar mendapatkan perhatian dari semua pemilih untuk mempermudah partai dalam melihat Harapan, tuntutan dan permasalahan yang ada di masyarakat dan dapat mendistribusikan produk politik kepada masyarakat luas melalui jaringan jaringannya. Temuan di lapangan sebagian PSI tidak turun lapangan, 41% responden menyatakan bahwa lebih baiknya jika PSI turun kelapangan membantu responden mengenalkan diri lebih dekat. Sebagai responden lainnya menyatakan bahwa caleg dari PSI tidak dikenali oleh responden, mendukung hal itu hasil wawancara dengan PSI menyatakan bahwa pendekatan yang dilakukan belum totalitas. Sebagian dari caleg hanya melakukan kampanye konvensional saja dengan pendekatan kekeluargaan. Selain *promotion*, *price* dan *place* PSI belum maksimal dilakukan oleh PSI untuk menarik perhatian segmen pemilih. Faktor penyebab PSI mengalami kegagalan lainnya yang berasal dari internal dan eksternal partai.

E. SIMPULAN

Tidak semua variabel *mix marketing* politik berpengaruh terhadap preferensi generasi milenial. Hanya variabel *product* yang berpengaruh karena produk PSI masih selaras dengan milenial untuk membangun dan membawa perubahan dengan platform anti korupsi dan intoleransi. Namun variabel *promotion*, *price* dan *place* tidak berpengaruh pada preferensi politik generasi milenial. PSI masih belum memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi kampanye secara efisien. Sedangkan harga yang merupakan image kandidat masih belum terlihat oleh para milenial, dan kunjungan-kunjungan PSI kurang menyentuh segenap lapisan masyarakat.

Faktor lain yang menjadi kegagalan PSI tidak bisa menyumbangkan perwakilan di Legislatif berasal dari internal dan eksternal partai. Faktor internal terdiri dari empat, yaitu pertama, kurangnya kapasitas ketokohan yang dimiliki calon-calon yang disung PSI. Kedua, strategi penempatan calon tidak sesuai pada tempatnya. Ketiga, minimnya penggunaan atribut kampanye di tempat-tempat strategis. Keempat, sosialisasi yang dilakukan PSI begitu minim menyebabkan segmen tidak mengenali sebagian calon-calon yang diusung PSI. Selanjutnya faktor eksternal yaitu, masih banyak masyarakat yang lebih memilih calon yang melakukan politik transaksional.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Firmansyah. 2012. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Dimitriou, C. K & Blum, S. C. *An Exploratory Study of greek Millenials in The Hotel Industry: How Do They Compare to Other Generations?* International Journal of Global Business, (2015) dalam Jurnal Cristiany dkk. *Penggunaan Media Digital dan Partisipasi Politik Generasi Milenial*, hal 7
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Gumay, Hadar Navis. *Parliamentary Threshold Lebih Efektif Menjaring Parpol Berkualitas* (online). <http://www.hukumonline.com>, 2 Desember 2014.
- Kompas.com, PSI, Grace Natalie dan Citra Partai Anak Muda”, 22 Februari 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/12132451/psi-grace-natalie-dan-citra-partai-anak-muda>, diakses pada 30 September 2018.
- Kotler P. 2012. *Marketing Management*. Millenium Edition North Western University. New Jersey (US): Prentice Hall Inc.
- Tsarina M, Bebas Caleg Eks Koruptor, PSI: Langkah Kami Diikuti Parpol Senior, <https://m.detik.com> Kamis, 31 Januari 2019 I 12:38 WIB
- PSI. 2016 .<https://psi.id/>. Diakses pada 12 Oktober 2019

ARTICLE



Evaluasi Dana Desa Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Potret Setengah Dasawarsa Penyelenggaraan Dana Desa)

Aprilia Lestari¹, Alip Susilowati Utama

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Baturaja, Ogan Komering Ulu, Indonesia

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Baturaja, Ogan Komering Ulu, Indonesia

How to cite:

Lestari, A. & Utama, A. S. (2021). Evaluasi Dana Desa Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Potret Setengah Dasawarsa Penyelenggaraan Dana Desa). *Journal of Government and Social Issues (JGSI)*, 1(1), 56-64.

Article History

Dikirim: 21 Oktober, 2021;
 Diterima: 14 Desember, 2021;
 Dipublikasi: 31 Desember, 2021;

Kata Kunci:

Covid-19
 Partisipasi Masyarakat
 Pemilihan
 Protokol kesehatan
 Strategi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah dilaksanakan selama setengah dekade. Meninjau sejauh mana peningkatan kualitas pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ekonomi masyarakat dan desa. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, mengingat begitu banyak data yang perlu digali lebih dalam untuk menjawab tujuan penelitian. Dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi data lapangan dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan dana desa belum mampu menjadi solusi dalam permasalahan pemerintahan di desa. Dalam hal pelayanan publik misalnya, masih banyak desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang belum memiliki kantor desa sehingga pelayanan mengalami banyak kendala dari segi waktu dan fasilitas. Selain itu, dilihat dari aspek pengentasan kemiskinan, pelaksanaan dana desa belum mampu merumuskan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada program pengentasan kemiskinan. Dana desa juga belum menyentuh perkembangan Badan Usaha Milik Desa secara maksimal sehingga perekonomian desa di Kabupaten OKU belum berkembang, desa tidak memiliki sumber Pendapatan Asli Desa secara mandiri. Dilihat dari beberapa fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa dana desa di Kabupaten OKU belum mencapai hasil yang diharapkan dalam setengah waktu pelaksanaannya. Dianggap perlu bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di desa mengenai penggunaan dana desa untuk mencapai optimalisasi kinerja dana desa agar sesuai dengan cita-cita kebijakan.

Keywords:

village funds
 public services
 poverty alleviation
 community development
 empowerment

ABSTRACT

This research aims to find out the effectiveness of the use of village funds in Ogan Komering Ulu Regency, after being implemented for half a decade. Reviewing the extent of improving the quality of public services, poverty alleviation, and strengthening the economy of communities and villages. This research was conducted qualitatively, considering that there were so many data that needed to be explored in more depth to answer the purpose of the research. With interview methods, observations, and field data documentation are collected. The results of research showed that the existence of village funds has not been able to be a solution in the problem of government in the village. In terms of public services, for example, there

are still many villages in Ogan Komering Ulu Regency (OKU) that do not have village offices so that services experience many obstacles in terms of time and facilities. In addition, judging from the aspect of poverty alleviation, the implementation of village funds has not been able to formulate community development and empowerment activities that lead to poverty alleviation programs. Village funds also have not touched the development of Village Owned Enterprises to the maximum so that the village economy in OKU Regency has not developed, the village does not have a source of Village Original Income independently. Judging from some of these facts, it can be concluded that village funds in OKU Regency have not achieved the expected results within half the time of its implementation. It is considered necessary for the local government to conduct development on the village regarding the use of village funds to achieve optimization of village fund performance to be in accordance with the ideals of the policy.

A. PENDAHULUAN

Telah tercantum dalam undang-undang dasar 1945, bahwa negeri ini mempunyai cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang makmur. Makmur dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana masyarakat memiliki keberdayaan dalam berbagai hal. Lalu, keberdayaan tersebut dapat tumbuh tentunya jika didukung melalui penyediaan fasilitas dan informasi yang mumpuni, pemenuhan hak pendidikan, serta adanya ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan guna memperlancar interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Untuk itu, pemerintah selalu berusaha mengeluarkan kebijakan dan program yang dianggap dapat dijadikan alat untuk mencapai cita-cita bangsa tersebut.

Salah satu keputusan pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut, yaitu dengan mengalokasikan dana yang begitu besar ke setiap desa. Desa dipilih sebagai pusat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan desa dipandang sebuah wilayah administratif yang otonom, paling dasar dan terdekat dengan masyarakat. Dengan kelebihan tersebut, desa diharapkan dapat menggali potensinya dan potensi masyarakat yang kemudian dapat dikelola untuk mencapai kemandirian desa dan kemakmuran masyarakat. Ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan pada sebuah negara pada dasarnya adalah berasal dari desa. Oleh karena itu, kebijakan ini merupakan langkah yang tepat untuk menyongsong kemakmuran negeri ini.

Akan tetapi, tidak ada perjalanan suatu kebijakan yang berjalan mulus tanpa hambatan. Kondisi desa yang tersebar di Indonesia tidak sama dan tidak dapat disamaratakan. Desa di pulau Jawa mungkin dapat dengan mudah menerima informasi dan sosialisasi mengenai dana desa, dapat pula menjalankan kebijakan ini dengan tepat karena didukung oleh kondisi desa yang pada awalnya memang sudah tertata dengan baik. Namun, di luar Jawa kondisinya sangat berbeda. Pada tahun 2013 misalnya, di Kabupaten Ogan Komering Ulu terdapat 140 desa yang tersebar pada 12 kecamatan, hanya sebagian kecil (30 desa) yang memiliki kantor desa. Hal ini berarti dapat dikatakan administrasi desa di wilayah ini belum tertata dengan baik. Lantas, pada tahun 2015 digelontorkan dana desa yang begitu besar, pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana mungkin pengelolaan dana tersebut dapat dijalankan dengan baik tanpa ada tempat yang “netral” untuk mengelolanya. Selain itu, keterbatasan informasi dikarenakan fasilitas desa yang belum memadai menjadikan kurang tersosialisasinya tata cara penggunaan dana desa ke aparatur desa, kondisi sumberdaya manusia pemerintah desa, pengawasan, regulasi, serta partisipasi masyarakat juga kemudian mempengaruhi perjalanan dana desa.

Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan

penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa. (Aziz, 2016). Secara umum, sejak program Dana Desa dijalankan tahun 2015, begitu banyak permasalahan yang terekam di antaranya adanya pemotongan dari pemerintah kabupaten seperti di Jawa Timur; penyimpangan dana desa seperti di NTT; masalah administratif seperti birokrasi penyaluran dana yang berbelit serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang kurang lengkap atau tidak lengkapnya dokumen yang disyaratkan seperti Peraturan Bupati, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Desa (APBDes), dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa yang memuat peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa; kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan dana serta minimnya kualitas sumber daya manusia; kurangnya pendampingan dan kualitas pendamping; dan minimnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. (Lengkong, 2018)

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana desa sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Diharapkan melalui dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Kini, setengah dasawarsa sudah dana desa dilaksanakan. Saatnya mengukur kinerja penggunaannya. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisa kinerja penggunaan dana desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah kinerja penggunaan dana desa di kabupaten Ogan Komering Ulu? Bagaimana peran dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Ogan Komering Ulu? Spesifikasi yang hendak dicapai adalah sebagai problem solver dari berbagai persoalan yang mempengaruhi kinerja penggunaan dana desa dalam lima tahun ini. Selain itu sebagai bahan kajian bagi pemerintah untuk tetap melanjutkan atau menghentikan dana desa, dilihat dari kinerja yang telah dicapai dalam lima tahun penyelenggaraannya.

B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penggunaan metodologi jenis kualitatif ini dilakukan guna menggali informasi yang lebih menyeluruh dan dalam kinerja penggunaan dana desa yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Sehingga diperlukan pengumpulan data secara lebih mendalam melalui konfirmasi ke berbagai aktor terdahulu yang menjadikan penelitian ini lebih dinamis dan kompleks yang kemudian tidak memungkinkan pencarian data hanya melalui kuisioner saja.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021, di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan yang masih memiliki berbagai kendala dalam penyelenggaraan dana desa. Penelitian ini menjadikan pemerintah dan masyarakat desa sebagai target, karena kedua unsur ini merupakan pihak yang merasakan perubahan penyelenggaraan pemerintahan di desa setelah adanya dana desa.

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk perhatian penulis terhadap kondisi desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan pengumpulan dokumen terkait penyelenggaraan dana desa setelah setengah dasawarsa berjalan.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer digunakan sebagai alat menggali lebih dalam mengenai kualitas penataan desa dari seluruh stakeholders yang berperan. Data sekunder digunakan guna memperkuat kebenaran pernyataan data yang diperoleh pada pengumpulan data primer.

Proses analisis data (Bungin:126) dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.

Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data.

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan selanjutnya mencari bila di perlukan.

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa, bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, dengan prioritas peruntukan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui dana desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, meminimalisir kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Setelah lima tahun berjalan, dana desa di kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki kinerja sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pelayanan Publik

Tak dapat dipungkiri bahwa kualitas pelayanan publik dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja pemberi layanan. Suatu pelayanan publik yang berkualitas paling tidak adalah pelayanan yang tepat, cepat, mudah, dan murah. Jika dipandang dari prinsip ini, pelayanan publik di berbagai desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat dikatakan belum mencapai kualitas pelayanan yang baik. Hal ini dilihat dari berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah desa. Masih banyaknya desa yang tidak memiliki kantor desa menjadi suatu indikator kurang maksimalnya pelayanan publik, dengan tidak adanya kantor desa menunjukkan bahwa sarana pelayanan publik tidak optimal. Seharusnya, dengan besaran dana desa yang diterima selama lima tahun terakhir, sudah dapat membangun sarana pelayanan tersebut. Ketiadaan kantor desa, menjadikan pelayanan dilakukan di rumah sekretaris desa. Hal ini tentunya berdampak pada ketidakjelasan waktu pelayanan. Jika pelayanan dilakukan di kantor, maka akan ada kejelasan waktu/jam kerja sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan pada waktu tersebut.

Sebagsai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, adalah tepat menggunakan dana desa untuk belanja persediaan pelayanan publik seperti pengadaan formulir (untuk pelayanan yang menggunakan formulir seperti surat pengantar pembuatan KTP), fakta di lapangan menunjukkan bahwa tak jarang

masyarakat yang mengakses pelayanan harus meminta formulir ke desa lain lalu mengedit sendiri kop surat sesuai dengan desa yang bersangkutan, karena ketiadaan formulir di desa tempat masyarakat tersebut dilayani. Kondisi ini tentunya berdampak pada minimnya ketepatan dan kecepatan, serta menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat secara tidak langsung mengeluarkan biaya yang tidak seharusnya menjadi beban masyarakat seperti biaya mengcopy dan mengedit formulir tersebut.

b. Mengentaskan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang selalu menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana tidak, kemiskinan merupakan akar bagi munculnya berbagai permasalahan sosial lainnya, seperti kejahatan dan angka putus sekolah.

Melalui dana desa, diharapkan pembangunan infrastruktur desa akan lebih optimal sehingga mendorong ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan berbagai pembangunan infra struktur yang dilakukan, akses masyarakat menuju pasar untuk menjual hasil tani menjadi lebih mudah, sehingga biaya transportasi yang ditanggung masyarakat menjadi lebih sedikit misalnya. Selain itu, penggunaan dana desa untuk pembangunan sarana irigasi dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan hasil pertanian, sehingga kemiskinan dapat teratasi.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2016 kinerja dana desa untuk pembangunan adalah sebesar 87.7%, untuk pemberdayaan masyarakat 6.8%. penyelenggaraan pemerintahan 3.6%, dan pembinaan kemasyarakatan 1.8% (Kemenkeu RI, 2019). Jika dilihat dari data ini, tentunya dapat dikatakan bahwa persoalan kemiskinan masyarakat dapat dientaskan, mengingat besarnya penggunaan dana desa untuk pembangunan. Artinya, masyarakat tidak lagi kekurangan akses dalam menjalankan perekonomian, baik akses jalan, jembatan, drainase dan irigasi, pasar desa, dan lain sebagainya. Hanya saja fakta di lapangan, khususnya di kabupaten Ogan Komering Ulu, pembangunan yang dilakukan belum banyak mengarah kepada pembangunan infrastruktur yang dapat mengembangkan perekonomian masyarakat. Pembangunan yang dilakukan lebih banyak pada pembangunan yang sifatnya tidak produktif, seperti pembangunan gapura desa, pembangunan pos jaga desa, pembangunan pergola di kantor desa (bagi desa yang memiliki kantor desa), pembangunan jalan setapak di desa, pembangunan semacam ini dilakukan oleh desa yang berada dekat dengan pusat pertumbuhan karena memang infrastruktur sudah tersedia. Namun ada juga beberapa desa di kecamatan Ulu Ogan yang melakukan pembangunan akses jalan menuju kebun warga yang sebelumnya sulit diakses mengingat lokasinya yang berada di atas perbukitan. Dengan pembangunan akses jalan ini telah memudahkan masyarakat dalam mengakses kebun dan memasarkan hasil kebun sehingga lebih bernilai ekonomis. Jika sebelumnya masyarakat menjual durian sebagai hasil kebun dengan murah kepada tengkulak karena minimnya akses jalan, saat ini masyarakat telah dapat menjualnya dengan mudah ke pusat pertumbuhan kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu Baturaja dengan harga yang baik sehingga penghasilan masyarakat menjadi meningkat.

Program pemberdayaan masyarakat juga dapat dijadikan sebagai tonggak pengentasan kemiskinan. Melalui dana desa, diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan program-program yang dapat mengembangkan kreativitas dan

inovasi masyarakat dalam mengembangkan perekonomian keluarga, sehingga dapat keluar dari belenggu kemiskinan. Jika dilihat dari data kemenkeu di atas, terlihat bahwa penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat memang masih jauh lebih kecil daripada penggunaan untuk pembangunan. Padahal dengan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan *skill* masyarakat dalam menggali potensi dirinya untuk dikembangkan menjadi sumber penghasilan. Sejauh ini program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu hanya sebatas penyuluhan/ceramah mengenai potensi-potensi tertentu, belum dengan mendampingi kelompok masyarakat sehingga menghasilkan output berupa keahlian masyarakat yang dapat dikembangkan. Misal, penyuluhan mengenai urgensi UMKM dan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Tetapi penyuluhan ini hanya sekedar penyampaian informasi, tidak dengan pendampingan bagaimana mengembangkan UMKM, bagaimana pengelolaan limbah rumah tangga sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat.

c. Memajukan Perekonomian Desa

Melimpahnya sumber daya desa memberikan peluang yang signifikan bagi pemerintah desa dalam membangun perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Potensi-potensi tersebut harus dilakukan identifikasi secara baik dan dikembangkan melalui pemberdayaan kepada masyarakat secara berkesinambungan. Banyak sekali potensi yang belum tergali secara optimal dan maksimal serta belum dikelola secara baik. Banyak kendala yang melatarbelakangi, antara lain keuangan desa, sumber daya manusia desa dan infrastruktur yang tidak mendukung. (Kadir, 2018).

Kabupaten Ogan Komering Ulu ter
masuk sebuah wilayah yang memiliki sumber daya yang potensial untuk dikembangkan. Setiap desa di kabupaten Ogan Komering Ulu, memiliki potensi yang cukup besar jika dikelola dengan baik. Dana desa seharusnya dapat diarahkan untuk pengembangan potensi desa tersebut. Pada potensi alam khususnya potensi wisata misalnya, desa yang terletak di kecamatan Ulu Ogan, merupakan desa yang terbentang disepanjang aliran sungai Ogan, sehingga pengembangan wisata air seperti arum jeram sangat memungkinkan untuk dikembangkan, melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Akan tetapi, penggunaan dana desa belum sampai pada level pengembangan potensi wisata ini. BUMDesa yang dikembangkan oleh desa saat ini hanya sebatas penyewaan kursi dan tenda yang tidak dapat menunjang pendapatan asli desa. Padahal, jika BUMDesa yang dibiayai dengan dana desa memilih untuk mengembangkan potensi wisata desa, tentunya dapat menarik wisatawan dan menghasilkan *income* bagi desa. Selain itu, pengembangan potensi wisata juga dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat desa, seperti usaha menjual oleh-oleh, warung makan, dan bahkan penyediaan *homestay*. Artinya, melalui pengembangan potensi desa dapat meningkatkan pendapatan desa sekaligus meningkatkan produktifitas masyarakat desa sehingga lebih berdaya, dan berakhir pada kemajuan perekonomian desa.

d. Meminimalisir Kesenjangan Pembangunan Antar Desa

Pembangunan memang merupakan hal mendasar yang menjadi tonggak untuk kemajuan suatu wilayah, termasuk desa. Tanpa ada infrastruktur yang mumpuni, sebuah wilayah tentu akan tertinggal. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan, pemerintah memberikan dana desa, dengan harapan dapat digunakan untuk membangun dari desa.

Akan tetapi dibalik besarnya dana yang dikelola oleh desa dan tersimpan harapan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa, juga terdapat kekhawatiran yang tak kalah besarnya, yaitu ketidaksiapan sumber daya manusia yang nantinya akan mengakibatkan pengelolaan dana tidak transparan, yang berpotensi terjadi penyimpangan. (Budianto, 2020).

Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu terlihat dari kesamaan program pembangunan yang dilakukan di setiap desa. Setiap desa baik yang di pusat perkotaan maupun yang jauh dari pusat perkotaan, melakukan pembangunan jalan setapak, pembangunan sanitasi, pengembangan BUMDesa yang semuanya bergerak pada bidang penyewaan kursi dan tenda. Pembangunan bahkan program apapun yang dibiayai oleh dana desa selalu sama. Padahal, pemerataan pembangunan yang diharapkan dari dana desa ini tentunya bukan berarti pembangunan harus sama setiap desa, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa masing-masing.

Sesuai fakta di atas, akhirnya pemerataan pembangunan yang diharapkan dari program dana desa tidak tercapai. Pembangunan yang dilakukan terkesan mubazir/tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, karena hanya meniru pembangunan di desa lain tanpa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa sendiri. Dari segi letak, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang berbeda setiap desa, seharusnya menjadi akar melakukan pembangunan yang berbeda pula sesuai kebutuhan masyarakatnya.

e. **Memperkuat Masyarakat Desa**

Selain ketersediaan infrastruktur, keberdayaan masyarakat juga menjadi indikator pokok dalam pembangunan desa. Kondisi masyarakat yang mempunyai kemandirian secara ekonomi akan berdampak pada pencapaian taraf hidup masyarakat yang mumpuni.

Salah satu tujuan dari pemberian dana desa adalah meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pembangunan sosial ekonomi masyarakat desa. Program pemberdayaan masyarakat perlu menjadi prioritas dalam implementasi dana desa. Sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini masyarakat desa merupakan aset dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, perlu program pemberdayaan SDM agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Ketika SDM memiliki kemampuan ekonomi yang baik, maka tingkat partisipasi SDM dalam penyelenggaraan pemerintahan pun akan semakin baik, karena masyarakat tidak lagi memikirkan persoalan pemenuhan kebutuhan hidup.

Akan tetapi, pada faktanya, telah terjadi bias/penyimpangan yaitu seluruh penggunaan dana desa adalah digunakan untuk pembangunan fisik, belum mengarah pada pemberdayaan masyarakat (Chasanah, 2017). Hal ini juga terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Program pemberdayaan masyarakat yang

dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka implementasi penggunaan dana desa, masih sangat minim. Belum ada program pemberdayaan masyarakat yang benar-benar dilaksanakan hingga menghasilkan masyarakat yang mandiri. Program yang dilakukan hanya sebatas penyuluhan, pelatihan dalam waktu singkat, atau sosialisasi. Belum terlihat program pendampingan yang dilakukan dalam kurun waktu yang lama untuk mengubah kondisi masyarakat yang dari tidak mampu menjadi mampu. Stimulasi modal dalam mengembangkan usaha masyarakat juga belum terlihat.

Sejauh ini, dana desa belum mampu memperkuat masyarakat desa. Masyarakat hanya menikmati pembangunan-pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah desa, tetapi tidak memberikan dampak yang nyata pada tingkat keberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, petani kopi di Kabupaten Ogan Komering Ulu hanya dapat merasakan kemudahan akses untuk memanen kopi karena adanya pembangunan jalan setapak, tetapi untuk hasil yang didapatkan dari bertani kopi masih sama saja, karena petani menjual dalam bentuk kopi setelah petik, tanpa diolah terlebih dahulu, padahal, jika petani diberikan pelatihan dan pendampingan lapangan dari tenaga ahli, maka petani akan mampu mengolah kopi menjadi kopi yang lebih bernilai jual mahal. Melalui BUMDesa misalnya, BUMDesa sapat memasarkan hasil tani kopi masyarakat kepada jaringan-jaringan yang lebih luas. Dengan demikian, masyarakat menjadi terkuatkan secara ekonomi.

D. SIMPULAN

Setelah berjalan selama setengah dasawarsa, dana desa telah banyak menciptakan pembangunan-pembangunan infrastruktur di seluruh desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Akan tetapi, perjalanan dana desa belum mampu memperbaiki kualitas pelayanan publik, belum juga berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di desa secara signifikan. Dana desa juga belum mampu membuat pembangunan menjadi merata yang sesuai dengan kondisi desa, belum juga memperkuat perekonomian masyarakat maupun perekonomian desa. Dengan kata lain, penyelenggaraan dana desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu selama setengah dasawarsa ini, belum berhasil menciptakan kemandirian desa.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Aziz, Nyimas Latifah Letty. (2016). Otonomi Desa dan efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13, (2), 193-211.
- Lengkon, VPK. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*, 5, (1), 15-28.
- Kadir, Yusrianto dan Roy Marthen Moonti. (2018). Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6, (3), 432-442.
- Budianto, Rahmat dan Rury Febriana. (2020). Akuntabilitas Penggunaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46, (2), 344-354.
- Chasanah, Khuswatun. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *IJPA (The Indonesian Journal of Public Administration)*, 3, (2), 12-32.

	Journal Of Government and Social Issues (JGSI) Volume 1 Nomor 1 2021: 60-70 https://jgsi.fisip.unila.ac.id/index.php/Jurnal	
---	---	--

ARTICLE



MUHAMMADIYAH DAN CIVIL SOCIETY (Studi tentang Toleransi dan Pluralisme dalam Muhammadiyah)

Ikang Putra Anggara¹, Eva Susanti², And Herwin Sagita Bela³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Baturaja, Ogan Komering Ulu, Indonesia

²Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Baturaja, Ogan Komering Ulu, Indonesia

³Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Baturaja, Ogan Komering Ulu, Indonesia

How to cite:

Anggara, I. P., Susanti, E. & Bela, H. S. (2021). MUHAMMADIYAH DAN CIVIL SOCIETY (Studi tentang Toleransi dan Pluralisme dalam Muhammadiyah). *Journal of Government and Social Issues (JGSI)*, 1(1), 60-70

Article History

Dikirim: 21 Oktober, 2021;

Diterima: 14 Desember, 2021;

Dipublikasi: 31 Desember, 2021;

Kata Kunci:

Muhammadiyah

Masyarakat sipil

Toleransi

Kemajemukan

ABSTRAK

Civil Society merupakan gambaran masyarakat madani yang responsif dan beradab serta menghargai hak asasi manusia. Meski telah memasuki era reformasi, masyarakat Indonesia kerap mengalami konflik horizontal yang tidak dilandasi oleh faktor pluralisme atau keragaman. Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan civil society tentu menarik mengingat peran sejarahnya yang berusia lebih dari satu abad. Penelitian yang mengkaji toleransi dan pluralisme di Muhammadiyah ini termasuk dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu konsep penelitian yang pengumpulan informasi dan datanya dilakukan dengan memanfaatkan bantuan berbagai macam bahan yang terdapat di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian sejenis, artikel, dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. . Unit analisis atau indikator yang digunakan adalah penerimaan dan apresiasi terhadap keragaman; Interaksi positif dalam keragaman; Sikap moderat dan tidak eksklusif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Muhammadiyah menghargai dan menerima keberagaman di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari fakta bahwa banyak lembaga pendidikan Muhammadiyah, baik tingkat menengah maupun tinggi di Indonesia bagian timur, sebagian besar non-Muslim. Terlihat dari susunan pengurus atau elite Muhammadiyah yang tidak selalu didominasi oleh orang Jawa atau lebih tepatnya Yogyakarta sebagai tempat kelahiran, tetapi juga terdiri dari berbagai latar belakang etnis dan asal daerah. Poin terakhir adalah sikap moderat dalam Muhammadiyah diwujudkan dengan bersikap bersahabat dengan seluruh elemen masyarakat dan tidak terlibat dalam tindakan anarkis atau destruktif terhadap kelompok lain di luar organisasi.

Keywords:

Muhammadiyah

Civil Society

Tolerance

Pluralism

ABSTRACT

Civil Society is a picture of a civil society that is responsive and civilized and respects human rights. Even though it has entered the reform era, the Indonesian people often experience horizontal conflicts that are not based on pluralism or diversity factors. Muhammadiyah as one of the forces of civil society is certainly interesting to remember its historical role which is more than a century old. This research that examines tolerance and pluralism in Muhammadiyah is included in library research. Library research is a research concept in which information and data collection is carried out by utilizing the help of various kinds of materials

contained in the library, such as reference books, similar research results, articles, and various journals related to the problem to be researched. Unit analysis or indicators used are acceptance and appreciation of diversity; Positive interaction in diversity; Moderate and non-exclusive attitude. The results of the research and discussion show that Muhammadiyah values and accepts diversity in Indonesia. This can be proven from the fact that many Muhammadiyah educational institutions, both secondary and tertiary levels in eastern Indonesia, are mostly non-Muslims. We can see from the composition of Muhammadiyah's management or elite that it is not always dominated by Javanese people or more specifically Yogyakarta as the place of birth, but also consists of various ethnic backgrounds and regional origins. The last point is that the moderate attitude in Muhammadiyah is manifested by being friendly with all elements of society and not being involved in anarchic or destructive actions against other groups outside the organization.

A. PENDAHULUAN

Civil society atau masyarakat madani adalah masyarakat sipil yang tanggap dan juga beradab serta masyarakat yang memiliki budaya dan dapat menjaga karakter aslinya meskipun terjadi pertukaran budaya yang besar-besaran. Banyak kalangan berpendapat bahwa upaya penguatan *civil society* di Indonesia tidak bisa mengabaikan pentingnya faktor umat Islam. Bahkan dalam beberapa hal, keberadaan umat Islam dianggap sebagai basis perubahan sosial-politik di Indonesia, karena memiliki potensi sangat besar dalam menentukan format dan kehidupan politik. Begitu pula dalam konteks *civil society*, Muslim Indonesia memiliki prasyarat setidaknya secara kuantitas bagi pertumbuhan dan penguatan *civil society* di Indonesia.

Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang melekat padanya istilah modernisme. Dengan berbagai organisasi sayapnya, lembaga-lembaga dan amal usahanya, Muhammadiyah memainkan berbagai perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sejak dari dakwah, pendidikan, kesehatan, penyantunan sosial, ekonomi dan lain sebagainya.

Menurut Haedar Nashir, Muhammadiyah telah meletakkan dasar dalam pembaruan pemahaman dan pengamalan Islam yang berorientasi pada kemajuan. Mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa melalui lembaga pendidikan Islam modern. Memajukan kesejahteraan umum dengan amal usaha di bidang kesehatan, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Nashir, Haedar. 2011).

Amal Usaha Muhammadiyah atau disingkat AUM yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia tercatat pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: 172 Perguruan Tinggi diantaranya 40 Universitas, 1.143 SMA/SMK/MA, 1.772 SMP/MTS, 2.604 SD/MI, 7.623 TK ABA, 6.723 PAUD, 71 SLB, 82 pondok pesantren, 457 Rumah Sakit dan Rumah Bersalin, 318 Panti Asuhan, 82 Panti Berkebutuhan Khusus, 54 Panti

Jompo, 437 BMT, 762 BPRS, 25 Penerbitan dan berbagai amal usaha lainnya sebagai kiprah nyata Muhammadiyah untuk bangsa (Nashir, Haedar. 2013).

Muhammadiyah diharapkan menjadi tenda besar bangsa dengan terus memperjuangkan kesadaran pluralisme dalam kehidupan bangsa. Untuk itu, organisasi ini perlu memperluas pergaulan dengan semua pihak, termasuk kelompok yang berbeda, dengan dasar kemanusiaan dan kebangsaan. Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Ma'arif, sejak awal Muhammadiyah didirikan sebagai payung yang terbuka untuk semua kelompok. Pendiri organisasi ini, bergaul dengan banyak tokoh dari berbagai latar belakang, seperti Pendeta, Pastor, kelompok Boedi Utomo, bahkan dari Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya menurut Ma'arif, bangsa ini harus didorong untuk mengakui perbedaan dalam agama, etnis, dan kelompok disaat kemajemukan masyarakat saat ini cenderung menjadi beban dan menimbulkan persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan disintegrasi terbukti dengan berbagai persoalan yang sumbernya berbau kemajemukan, terutama bidang agama.

Perbedaan pemahaman dan perbedaan kelompok dalam agama Islam sendiri pada beberapa waktu belakangan cukup mengalami ketidakharmonisan, misalnya ada upaya untuk membubarkan pengajian oleh kelompok yang merasa paling mayoritas terhadap kelompok pengajian yang mungkin berbeda mazhab atau berbeda orientasi keagamaan. Padahal sangat jelas terlihat oleh orang yang masih berpikir secara logis bahwa permasalahan tersebut lebih disebabkan karena ketidaksiapan menerima argumentasi atau sudut pandang pihak lain dan hanya karena ingin memaksakan satu corak keagamaan saja.

Hal-hal seperti ini yang menurut Muhammadiyah tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara kekerasan atau pemaksaan karena justru akan menimbulkan persoalan lebih serius dikemudian hari. Tuduhan sepihak dan seringkali tidak didasari oleh bukti objektif dalam rangka melegitimasi upaya penghadangan terhadap pihak lain semestinya tidak boleh terjadi di Indonesia karena Konstitusi telah menjamin akan kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat.

Tindakan-tindakan menghakimi pihak lain bahkan sampai membubarkan kegiatan oleh masyarakat sipil justru terlihat aneh dan lucu di negara hukum seperti Indonesia karena jelas upaya demikian hanya boleh dilakukan oleh aparat negara yang memiliki wewenang resmi yaitu Kepolisian bukan sembarang masyarakat.

Sehubungan dengan beberapa hal diatas, dipandang penting adanya toleransi dalam kehidupan masyarakat plural yang demokratis. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji toleransi dan keanekaragaman dalam Muhammadiyah sebagai salah satu elemen atau entitas bagi bangsa Indonesia dewasa ini.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Civil Society

Banyak pandangan yang menjelaskan terkait konsep *civil society*, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Menurut Wirutomo sebagaimana dikutip Suratman (2010:123) kata *civil society* berkaitan dengan terminologi masyarakat sipil, ada pula yang memberi makna sebagai masyarakat madani atau masyarakat adab.

Konsep ini menitikberatkan pada hubungan antara yang memerintah dengan warga atau masyarakat yang diperintah, hubungan antara negara terhadap masyarakatnya. Bahwa masyarakat membutuhkan ruang atau *space* untuk melakukan pergerakan yang dalam konsep internasional disebut sebagai *Non Government Institution* (NGO) yakni organisasi diluar negara. Output yang diharapkan dari adanya organisasi diluar pemerintah atau negara adalah kemandirian warga negara sehingga juga berdampak positif bagi perkembangan kehidupan politik yang lebih baik. Selain itu, masyarakat juga memerlukan semacam lembaga yang menjadi pengatur atau penjaga ketertiban yang bersifat tertulis yaitu penegakan hukum (*supremasi of law*) (Suratman, 2010:123).

Anwar Ibrahim sebagaimana dinukil Sazali, berpendapat bahwa *civil society* merupakan suatu ikatan sosial berasas pada prinsip yang menjaga keseimbangan antara kebebasan individual dengan kestabilan masyarakat secara kolektif. Sistem peraturan perundang-undangan juga merupakan satu prasyarat penting dalam masyarakat sipil (*civil society*) karena tatanan masyarakat sipil menghendaki adanya jaminan pelaksanaan aturan (hukum) bukan mengedepankan kekuasaan atau keinginan rezim yang sedang berkuasa (Sazali, 2005:42).

Menurut Dawam Rahardjo, konsep masyarakat madani terdiri atas organisasi sukarela (*voluntary*), organisasi yang melayani kepentingan umum, mempunyai rasionalitas dan mampu mengatur dirinya sendiri (Jimung. 2005:109).

Berdasarkan beberapa pendapat atau pandangan yang telah disampaikan sebelumnya dapat diartikan bahwa *civil society* merupakan suatu keadaan masyarakat yang berlandaskan pada konsep kesetaraan atau persamaan didepan hukum, masyarakat yang aktif dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan negara sebagai *interest group* atau kelompok kepentingan, serta masyarakat yang demokratis dan mandiri.

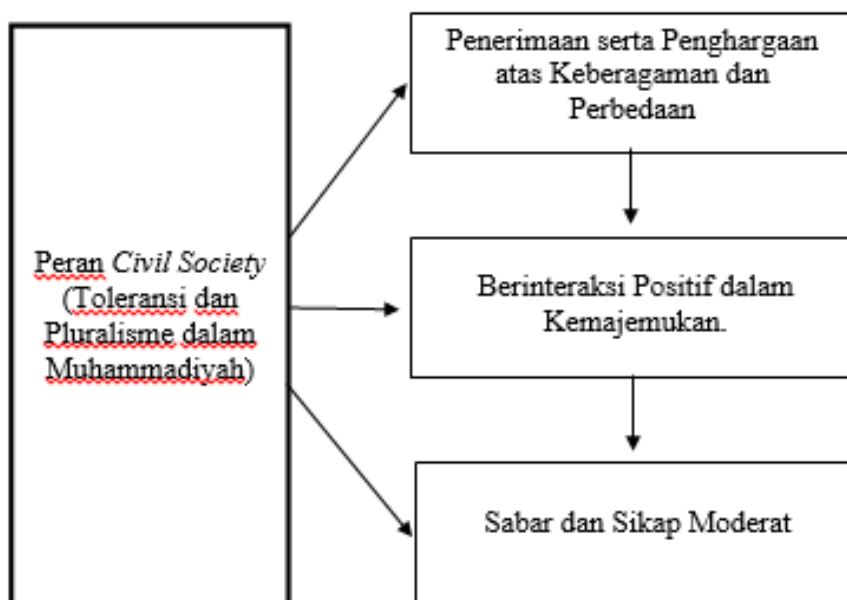
Karakteristik Civil Society

Secara konseptual menurut Afan Gaffar dalam Jimung (2005:110), ada berbagai perspektif dalam memahami *civil society*, salah satunya tentang ruang atau wilayah (*space*). Karena disitulah individu dan kelompok masyarakat dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi dan ikut berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan suatu negara.

Civil society mengenal beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut:

- a. *Publik Space* yaitu suatu ruang yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyatakan gagasan dan pandangan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, seluruh warga juga dapat mengakses fasilitas-fasilitas yang bersifat publik.
- b. Adanya demokrasi yaitu prinsip bahwa kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat. Hubungan antar sesama warga negara terjalin dengan baik tanpa harus membedakan suku, agama ataupun ras seseorang.
- c. Prinsip Toleransi. Bahwa setiap orang harus menjunjung tinggi sikap penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan latar belakang termasuk perbedaan pandangan. Karena sejak lahir manusia sudah diciptakan untuk memiliki banyak perbedaan ataupun warna maka hal ini haruslah dipandang secara positif bukan dijadikan sumber permasalahan.
- d. Prinsip Pluralisme, yaitu berkaitan dengan kemajemukan atau keanekaragaman masyarakat. Maka pemahaman terhadap prinsip pluralisme yang mendalam sangat penting untuk menjadikan tatanan kehidupan yang kondusif. Masyarakat yang majemuk atau beranekaragam harus dipandang sebagai khasanah yang memperkaya peradaban umat manusia bukan sebaliknya menjadikan keberagaman sebagai sumber persoalan.
- e. Prinsip Keadilan yakni pengejawantahan terhadap konsep kesetaraan manusia (*egaliter*). Hak dan kewajiban warga negara diatur secara objektif dan proporsional. Warga negara juga memiliki kesempatan yang sama terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau negara.

Kerangka Pemikiran



C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan konsep penelitian yang pengumpulan informasi dan data dilakukan dengan memanfaatkan bantuan berbagai macam materi yang terdapat di perpustakaan, misalnya buku referensi, hasil penelitian sejenis, artikel, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti. Kegiatan dilaksanakan secara terstruktur atau sistematis mulai dari mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban dari permasalahan yang dihadapi (Sari, Milya dan Asmendri. 2020).

Adapun langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan menurut Zed (2008) sebagaimana dikutip Sari dan Asmendri (2020) adalah sebagai berikut. *Pertama*. Memilih ide umum mengenai topik penelitian; *Kedua*. Mencari informasi yang mendukung topik; *Ketiga*. Pertegas fokus penelitian; *Keempat*. Mencari dan menemukan bahan bacaan yang dibutuhkan; *Kelima*. Membaca dan membuat catatan penelitian; *Keenam*. Mereview dan memperkaya bahan bacaan; dan terakhir, *Ketujuh*. Mengklasifikasikan bahan bacaan dan mulai menulis laporan hasil penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerimaan dan Penghargaan atas Keberagaman

Bahwa keanekaragaman atau kemajemukan merupakan suatu hal yang harus dipandang sebagai pertalian antara ikatan sosial, kebudayaan, peradaban dan kemasyarakatan. Bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam suku, bahasa, budaya dan agama harus dapat saling menghormati dan saling menjaga secara tulus sehingga yang muncul adalah kehidupan bermasyarakat yang damai (Jurdi, Syarifuddin. 2008:448).

Menurut Amien Rais negara Indonesia yang sangat besar ini, rahasia kekuatannya terletak didalam *Bhineka Tunggal Ika*. Negara ini terdiri dari banyak kepulauan, ada 13.665 pulau besar dan kecil, terdiri lebih dari 220 suku bangsa. Kemajemukan bisa menjadi kelemahan, tetapi juga bisa menjadi kekuatan. Hal ini tergantung pada wawasan, semangat dan ketulusan kita sebagai bangsa yang majemuk. Untuk itu kita harus memelihara secara sungguh-sungguh *Bhineka Tunggal Ika*.

Selanjutnya Rais menyampaikan beberapa prasyarat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bersumber dari faktor kemajemukan atau bertendensi menyinggung masalah suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang harus memperhatikan beberapa hal. *Pertama*, kita sesama bangsa harus memegang prinsip saling (*mutuality*). Yaitu saling menghormati, menghargai, mencintai, asah, asih, dan asuh. Prinsip ini harus kita jadikan pertama-tama didalam membangun bangsa yang majemuk ini. Dan kebetulan prinsip ini cocok dengan ajaran agama apapun, apakah itu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. *Kedua*, kita sebagai bangsa diikat dalam sila Pancasila dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini satu sila yang harus diturunkan didalam realitas yang sejati. *Ketiga*, sila kelima Pancasila merupakan semen, pondasi dan lem nasional. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Malaysia tidak ada Pancasila, tetapi pelaksanaan keadilan ekonomi lebih bagus daripada kita. *Keempat*, kita perlu *policy* atau kebijakan pemerintah yang betul-betul adil, manusiawi, menarik dan enak terhadap seluruh komponen bangsa (Rais, M. Amien. 1998:112).

Perspektif Muhammadiyah tentang keberagaman, yaitu perbedaan adalah sesuatu yang *dlarurah*. Perbedaan pendapat itu suatu rahmat dan keluasan bagi umat. Keyakinan bahwa perbedaan adalah suatu keluasan dan kurnia Allah bagi umat manusia (Suara Muhammadiyah. 2010:22). Menghargai dan menerima perbedaan berarti menerima realitas takdir serta menunjukkan kephahaman akan sunatullah dan iradahnya. Menghargai perbedaan juga merupakan bentuk rasa syukur dan harapan untuk menyongsong masa depan yang lebih positif.

Muhammadiyah telah melakukan konkretisasi-objektivikasi Islam. Menurut Kuntowijoyo, konkretisasi berarti usaha untuk mengkonkretkan ajaran-ajaran Islam dalam wujud pengamalan atau pelaksanaan nyata. Mendirikan lembaga pendidikan adalah wujud konkret bagaimana mengamalkan perintah menuntut ilmu, membentuk manusia dan masyarakat yang cerdas dan beradab. Objektivikasi berarti usaha menjadikan Islam sebagai ajaran yang diterima oleh masyarakat, tetapi tidak disebabkan oleh intimidasi, pemaksaan dan lain-lain, melainkan pengakuan atas keunggulan. Secara objektif masyarakat menerima Islam. Objektivikasi meniscayakan adanya pluralisme yang memungkinkan seseorang atau komunitas melintasi batas-batas atau sekat-sekat agama (Suara Muhammadiyah. 2012:50).

Abdul Mu'ti mencatat bahwa realitas lembaga pendidikan Muhammadiyah menerima siswa dan mahasiswa non-Muslim adalah bukti nyata bahwa Muhammadiyah sangat menjunjung tinggi keanekaragaman atau kemajemukan bangsa Indonesia. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa pada beberapa daerah terdapat anak-anak non-Muslim yang sekolah di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah. Misalnya, SMA Muhammadiyah di Putussibau Kalimantan Barat yang memiliki siswa 60 persen beragama Kristen/ Katholik, di Serui berdiri SMP dan SMK Muhammadiyah yang sekitar 80 persen siswanya beragama Kristen. Di Ende, terdapat SMA Muhammadiyah yang sekitar 75 persen siswanya beragama Kristen/Katholik. Dan pada Universitas Muhammadiyah Kupang terdapat lebih dari 70 persen mahasiswa beragama Kristen/ Katholik (Suara Muhammadiyah. 2012:50).

Fakta tersebut juga menunjukkan wajah Muhammadiyah yang berusaha untuk tidak mengedepankan budaya feodalisme karena karakter lain dari *civil society* salah satunya adalah kesetaraan. Menurut Muhammadiyah semua potensi harus diberikan kesempatan untuk maju dan berperan. Ketika kaum perempuan masih dipandang sebagai warga kelas dua, Muhammadiyah telah menginisiasi lahirnya gerakan perempuan bahkan yang pertama di negeri kelak bernama Indonesia. Organisasi dimaksud adalah 'Aisyiyah yang lahir pada tahun 1917.

Muhammadiyah juga sangat menghargai aspek rasionalitas, karena itulah lembaga pendidikan merupakan bidang garapan yang utama sejak awal organisasi ini didirikan. Melihat permasalahan sosial kemasyarakatan yang diliputi oleh keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan maka Muhammadiyah melakukan upaya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Mungkin aspek rasionalitas yang dipegang oleh Muhammadiyah pulalah sehingga membuat sebagian besar pengikut organisasi ini berbasis di perkotaan dan lebih banyak menyasar kaum terdidik. Dan karena itu banyak kalangan yang menyebut Muhammadiyah termasuk kedalam tipe organisasi yang modern serta progresif karena banyak melakukan pembaharuan bukan sebaliknya mempertahankan status quo dan tradisi yang tidak begitu relevan lagi dengan perkembangan zaman.

2. Berinteraksi Positif dalam Kemajemukan

Setiap masyarakat tanpa melihat status sosial tertentu harus bisa menjalankan prinsip hidup saling menerima perbedaan budaya secara lapang dada dan terbuka. Mau berpikir dan bersikap terbuka dalam konteks tersebut merupakan satu hal yang harus dikerjakan secara konkret. Menjadikan

perbedaan budaya sebagai sebuah upaya menjalin hubungan kekerabatan yang baik merupakan suatu hal yang mesti dikerjakan sebab ini merupakan tugas bersama. Perbedaan budaya dalam segala konteksnya harus bisa diberikan ruang kehormatan secara setara. Sebab menghormati budaya sama halnya menghormati para nenek moyang, sehingga bangsa ini kemudian tidak menjadi a-historis atau melupakan sejarah (Yamin & Aulia. 2011:48).

Kerjasama antara umat Islam dengan pemeluk agama lain dalam aspek-aspek yang bersifat keduniaan atau muamalah justru sangat dianjurkan. Supaya ajaran Islam dapat dilihat keluhuran dan ketinggian peradabannya maka umat Islam nya sendiri harus menampilkan wajah yang ramah, misalnya berbagi hadiah atau bahan makanan pada tetangga non-muslim diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan ada ajaran Islam bahwa seorang Muslim belum diakui keimanannya jika membiarkan tetangga kelaparan sementara dirinya tidur nyenyak dan dalam keadaan perut kenyang. Hal ini tidak hanya berlaku pada tetangga sesama umat Islam namun berlaku umum pada semua tetangga, meskipun tetangga non-muslim (Majalah Tabligh. 2012:14).

Pluralisme etnis, agama dan warga negara di Indonesia harus kita jaga dengan baik. Tidak boleh keragaman disatukan dengan cara kekerasan atau pemaksaan. Pluralisme dapat dijadikan sarana membangun bangsa secara mandiri, bebas dari tekanan internasional. Jika kita tidak bisa menjaga keragaman yang ada di Indonesia, kita akan menemukan pluralisme agama, etnis dan suku tinggal kenangan seperti terjadi di Uni Soviet yang sekarang telah terpecah-pecah menjadi negara kecil-kecil yang antara satu dengan lainnya berdiri sendiri (Suara Muhammadiyah. 2003:23-24).

Muhammadiyah tidak bisa melihat realitas pluralisme sebagai realitas yang harus berhadapan sehingga kehadirannya senantiasa dicurigai bahkan dilawan. Kita tidak bisa melihat realitas pluralisme masyarakat dengan model “*oposisi biner*”: boleh tidak boleh, dilarang dan dibebaskan. Ketegangan antar agama, antar kelompok harus dicegah dari awal. Sebenarnya tentang relitas pluralisme warga negara itu bukanlah sesuatu yang baru. Pluralisme warga dalam hal etnis, agama, suku dan sebagainya telah ada sejak bumi ini ada. Kenyataan yang tidak bisa ditolak kehadirannya.

Hingga kini Muhammadiyah telah mampu melintasi abad pertama dan tantangan zaman yang cukup panjang dan sulit pada masa awal perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi yang telah menghadapi beberapa rezim pemerintahan. Banyak organisasi yang satu masa dengannya kini tinggal sejarah dan namanya saja, tentu ketahanan Muhammadiyah menghadapi zaman demi zaman ditopang oleh sistem dan konsep gerakan yang rapi serta terstruktur. Jika saat ini Muhammadiyah telah tersebar tidak hanya di seluruh pelosok dan penjuru tanah air namun juga telah berdiri beberapa cabang istimewa di luar negeri sebagai bukti interaksi yang sangat positif dengan masyarakat luas dewasa ini dalam rangka memajukan dan memberdayakan masyarakat dan kemanusiaan universal.

Oleh sebab itu, dalam persyarikatan Muhammadiyah sudah sangat terbiasa dengan perbedaan-perbedaan latar belakang dari masing-masing anggotanya. Sejak awal organisasi kemasyarakatan yang berlandaskan ajaran Islam ini didirikan bukan hanya untuk etnis atau golongan tertentu saja seperti organisasi-organisasi lain pada masanya yang bersifat kesukuan semisal *Jong Java*, *Jong Sumatera* dan lain-lain. Melihat komposisi pengurus dan elit Muhammadiyah yang pernah menjadi pucuk pimpinan dari organisasi ini, masyarakat akan mengetahui bahwa pernah beberapa kali dipimpin oleh orang diluar Jawa, misalnya Din Syamsuddin dari Lombok Nusa Tenggara Barat, Syafii Maa’arif dan AR. Sutan Mansyur dari Sumatera Barat serta masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya dari berbagai penjuru tanah air.

Terkait kepemimpinan dalam organisasi ini meskipun nampaknya hal yang sepele tapi kenyataannya cukup penting untuk dijadikan bahan perbandingan. Misalnya organisasi sejenis dengan Muhammadiyah yaitu Nahdhatul Ulama (NU) hingga saat ini belum mampu keluar dari frame yang berbasis Jawa. Setidaknya pucuk pimpinan atau Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama

(PBNU) sampai saat ini belum pernah dijabat oleh orang diluar suku Jawa. Selain itu, basis utama pesantren NU pun sebagian besar masih terdapat di pulau Jawa dan Madura.

Eksistensi Muhammadiyah dalam berinteraksi dengan sesama warga masyarakat meskipun berbeda suku, bahasa, agama dan kebudayaan karena dilandasi oleh pemahaman dan semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan atau dalam terminologi agama Islam disebut dengan redaksi *Fastabiqul Khairat*.

Selain itu, pemahaman yang komprehensif disertai kejujuran dan kejernihan dalam melaksanakan ajaran Islam merupakan kunci agar tidak terjebak pada politisasi agama atau bahkan menjadikan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang bertolak-belakang dengan semangat atau nilai-nilai Islam itu sendiri. Karena seringkali, konflik atau pertengkarannya yang berbasis agama tidak murni dilatarbelakangi oleh unsur agama itu sendiri. Ada kalanya pertengkarannya terjadi karena dorongan atau motif ekonomi dan politik. Dengan kata lain, banyak juga pihak yang memanfaatkan konflik dan pertengkarannya agama untuk mendapatkan keuntungan sesaat bagi dirinya atau bagi kelompok tertentu.

3. Sikap Moderat dan Tidak Eksklusif

Sikap moderat memiliki perbedaan dengan sikap apatis. Karena sikap apatis merujuk pada terminologi yang kurang baik atau negatif yaitu melakukan tindakan yang bersifat abai atau tidak peduli. Sementara konsep moderat lebih menekankan pada upaya mencari jalan penyelesaian suatu permasalahan dengan cara yang lebih positif dan menghindari tindakan kekerasan. Selain itu, sikap moderat yang juga berarti tidak ekstrem memiliki prinsip untuk dapat memberikan permakluman atau bahkan memaafkan kemungkinan perbuatan salah yang dilakukan oleh pihak lain karena bagi pandangan moderat perbuatan keliru atau salah adalah suatu hal yang manusiawi meskipun dengan catatan bahwa perbuatan salah dimaksud bukan karena faktor kesengajaan dan diulang-ulang.

Oleh sebab itu, toleransi adalah jalan terbaik untuk diberikan kepada siapapun selama itu tidak mengganggu kepentingan umum. Kesabaran dan sikap moderat merupakan upaya yang harus didukung oleh semua kalangan, khususnya oleh mereka yang mempunyai otoritas dan para pembuat kebijakan publik. Dalam wilayah negara-bangsa, toleransi harus menjadi kesepakatan bersama diantara pelbagai kalangan. Oleh karenanya, untuk menuju hal tersebut membutuhkan sebuah komitmen politik dari berbagai kalangan guna menjadikan toleransi sebagai pilihan alternatif (Yamin, M & Aulia, Vivi. 2011:13-14).

Sikap toleransi juga dapat menjadikan warga suatu komunitas dapat hidup berdampingan secara damai, rukun, dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, seperti dengan tetangga maupun dengan anggota masyarakat lainnya masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan, baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim.

Menurut konsep Islam, tidak ada dan tidak boleh dilakukan pemaksaan dalam beragama. Masing-masing individu diberi keleluasaan untuk memilih jalan hidupnya karena manusia sudah diberi perangkat bernama akal untuk menimbang mana kebaikan dan mana keburukan. Karena itu, setiap konsekuensi dari perbuatan manusia juga sudah dijelaskan bahwa harus siap menanggung segala akibat yang ditimbulkan oleh pilihan dan perbuatan yang dilakukannya sendiri. Islam menginginkan penganutnya untuk secara sadar dan atas pertimbangan sendiri menempuh jalan yang lurus atau jalan keselamatan (Majalah Tabligh. 2012:16).

Sebagai bentuk adanya pluralisme, dialog antar agama untuk upaya memperkaya pengalaman keagamaan sangat diperlukan, karena munculnya dialog antar agama secara otomatis akan menimbulkan keterbukaan atau dapat melakukan pengembaraan spiritual kedalam jantung agama-agama lain. Dengan dialog ini juga tidak akan muncul sikap eksklusif, sikap fanatik serta sikap yang mengarah pada klaim kebenaran (*claim of truth*) yang menimbulkan konflik antar agama, yang mengakibatkan agama bukan berperan sebagai kekuatan pembebas yang dapat memberikan pencerahan tapi justru menjadi penyulut konflik (Suara Hidayatullah. 1996:12).

Penekanan utama dan prinsip keanekaragaman adalah pada kesetaraan budaya, yang harus dipahami sebagai pertalian sejati keragaman atau kemajemukan dalam ikatan sosial, budaya dan kemasyarakatan. Komitmen yang harus dipegang oleh bangsa Indonesia yang hidup dalam keanekaragaman adalah saling menghormati dan menghargai masing-masing pihak dalam kehidupan bermasyarakat serta kearifan dan jiwa besar untuk menerima realitas kemajemukan tersebut.

Muhammadiyah tidak pernah mau dan tidak mengambil jalan perjuangannya dalam membangun masyarakat Indonesia melalui cara-cara destruktif dan anarkis. Organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 jauh sebelum kemerdekaan Indonesia ini mengambil posisi dan peran kultural atau kebudayaan. Jalur yang dipilih adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan sebagai upaya mencerdaskan rakyat Indonesia pada masa itu yang sangat terbelakang dan tertinggal karena penjajahan dan kolonialisasi, mendirikan rumah sakit dan panti asuhan untuk menampung masyarakat miskin dan lemah secara ekonomi maupun politik.

Ketika ada dua kelompok yang cenderung sama-sama ekstrem yaitu ekstrem kanan yang menginginkan kehidupan masyarakat Indonesia serba syariat dan formalitas agama berhadapan dengan kelompok ekstrem kiri yang selalu menuduh agama khususnya Islam sebagai sumber masalah dan menginginkan negara Indonesia menjauhi agama, sikap Muhammadiyah jelas menolak kedua pemikiran dan tindakan diatas.

Bagi Muhammadiyah jalan tengah yang terbaik adalah tetap berpegang pada Pancasila sebagai *darul ahdi was syahadah* yakni negara kesepakatan dan pembuktian. Negara Pancasila tetap ber-Ketuhanan Yang Maha Esa sekaligus harus membuktikan dan mewujudkan kelima sila khususnya sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sikap dan perbuatan yang tidak ekstrem penting untuk menjaga negara agar tetap utuh dan tidak terpecah belah. Karena jika kedua sikap ekstrem yang disebutkan sebelumnya menjadi pola pikir mayoritas di negeri ini akan sangat berbahaya dan sekaligus menjadi bangsa yang tidak memahami/menghargai sejarah. Karena sejarah Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari sejarah perjuangan tokoh-tokoh agama khususnya agama Islam.

Menyelesaikan persoalan dan perbedaan pandangan juga tetap harus dalam bingkai kepala dingin, bukan dengan tindakan atau sikap kekerasan serta saling menghancurkan seperti layaknya hukum rimba, yang kuat menindas kelompok lemah, yang besar memangsa kelompok kecil. Masyarakat beradab niscaya mengedepankan pikiran dan dialog untuk mencapai titik persamaan atau kesepakatan. Kalaupun tidak dapat dicapai titik temu, maka persoalan akan dihadapkan pada meja hukum atau pengadilan sebagai lembaga penengah yang akan memberikan keputusan.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerimaan serta Penghargaan atas Keberagaman dan Perbedaan dalam Muhammadiyah dibuktikan dari fakta banyaknya institusi pendidikan Muhammadiyah baik sekolah menengah maupun perguruan tinggi di wilayah Indonesia timur yang mayoritas siswanya berasal dari agama non-muslim.

2. Berinteraksi Positif dalam Kemajemukan, dapat kita lihat dari komposisi pengurus atau elit Muhammadiyah tidak selalu didominasi oleh orang Jawa atau lebih khusus Yogyakarta sebagai tempat lahirnya, namun juga terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda.
3. Sikap Moderat dan Tidak Eksklusif dalam Muhammadiyah dapat dilihat dari sampai saat ini tetap bersahabat baik dengan semua elemen masyarakat dan tidak pernah terlibat perbuatan anarkis dan pengrusakan terhadap kelompok-kelompok lain diluar organisasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Herimanto dan Winarno. (2009). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jimung, Martin. (2005). *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara
- Jurdi, Syarifuddin. (2008). *Pemikiran Politik Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nashir, Haedar. (2011). *Muhammadiyah Abad Kedua*. Jogjakarta: Suara Muhammadiyah
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2000). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2000). *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2012). *Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 2012*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Rais, M. Amien. (1998). *Membangun Kekuatan diatas Keberagaman*. Okkie F. Muttaqie (Ed). Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Sazali. (2005). *Muhammadiyah dan Masyarakat Madani : Independensi, Rasionalitas dan Pluralisme*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah
- Suratman, dkk. (2010). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Malang: Intimedia
- Yamin, Moh & Vivi Aulia. (2011). *Meretas Pendidikan Toleransi (Pluralisme dan Multikulturalisme sebuah Keniscayaan Peradaban)*. Malang: Madani Media
- Jurnal Penelitian:**
- Sari, Milya dan Asmendri. (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA. 6 (1), 41-53. Doi: [10.15548/nsc.v6i1.1555](https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555)
- Majalah, Surat Kabar dan Buletin:**
- Majalah Tabligh. Edisi No. 10 1433 H/2012 M;
- Suara Hidayatullah. Edisi 01/IX/ Mei 1996;
- Suara Muhammadiyah. Edisi 1-15 Januari 2003; Suara Muhammadiyah. Edisi 16-31 Juli 2003; Suara Muhammadiyah. Edisi 1-15 Maret 2010; Suara Muhammadiyah. Edisi 1-15 Desember 2012; Suara Muhammadiyah. Edisi 1-15 Februari 2013.

	Journal Of Government and Social Issues (JGSI) Volume 1 Nomor 1 2021: 71-74 https://jgsi.fisip.unila.ac.id/index.php/Jurnal	
---	---	--

ARTICLE



Multiculturalism of Fear Etnis Tionghoa pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi Dusun Kebun Sayur Desa Mengkubang Belitung Timur)

Daffa Davtywa¹ Tabah Maryanah² Budi Kurniawan³

¹ Prgram Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

² Prgram Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite:

Davtywa, D., Marynah, T., & Kurniawan, B. (2021). Multiculturalism of Fear Etnis Tionghoa pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi Dusun Kebun Sayur Desa Mengkubang Belitung Timur). *Journal of Government and Social Issues (JGSI)*, 1(1), 71-74.

Article History

Dikirim: 21 Oktober, 2021;

Diterima: 14 Desember, 2021;

Dipublikasi: 31 Desember, 2021;

Keywords:

Ethnic Chinese,

Presidential Election in 2019.

ABSTRACT

The 2019 Presidential Election in Dusun Kebun Sayur Desa Mengkubang, Belitung Timur resulted in Jokowi-Maruf Amin coming out as the winners. The percentage of votes in Dusun Kebun Sayur, Jokowi-Maruf Amin got 80.05% and Prabowo-Sandiaga Uno got 19.95%. One of the biggest votes in Jokowi's victory came from the Chinese Ethnic group. The purpose of this research is to explain why the Ethnic Chinese in Dusun Kebun Sayur choose the Jokowi-Maruf Amin in the 2019 Presidential Election and to find out if there is true a fear of Ethnic Chinese who will be threatened if the Prabowo is elected president. The theory used in this study is Multiculturalism of Fear (Jacob Levy, 2000). This study used descriptive qualitative method. The data collection techniques used in this study is interviews and documentation. The results of this study showed that the majority of Ethnic Chinese in Dusun Kebun Sayur chose Jokowi-Maruf Amin because of fears about Parbowo's if elected President of Republic of Indonesia. Based on the findings in the field, the Ethnic Chinese fear towards Prabowo because they claimed that Prabowo was the figure responsible for the 1998 riots, this caused Ethnic Chinese trauma to prabowo. On the other side, They are also afraid of Prabowo's supporters who consist of hard-line Islamic groups like FPI. This caused to majority of the Chinese Ethnic in Dusun Kebun Sayur in 2019 presidential election to dominate Jokowi and Maruf Amin.

Kata kunci:

Etnis Tionghoa,

Pemilihan Presiden 2019.

Penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2019 di Dusun Kebun Sayur Desa Mengkubang Belitung Timur menghasilkan Pasangan Jokowi-Maruf Amin keluar sebagai pemenang. Persentase suara di Dusun Kebun Sayur yaitu pasangan Jokowi-Maruf Amin memperoleh 80.05% dan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno memperoleh 19.95%. Salah satu suara terbesar dalam kemenangan Jokowi di Dusun Kebun Sayur berasal dari Kelompok Etnis Tionghoa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengapa Etnis Tionghoa di Dusun Kebun Sayur Memilih Pasangan Jokowi-Maruf Amin pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 dan untuk mengetahui apakah benar adanya ketakutan Etnis Tionghoa yang akan terancam jika Prabowo terpilih sebagai presiden. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Multiculturalism of Fear (Jacob Levy, 2000). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas Etnis Tionghoa di Dusun Kebun sayur memilih pasangan Jokowi-Maruf Amin karena adanya ketakutan terhadap sosok Prabowo jika terpilih menjadi Presiden RI. Berdasarkan temuan di lapangan, ketakutan Etnis Tionghoa Dusun Kebun Sayur terhadap Prabowo dikarenakan mereka menganggap bahwa Prabowo adalah sosok yang bertanggung jawab terhadap kerusuhan 1998, hal ini menimbulkan trauma Etnis Tionghoa terhadap Prabowo. Di sisi lain Etnis Tionghoa juga takut terhadap para pendukung Prabowo yang terdiri kelompok Islam garis keras seperti FPI. Hal ini menyebabkan suara mayoritas Etnis Tionghoa di Dusun Kebun Sayur pada pemilihan presiden tahun 2019 dominan ke pasangan Jokowi dan Maruf Amin.

A. PENDAHULUAN

Tanggal 17 April 2019 menjadi tahunnya pemilihan serentak menyatukan lima jenis pemilihan sekaligus yakni pemilihan Presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan presiden dan wakil presiden memiliki dua calon kandidat yaitu pasangan nomor urut 1 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sedangkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno Pasangan nomor urut 2. Menunjukkan bahwa pemilihan presiden di menangkan oleh pasangan urut nomor 1 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. dari hasil perolehan suara Jokowi dan Ma'ruf Amin 84.646.196 (55.32%) dan Pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno memperoleh hasil suara 68.357.813 (44.68%).

Hasil suara dari kedua belah pihak tidak lepas dari politik identitas. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim yang digunakan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Salah satu isu kekentalan politik identitas di kubu Prabowo dengan keterlibatan sosok dan kelompok dibelakang pencalonan mantan Danjen Kopassus tersebut beberapa kelompok disebut konservatif, seperti Presidium Alumni 212 dan Front Pembela Islam (FPI), FPI sendiri disebut-sebut memperoleh panggung dalam kampanye akbar tersebut dengan juga menggunakan narasi-narasi identitas. Ketua FPI Habib Rizieq Shihab misalnya, **berpidato** melalui rekaman video dan meminta audiens untuk memilih Prabowo-Sandi karena paslon ini dianggap sebagai pelindung umat Islam.

Kemenangan Jokowi ada beberapa faktor yaitu dari banyaknya partai yang mendukungnya dan juga menggunakan isu-isu politik identitas, salah satunya terpilihnya Maruf Amin sebagai cawapres Jokowi disebut sebagai penggunaan politik identitas hal tersebut pun dilakukan guna menjaring kelompok muslim dan melindungi Jokowi dari isu-isu anti Islam¹

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan².

Konteks politik dan keagamaan masyarakat di tingkat lokal yang berbeda-beda membuat gejala dan kecenderungan pemilihan pasca 2012 yang terjadi di Desa Mengkubang Kecamatan Damar Belitung Timur meningkat sangat tinggi. Data hasil pemilihan presiden tahun 2019 diatas menunjukkan bahwa di Belitung Timur Kecamatan Damar Desa Mengkubang Memilih Jokowi tergolong sangat tinggi, mencapai 80.05% suara sedangkan Prabowo hanya mengantongi 19.95% suara. Sejalan dengan hal itu bahwa sebagian besar

¹ A43, 11 April 2019. *Jokowi Juga Pakai Politik Identitas?* diakses dari <https://www.pinterpolitik.com> tanggal 18 November 2019 pukul 10:09 WIB

² Dikases dari <https://www.babelprov.go.id> tanggal 19 November 2019 pukul 09:38 WIB.

penduduk di Provinsi Bangka Belitung adalah beretnis Melayu (60%) adapun sebagian kecil penduduk lainnya adalah etnis Cina (30%) dan etnis-etnis lainnya³.

Lebih dari pada itu kemudian ada fenomena menarik di Indonesia yakni dengan maraknya politik identitas terutama di media sosial pulau Belitung terutama Belitung Timur adalah fenomena menarik jika melihat pemilu dalam konteks politik identitas. Beberapa fenomena politik identitas, terpilihnya Cung Ban Hok atau Ahok sebagai Bupati Belitung Timur pada tahun 2005 sepertinya menjadi barometer keterlibatan Tionghoa dalam dunia politik paska Orde Baru dan Basuri Tjahaja Purnama di tahun 2010. Kedua, Belitung Timur relatif secara etnis beragam dimana etnis Tionghoa bermigrasi ke pulau Belitung dalam rangka menambang timah. Ketiga Belitung Timur memiliki fenomena fakta bahwa sentra kecamatan-kecamatan Etnis Melayu memenangkan pasangan Jokowi-Maruf Amin disaat kecenderungan pemilu pulau Sumatera dikuasai Pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. sehingga peneliti tertarik untuk meneliti politik identitas Etnis Tionghoa di Dusun Kebun Sayur Desa Mengkubang Belitung Timur pada pemilihan presiden tahun 2019.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Multiculturalism of Fear di Dusun Kebun Sayur Desa Mengkubang

Secara umum alasan Etnis Tionghoa memilih pasangan Jokowi-Maruf Amin sangat normatif dengan menggunakan teori *Multiculturalism of Fear* telah menjawab Etnis Tionghoa lebih cenderung memilih Jokowi karena ketakutan penyebabnya adalah takut terhadap sosok Prabowo maupun pendukungnya terutama persepsi Etnis Tionghoa menganggap bahwa Prabowo pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan tahun 1998 serta bertanggung jawab atas kekerasan terhadap Etnis Tionghoa. Mereka membayangkan jika Prabowo menjadi pemimpin nanti posisi kelompok Etnis Tionghoa akan terancam dan trauma karena sejarah politik Etnis Tionghoa di Indonesia dari masa Orde Baru hingga Pilkada Jakarta 2017. Maka harapan Etnis Tionghoa untuk mendapatkan perlindungan lebih besar diperoleh dari pasangan Jokowi-Maruf Amin.

Kemudian cara Etnis Tionghoa yang ada di Dusun Kebun Sayur mencegah kekejaman, penghinaan, kekerasan politik dan terancamnya kelompok mereka adalah dengan membatasi otonomi orang-orang yang kejam dan gilirannya tergantung mengurangi pluralitas dan tindakan mereka. Siapa yang di batasi yaitu orang-orang yang kejam, yang disini dipresepsikan sebagai Prabowo dan pendukungnya. Membatasinya dengan tidak memilih Prabowo pada pemilihan presiden tahun 2019 otomatis Prabowo tidak akan menjadi presiden.

C. SIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan esensi dari *Multiculturalism of Fear* adalah faktor yang menjelaskan mengapa Etnis Tionghoa lebih memilih Jokowi ketimbang Prabowo. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara lapangan di Dusun Kebun Sayur. Karena mereka takut terhadap sosok Prabowo maupun pendukungnya terutama persepsi Etnis Tionghoa menganggap bahwa Prabowo pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan tahun 1998 serta bertanggung jawab atas kekerasan terhadap Etnis Tionghoa. Mereka membayangkan jika Prabowo menjadi pemimpin nanti posisi kelompok Etnis Tionghoa akan terancam.

Cara Etnis Tionghoa yang ada di Dusun Kebun Sayur mencegah kekejaman, penghinaan, kekerasan politik dan terancamnya kelompok mereka adalah dengan membatasi otonomi orang-orang yang kejam dan gilirannya tergantung mengurangi pluralitas dan tindakan mereka. Orang-orang yang kejam yaitu dipresepsikan sebagai Prabowo dan pendukungnya.

³Admin, 22 Desember 2018, *Mengenal Suku Bangka Belitung Suku Asli dan Pendatang* diakses dari <https://senibudayaku.com> tanggal 19 November 2019 pukul 11:00 WIB

Membatasinya dengan tidak memilih Prabowo pada pemilihan presiden tahun 2019 otomatis Prabowo tidak akan menjadi presiden.

Kemudian di Dusun Kebun Sayur membuktikan kemenangan Jokowi karena kesadaran dan bersatunya suara Etnis Tionghoa demi keamanan pluralisme dan keamanan kelompok mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, U. (2002). *Politik Identitas Etnis*. Magelang: Indonesia Tera.
- Akbar, I. (2018). *Politik Etnis Tionghoa Di Indonesia Dinamika, Strategi dan Partisipasi Etnis Tionghoa di Kancah Politik Pasca Reformasi di Bangka Belitung*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Altheide. (2006). *Terrorism and The Politics of Fear: Cultural Studies Critical Studies*. 6.
- Barth, F. (1988). *Kelompok Etnis dan Batasnya*. LS: Jakarta UI Press.
- Budi, K. (2019). *Evaluasi Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Bangka*.
- Bungin, B. (2010). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Chandakirana, K. (1989). *Geertz dan Masalah Kesukuan*. Jakarta: Prisma No.2/1969.
- Flick. (2014). *A Companion to Qualitatif Research*. London: Sage Publications.
- Glassner, B. (2004). *Narrative Techniques of Fear Mongering (Vols. 71,)*. Social Research.
- Jacob, L. (2000). *The Multiculturalism of Fear*. Oxford University Press.
- Leo, S. (2012). *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Miler, & Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis*. USA: Sage Publications.
- Sari, E. (2016). *Kebangkitan Politik Identitas Islam pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. Jurnal Kritis, 2*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



Jurusan
Ilmu Pemerintahan
FISIP UNILA



JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG